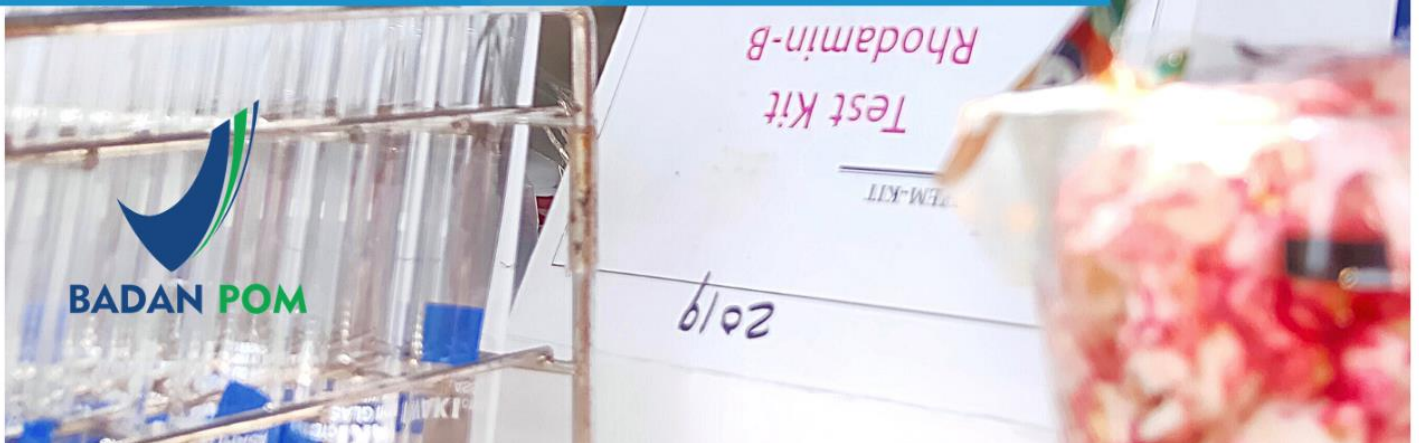


Disusun sebagai upaya dalam memberikan nilai tambah kepada publik, dimana seluruh rangkaian kegiatan pengawasan Obat dan Makanan harus dapat dirasakan manfaatnya dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

2020 Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah



BALAI BESAR POM di Palangka Raya

Kata Pengantar



Laporan Kinerja BBPOM di Palangka Raya merupakan perwujudan pertanggung jawaban kinerja pencapaian visi dan misi BBPOM di Palangka Raya Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja tersebut menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi dan *achievement* BBPOM di Palangka Raya. Penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Palangka Raya mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BBPOM di Palangka Raya merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020, BBPOM di Palangka Raya mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar **103,36%**.

Dalam Laporan Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja tahun 2020 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional dan UPT BPOM lain yang setara, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang, dan efisiensi penggunaan sumber daya serta rencana tindak lanjut yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja BBPOM di Palangka Raya diharapkan akan memberikan manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Palangka Raya dan umpan balik bagi organisasi dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja dimasa mendatang.

Palangka Raya, 1 Februari 2021
Kepala BBPOM Di Palangka Raya



Drs. Leonard Duma, Apt., M.M



Highlight

Bidang Informasi dan Komunikasi

Penyerahan Penghargaan kepada Bupati Barito Selatan atas prestasi Kelurahan Buntok Kota yang mendapatkan peringkat ke-3 Tingkat Nasional dalam program Desa Pangan Aman

1

Penyerahan Penghargaan kepada Bupati Barito Utara atas prestasi Pasar Bebas Banjir yang mendapatkan peringkat ke-2 Tingkat Nasional dalam program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

2



Bidang Penindakan

1

Operasi Penindakan terhadap Kosmetik dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Kota Palangka Raya

2

Operasi Penindakan terhadap Obat Tanpa Izin Edar di Kota Palangka Raya

3

Operasi Penindakan terhadap Obat Tanpa Izin Edar di Kabupaten Kapuas

4

Kegiatan Pelatihan "Teknik Interogasi/Deteksi Perilaku Bohong Non Verbal Secara Tatap Muka" tanggal 27 Juli 2020

5

Kegiatan Bimbingan Teknis "Teknik Dasar Intelijen" tanggal 12 Oktober 2020



Bidang Pengujian

PEMINJAMAN ALAT PCR KE RS DR. DORIS SYLVANUS SEBAGAI BENTUK KONTRIBUSI BBPOM DI PALANGKA RAYA DALAM PENGUJIAN SAMPEL SPESIMEN SARS COV-2 DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

1

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN INTEGRASI ISO 17025:2017 DAN QMS ISO 9001:2015

2

PELATIHAN ONLINE "VERIFIKASI METODE MIKROBIOLOGI"

3

BENCHMARKING PENGUJIAN KE BBPOM BANJARMASIN, BARISTAND INDUSTRI BANJARBARU, BPSMB BANJARBARU

4

AUDIT GLP ONLINE

5



Bidang Pemeriksaan



1

Facilitasi/pendampingan UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan ijin edar

2020

Highlight

KANTOR BPOM DI KOTAWARINGIN BARAT

1



Penandatanganan Pakta Integritas 2020 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

2



KIE HUT BPOM

3

KIE Online Bertajuk Membahas Seputar "Chloroquine for Covid-19"

4



KIE Online "Memilih Obat dan Pangan Secara Bijak Selama Pandemi Covid-19"

6



KIE Online "Tetap Sehat Selama Era New Normal"

7



KIE Bertajuk "Menyongsong New Normal dengan menjadi Generasi Muda Produktif dan Cerdas"

9



KIE Keamanan Pangan Bagi Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat

10



KIE RITEL PANGAN



KIE UMKM PANGAN

11



KIE Keamanan Pangan Untuk Masyarakat Kotawaringin Barat



KIE Keamanan Pangan Untuk Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

12



Operasi Pasar Menjelang Natal dan Tahun Baru

2020

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja BBPOM di Palangka Raya merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Palangka Raya atas penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja BBPOM di Palangka Raya merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024, yaitu “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”, BBPOM di Palangka Raya telah menetapkan Visi yaitu **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, BBPOM di Palangka Raya mempunyai empat misi yaitu (1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan berkepihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa; (3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan (4) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam mencapai visi dan misi, BBPOM di Palangka Raya menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan dan strategis BBPOM di Palangka Raya dalam Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya tahun 2020-2024 yaitu (1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan; (2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan; (3) Terwujudnya pertumbuhan dunia

usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM; (4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; (5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan; (6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan; dan (7) Terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategis BBPOM di Palangka Raya menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) yang terdiri dari tiga perspektif yaitu *stakeholder*, *internal process* dan *learning and growth*. Peta strategis tersebut terdiri dari 11 (sebelas) sasaran kegiatan, 3 (tiga) sasaran kegiatan diantaranya merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, 4 (empat) sasaran kegiatan pada *internal process* dan 4 (empat) sasaran kegiatan *learning and growth perspective*. Sebelas sasaran kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya;
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan kerja BBPOM di Palangka Raya yang optimal;
9. Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan; dan
11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel.

Dari 11 sasaran kegiatan diatas, 10 sasaran kegiatan telah berhasil mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan hasil sangat baik dan baik, sedangkan 1 sasaran kegiatan dengan hasil cukup dengan uraian sebagai berikut :

1. Kriteria Sangat Baik untuk 3 sasaran kegiatan karena pencapaian indikator masing-masing mencapai lebih dari 110% dari target, yaitu :

- Capaian sasaran kegiatan ketujuh sebesar 120%, Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan 1 (satu) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan dengan berhasil menyelesaikan semua tahapan penindakan sampai dengan tahap II melebihi target perkara yang telah ditetapkan.
- Capaian sasaran kegiatan keenam sebesar 119,60%, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan 2 (dua) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pemenuhan pengujian Obat dan Makanan terhadap standar.
- Capaian sasaran kegiatan kesembilan sebesar 110,00%, Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal dengan 1 (satu) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam mewujudkan SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal.

2. Kriteria Baik untuk 7 sasaran kegiatan karena pencapaian indikator masing-masing mencapai lebih dari 90% dari target, yaitu :

- Capaian sasaran kegiatan pertama sebesar 109,96%, Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan 4 (empat) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.
- Capaian sasaran kegiatan keempat sebesar 107,15%, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan 6 (enam) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik.

- Capaian sasaran kegiatan kesebelas sebesar 101,64%, Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palangka Raya secara Akuntabel dengan 2 (dua) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam mengelola keuangan secara akuntabel.
 - Capaian sasaran kegiatan kelima sebesar 101,55%, Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan 4 (empat) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.
 - Capaian sasaran kegiatan ketiga sebesar 95,48%, Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan 3 (tiga) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.
 - Capaian sasaran kegiatan kedua sebesar 94,57%, Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBOM di Palangka Raya dengan 1 (satu) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.
 - Capaian sasaran kegiatan kedelapan sebesar 90,85%, Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal dengan 2 (dua) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal.
- 3. Kriteria Cukup untuk 1 sasaran kegiatan karena pencapaian indikator masing-masing mencapai kurang dari 90% dari target, yaitu :**
- Capaian sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 89,33%, Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan 2 (dua) indikator, hal ini menunjukkan BBPOM di Palangka Raya masih belum berhasil mewujudkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan yang optimal.

Pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 28 indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*). Dari 28 indikator (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **5 indikator** dengan kriteria “**sangat baik**”, **15 indikator** dengan kriteria “**baik**”, **4 indikator** dengan kriteria “**cukup**”, dan **4 indikator** mempunyai capaian lebih dari 120% dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”. Dua puluh (20) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kriteria sangat baik dan baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Kalimantan Tengah tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara empat (4) Indikator Kinerja Utama yang memiliki nilai kategori cukup perlu penguatan dan pengawalan secara serius agar tahun mendatang memiliki capaian yang lebih baik. Keempat indikator kinerja utama yang perlu diperhatikan tersebut ialah :

1. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
2. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
3. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BBPOM di Palangka Raya
4. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (*Good Laboratory Practice*).

Empat (4) Indikator Kinerja Utama yang berkriteria tidak dapat disimpulkan yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap target yang ditetapkan pada tahun mendatang sampai dengan akhir periode Rencana Strategis 2020-2024.

Untuk mendukung pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut BBPOM di Palangka Raya memperoleh alokasi anggaran pada TA 2020 sebesar Rp 27.417.031.000,-. Pada tanggal 02 Maret 2020 terdapat pengurangan pagu DIPA menjadi Rp 26.792.031.000,- karena kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat tidak dapat dilaksanakan. Pada tanggal 30 April 2020 terdapat pengurangan pagu DIPA dalam

rangka *refocusing* penanggulangan covid 19 menjadi Rp 23.688.803.000,-. Pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam rangka realokasi anggaran pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama tokoh masyarakat menjadi Rp 22.800.803.000,-. Realisasi anggaran tahun 2020 adalah Rp 21.803.273.783,- atau 95,63% atau sebesar 98,75% jika tanpa belanja pegawai. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dari besarnya penyerapan pagu anggaran, tetapi mempertimbangkan pula ketercapaian output, upaya efisiensi (*reducing cost*), peningkatan nilai tambah (*value added*), serta memberikan dampak signifikan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. BBPOM di Palangka Raya melaksanakan 16 kegiatan utama dengan hasil efisien, dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0,0 hingga 0,4.

BBPOM di Palangka Raya juga mendorong inovasi dan terobosan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan baik di internal maupun eksternal. Inovasi dan terobosan dimaksud diantaranya aplikasi e-UMKM Harati (fasilitasi/pendampingan UMKM/IRTP dalam proses sertifikasi), SIMAS (Sistem Manajemen Persuratan), SANPRABU (Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Bukti) dan site MONELA (Monitoring Evaluasi dan Pelaporan).

Tahun 2020, BBPOM di Palangka Raya meraih beberapa penghargaan dalam pencapaian output Desa Pangan Aman dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yaitu Kelurahan Buntok Kota, Barito Selatan sebagai desa terbaik ketiga dan Pasar bebas banjir Barito Utara sebagai pasar terbaik kedua bebas dari bahan berbahaya. Selain itu, BBPOM di Palangka Raya juga mendapat penghargaan dari Kanwil DJKn Kalselteng atas penanggulangan covid-19 melalui peminjaman alat laboratorium RT-PCR untuk RSUD Doris Silvanus.

Laporan Kinerja BBPOM di Palangka Raya ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi yang merupakan upaya terbaik seluruh pegawai namun masih banyak hal-hal yang perlu penyempurnaan dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Oleh karena itu, kami akan selalu mendorong untuk bersama-sama mengupayakan perbaikan bagi BBPOM di Palangka Raya dan bagi masyarakat dengan selalu menerapkan budaya Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama, Inovatif dan Responsif. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi misi BBPOM di Palangka Raya.

Kami mengapresiasi seluruh lintas sektor terkait yang telah bekerja sama dengan BBPOM di Palangka Raya dan seluruh masyarakat yang sering berinteraksi melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Kami berharap kerjasama akan semakin erat dan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah semakin merasakan kehadiran BBPOM di Palangka Raya. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai bentuk tanggungjawab BBPOM di Palangka Raya dan mendapatkan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Highlight	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Daftar Isi	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020–2024	16
2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2020	18
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	18
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020	20
2.5. Metode Pengukuran	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
BAB IV. PENUTUP	185
4.1. Kesimpulan	185
4.2. Rencana Perbaikan Kinerja	188
LAMPIRAN	
Lampiran I. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	Error! Bookmark not defined.
Lampiran II. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020	Error! Bookmark not defined.



BAB. I

Pendahuluan

Gambaran Umum Organisasi
Struktur Organisasi

BALAI BESAR POM
di Palangka Raya

@bbpompalangkaraya | palangkaraya.pom.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan terbit Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 pada tanggal 4 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (terdiri dari 14 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

1. BBPOM di Palangka Raya, cakupan pengawasan meliputi 10 kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Murung Raya.
2. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, cakupan pengawasan meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tugas UPT BPOM ialah melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerjasama dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh BBPOM di Palangka Raya.

1.3 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BBPOM di Palangka Raya sebagaimana tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjamin mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
 - e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
 - f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahatanganan; dan
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

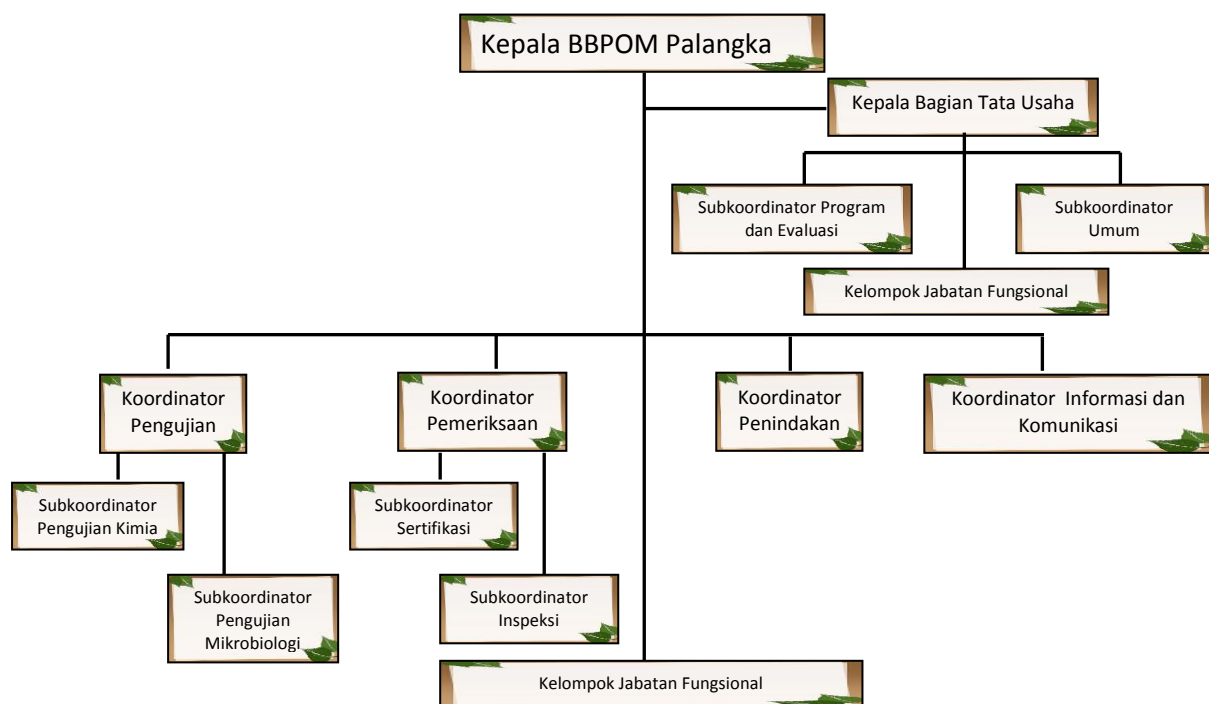
Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM mengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subkelompok substansi program dan evaluasi; dan
 - b. Subkelompok substansi umum.
2. Kelompok Jabatan Fungsional yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM mengelompokan uraian fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas :

- a. Kelompok substansi pengujian, terdiri atas :
 - i. Subkelompok substansi pengujian kimia; dan
 - ii. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi.
- b. Kelompok substansi pemeriksaan, terdiri atas :
 - i. Subkelompok substansi inspeksi; dan
 - ii. Subkelompok substansi sertifikasi,
- c. Kelompok substansi penindakan; dan
- d. Kelompok substansi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi; memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas; dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kelompok substansi dan unit kerjanya. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dibantu oleh subkoordinator. Subkoordinator jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis melalui koordinator sesuai dengan kelompok substansi dan unit kerjanya.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya

1.4 Isu Strategis

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control* dengan mendorong penerapan *Risk Management Program*.

BBPOM di Palangka Raya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah meliputi pengawasan fasilitas produksi, fasilitas distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

BBPOM di Palangka Raya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) pilar inti kegiatan yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi fasilitas produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : *sampling* dan pengujian, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BBPOM di Palangka Raya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

Analisis Lingkungan Strategis

✓ Internal

• Sumber Daya Manusia

Pegawai BBPOM di Palangka Raya sampai dengan Januari 2021 berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang, 3 (tiga) orang diantaranya sedang melaksanakan tugas belajar sehingga jumlah pegawai yang aktif 55 (lima puluh lima). Sedangkan jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 16 (enam belas) orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan, unit kerja dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

	Bagian/Fungsi	S2	Apt	S1	D3	SMF/SMA
BBPOM di Palangka Raya	TU	2	2	7	2	5
	Pemeriksaan	1	3	2	0	2
	Pengujian	0	9	5	4	4
	Infokom	0	2	1	1	0
	Penindakan	0	2	3	0	1
	Total	3	18	18	7	12
Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Loka	0	5	10	1	0

Tabel 1.1. Distribusi Pegawai BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat

Perbandingan jumlah SDM dengan ABK Tahun 2020 sebagai berikut :

	ABK	Existing	Gap
BBPOM di Palangka Raya	131	61	70
Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	34	16	18

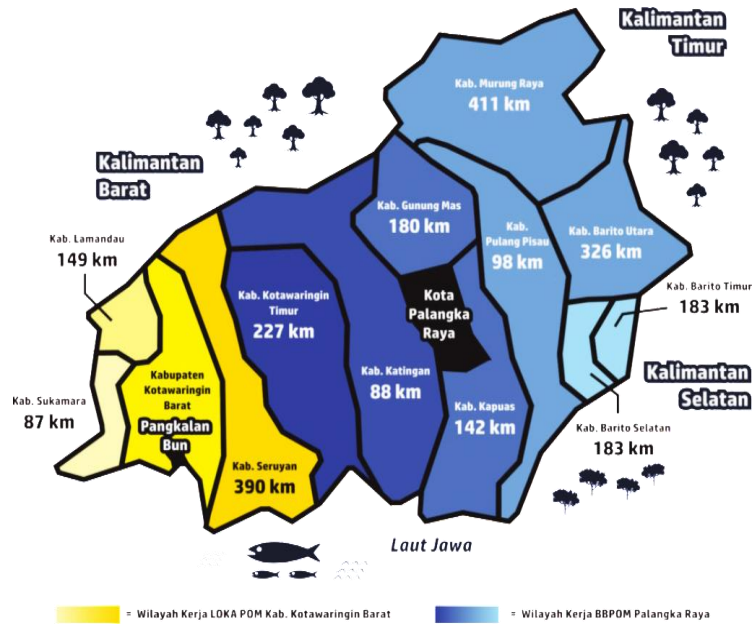
Tabel 1.2. ABK BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat

- **Sumber Daya Lainnya**

Kantor BBPOM di Palangka Raya memiliki luas lahan 10.788 m² dengan luas bangunan 2.753 m², selain digunakan sebagai fungsi perkantoran dan administrasi juga termasuk fungsi pelayanan publik dan pengujian dengan peralatan laboratorium yang memadai sesuai dengan standar Laboratorium BPOM yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu BBPOM di Palangka Raya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 serta manajemen lingkungan ISO 14001:2015. Kantor Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berstatus sewa bangunan.
 - **Anggaran**

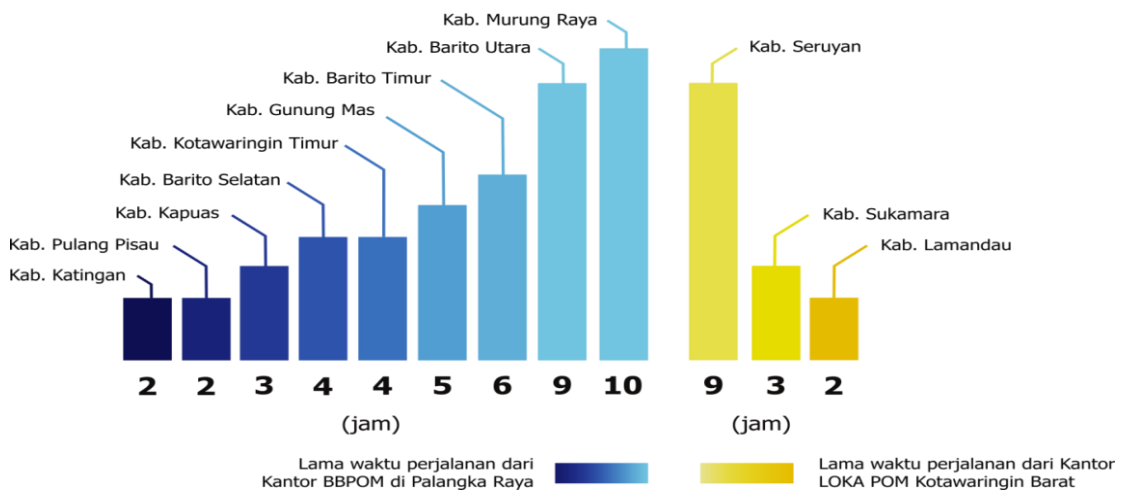
Anggaran BBPOM di Palangka Raya termasuk Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2020 No DIPA-063.01.2.432872/2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 sebesar Rp 27.417.031.000,- Selama tahun 2020 telah dilakukan revisi DIPA hingga anggaran menjadi Rp 22.800.803.000,-.
- ✓ **Eksternal**
- **Kondisi Geografis dan Demografi**

Provinsi Kalimantan Tengah atau dikenal dengan sebutan Bumi Tambun Bungai, mempunyai luas sekitar 153.364 km yang merupakan provinsi nomor dua terluas di Indonesia. Cakupan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 14 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 2.769.156 jiwa. Dengan luas wilayah tersebut, kesempatan untuk tumbuhnya lokasi perdagangan baru semakin terbuka. Dengan posisinya yang berada ditengah-tengah wilayah Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah banyak dijadikan sebagai *interconnection* atau penghubung dengan daerah-daerah lain. Selain itu, dengan adanya pelabuhan di beberapa kabupaten, seperti di Sampit, Pangkalan Bun, Sukamara dan Pulang Pisau, maka akses masuk ke wilayah Kalimantan Tengah semakin mudah.



Gambar 1.2. Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (disertai keterangan jarak tempuh dari pusat kantor UPT)

Jarak tempuh dan lama waktu perjalanan dari Kota Palangka Raya ke wilayah kerja dan lama waktu perjalanan dari Kabupaten Pangkalan Bun ke wilayah kerja dalam lingkup Loka Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Gambar 1.3



Gambar 1.3. Lama waktu perjalanan dari Kota Palangka Raya dan dari Kota Pangkalan Bun

Fasilitas produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi usaha kecil obat tradisional, industri pangan dan industri rumah tangga pangan. Sedangkan fasilitas distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, apotek, toko obat, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Gudang Farmasi kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, klinik, fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Jumlah fasilitas produksi dan distribusi

yang diawasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada tabel 1,3 dan 1,4 di bawah ini.

IRTP	MD	UKOT	UMOT
851	5	1	2

Gambar 1.4. Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah

PBF	Apotek	Toko Obat	Instalasi Farmasi Pemerintah	RS	Puskesmas	Klinik	Fasilitas Distribusi OT/SK	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Fasilitas Distribusi Pangan
7	343	219	15	33	175	83	224	150	699

Gambar 1.5. Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah

Isu Strategis

Berikut isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

SDM BBPOM di Palangka Raya sampai dengan Januari 2021 berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang, 3 (tiga) orang diantaranya sedang melaksanakan tugas belajar sehingga jumlah pegawai yang aktif 55 (lima puluh lima). Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM di Palangka Raya belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan jumlah SDM yang terbatas dan harus menjawab tantangan yang semakin kompleks BBPOM di Palangka Raya terus berusaha meningkatkan kompetensi SDM yang ada baik *hard skill* maupun *soft skill* untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja dan memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. BBPOM di Palangka Raya juga mempunyai strategi pengembangan pegawai sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis serta meningkatkan kemampuan *soft competence* untuk menghasilkan pribadi yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Selain itu, BBPOM di Palangka Raya terus melakukan penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran dibidang Obat dan Makanan.

2. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BBPOM di Palangka Raya, laboratorium mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu BBPOM Palangka Raya terus melakukan peningkatan pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini BBPOM Palangka Raya telah didukung dengan *instrument* laboratorium teknologi kompleks seperti LCMSMS, GCMS dan *real time* PCR.

3. Disintegrasi Data

Pada era revolusi teknologi (digitalisasi) saat ini, kita dituntut untuk adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan :

- a. Kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni;
- b. Sistem basis data dan informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan; dan
- c. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan saat ini adalah banyaknya aplikasi dibuat oleh masing-masing Unit Kerja yang belum sepenuhnya terintegrasi, data dasar dan informasinya juga tersebar. Permintaan banyaknya laporan dari berbagai Unit Kerja dengan data yang sama namun berbeda format laporannya menuntut tenaga dan waktu ekstra dalam mengolahnya sedangkan sumber daya manusia BBPOM Di Palangka Raya sangat terbatas. Pengelolaan *big data* yang tepat dan efisien serta satu data untuk semua akan meningkatkan efektivitas kinerja BBPOM di Palangka Raya. Bank data diperlukan sebagai satu sumber pengolahan data dan laporan yang diyakini sebagai sumber informasi penting dan bermakna yang akan menjadi sumber data bagi BPOM sebagai dasar pembuatan kebijakan.

4. Kemandirian Pelaku Usaha untuk Peningkatan Daya Saing

Jumlah pelaku usaha pangan mikro dan kecil yang jumlahnya cukup besar di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga adalah :

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan keterampilan pelaku usaha UMKM;
- b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu;
- c. Kesadaran tentang peningkatan daya saing perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia;
- d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan, keamanan pangan (hygiene sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan); dan
- e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

Sebagai salah satu wujud dari misi kedua yaitu mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan, BBPOM di Palangka Raya menggandeng Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memiliki produk yang aman dan mampu berdaya saing. Beberapa kegiatan berupa pendampingan dan bimbingan teknis telah dilakukan terhadap beberapa UMKM yang dianggap layak untuk naik kelas dari nomor P-IRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota menjadi nomor MD dari Badan POM, serta bimbingan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

5. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM mengacu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.24.08.15.34097 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2015-2019 yang selanjutnya ditinjau ulang melalui penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1620 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2019. *Road Map* BPOM memuat Rencana Aksi dari 9 (Sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan *quick wins*. Dari 8 area perubahan tersebut hanya 6 area perubahan yang dilakukan di BBPOM di Palangka Raya.

Pelaksanaan RB BBPOM di Palangka Raya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dan kode etik aparatur negara.

6. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017

Untuk mendukung terwujudnya salah satu Nawa Cita Presiden, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui sektor kesehatan telah diterbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi BPOM sehingga meningkatkan efektivitas kinerja pengawasannya bersama Kementerian Negara, lembaga atau daerah. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 ini didorong oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 yang menunjukkan bahwa hanya 20% hasil rekomendasi BPOM yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

Sebagai salah satu dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah sebagai bentuk pembinaan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan.

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan sinergisme kemitraan dengan kementerian maupun pemerintah daerah. Untuk itu perlu disiapkan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan koordinasi di daerah dalam bentuk peraturan gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjutnya. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM Di Palangka Raya sangat berpengaruh pada peredaran Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

7. Pandemi Global Covid-19

Pada tanggal 2 Maret 2020, diumumkan kasus pertama coronavirus di Indonesia dan pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan coronavirus sebagai pandemi global. Cara penularan melalui sistem pernafasan bawah yang berasal dari droplet manusia yang terinfeksi yang menempel pada benda-benda yang terkena droplet dan terbawa menempel ke daerah

sekitar hidung manusia yang tertular. Upaya penyelamatan dapat dilakukan dengan mencegah transmisi, penyebaran antar manusia.

Ekonomi global menghadapi konsekuensi dari pandemi covid-19 ini sehingga lebih dari 100 negara menetapkan kebijakan pembatasan *social distancing, physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan, aktivitas manusia termasuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang banyak kegiatannya melibatkan pengumpulan masa atau berinteraksi dengan masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPOM Nomor KP.11.01.2.24.03.20.21 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Badan POM dan tetap memastikan tugas dan fungsi serta pelayanan publik tetap berjalan efektif dan efisien sehingga sejak tanggal 19 Maret 2020 diberlakukan sistem Bekerja Dari Rumah/*Work From Home* serta perubahan jam kerja.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, tidak berkerumun dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

8. *Hoax* tentang Produk Obat dan Makanan yang beredar

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet dengan rata-rata 8-9 jam sehari pengguna aktif menggunakan internet. Media komunikasi massa daring memudahkan dalam penggunaannya untuk menyebarkan berita benar ataupun berita bohong yang sangat cepat mempengaruhi masyarakat.

Saat ini, berita *hoax* sangat mudah kita temukan di media *online*. *Hoax* merupakan ketidakbenaran informasi yang beredar di masyarakat, salah satunya melalui media sosial. Sebagian besar masyarakat masih mempercayai beredarnya berita *hoax* tentang Obat dan Makanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berita *hoax* dapat menggiring opini serta menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi BBPOM di Palangka Raya untuk lebih

meningkatkan pengawasan produk Obat dan Makanan serta meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dalam memerangi berita *hoax*.

9. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan seperti *advance robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan, dan kosmetik semakin beragam.

Dampak *e-commerce* menawarkan beragam pilihan kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu.

Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah serta pengaruh gencarnya promosi iklan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik pada situs daring dan tawaran-tawaran menarik dari penjual menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, BBPOM di Palangka Raya harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi *instrument* pengawasan yang berbasis kemandirian industri dan distribusi dalam memastikan keamanan, dan mutu produk yang dihasilkan.



BAB. II

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis 2020-2024
Rencana Kinerja Tahunan 2020
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Metode Pengukuran Kinerja

BALAI BESAR POM
di Palangka Raya

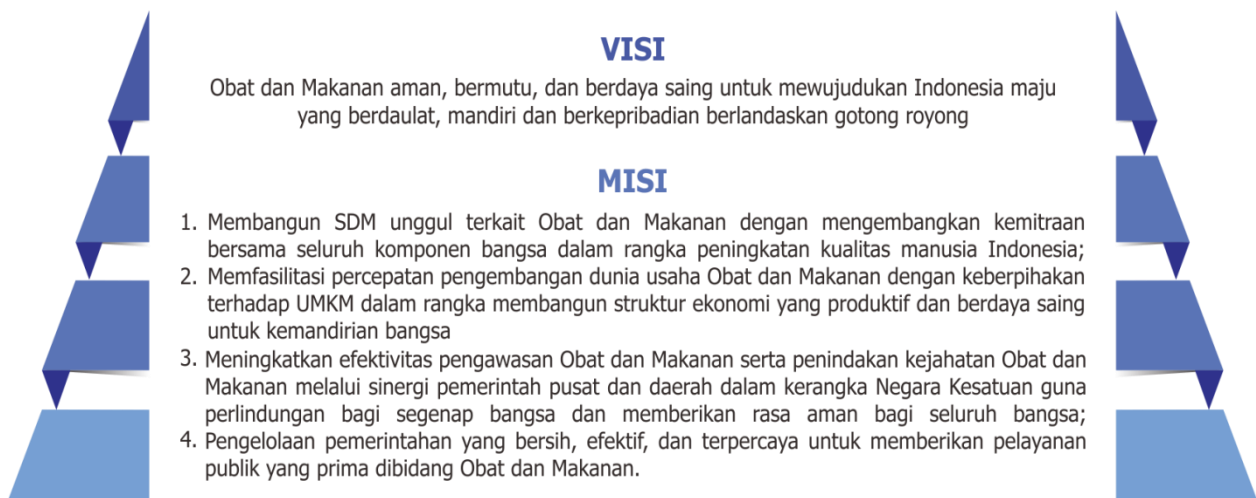
@bbpompalangkaraya | palangkaraya.pom.go.id

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Perencanaan Tahun 2020 BBPOM Di Palangka Raya tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BBPOM Di Palangka Raya tahun 2020-2025 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor HK.02.02.108.1081.05.20.1058. tanggal 18 Mei 2020. Renstra tersebut memuat visi, misi, budaya organisasi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja program dan kegiatan BBPOM di Palangka Raya. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BBPOM di Palangka Raya telah menetapkan Visi dan Misi BPOM 2020-2024 yaitu :



Gambar 2.1. Visi dan Misi BBPOM di Palangka Raya 2020-2024

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.



Gambar 2.2. Peta Strategis Level II BBPOM di Palangka Raya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBPOM di Palangka Raya maka BBPOM di Palangka Raya menggunakan 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2020-2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan penetapan target. RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan. RKT BBPOM di Palangka Raya ditetapkan tanggal 20 Mei 2020, setelah Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya disahkan pada tanggal 18 Mei 2020. Salah satu tujuan RKT disusun adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala BBPOM di Palangka Raya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 23.688.803.000,- (dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang seharusnya terwujud pada tahun 2020 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya oleh BBPOM di Palangka Raya sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	83

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja pengawasan	Target
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	72
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Palangka Raya	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	73
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	88,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15
		5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	60
		6. Indeks Pelayanan Publik	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86,62
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16
		3. Jumlah desa pangan aman	5
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	88
		2. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	81
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai	84

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pengawasan Obat dan Makanan	standar GLP	
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	1,51
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	1. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	93
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya	Efisien (95%)

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2020 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2020. Target pada RKT tahun 2020 disusun mengacu pada Renja BPOM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2020. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2020 pada sasaran kegiatan disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2020.

Berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.08.20.437 tanggal 10 Agustus 2020 telah dilakukan penyesuaian target pada indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 2020-2024, di mana target sebelumnya 72 naik menjadi 86,62, hal ini disebabkan oleh realisasi indikator tersebut pada triwulan II lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Palangka Raya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja, melaporkan capaian kinerja dan laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya selalu dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan triwulan berikutnya.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun untuk memantau pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala. RAPK memuat target kinerja per triwulan dan anggaran per indikator kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,8	80,8	80,8	Rp 543.671.811,-
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	Rp 388.591.493,-
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85	Rp 266.050.189,-
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	83	83	258.181.007,-
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	72	Rp 152.546.875,-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	86	Rp 202.546.875,-
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	73	Rp 254.596.775,-
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	88,5	Rp 305.093.750,-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50	50	50	50	Rp 102.049.900,-
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7	50,7	50,7	50,7	Rp 116.733.200,-
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	Rp 50.000.000,-
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15	15	15	15	Rp 29.000.000,-
		5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	Rp 291.833.000,-
		6. Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	3,51	-
5	Meningkatnya efektivitas	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	72	72	86,62	86,62	Rp 457.640.625,-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0	0	0	16	Rp 590.000.000,-
		3. Jumlah desa pangan aman	0	0	0	5	Rp 850.000.000,-
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0	0	0	2	Rp 170.000.000,-
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	82	82	82	Rp 618.861.000,-
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	75	75	75	Rp 455.911.500,-
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	30	45	63	Rp 333.965.000,-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	88	Rp 989.913.000,-
		2. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	81	Rp 163.854.000,-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	75	Rp 12.384.570.000,-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	84	Rp 4.931.674.000,-
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	0	0	0	1,51	Rp 291.807.000,-
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	1. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	50	65	80	93	Rp 2.149.134.000,-
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Rp 68.806.000,-

Tabel 2.2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

<50%	50%≤x<70%	70%≤x<90%	90%≤x<110%	110%≤x<120%	x>120%
Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	Tidak dapat disimpulkan

Gambar 2.3. Kriteria penilaian capaian kinerja

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang terlalu rendah
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran kegiatan digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \frac{\{(bobot x \% \text{ capaian})1 + (bobot x \% \text{ capaian})n\}}{n}$$

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data BBPOM di Palangka Raya yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Palangka Raya menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Palangka Raya
3. Penanggungjawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan unuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAS, SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performance
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran inipun diintegrasikan dengan aplikasi

e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan di mana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward and punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



BAB. III

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi Anggaran

BALAI BESAR POM
di Palangka Raya

@bbpompalangkaraya | palangkaraya.pom.go.id

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya dilakukan dengan cara membandingkan realisasi IKU tahun 2020 terhadap target (rencana) yang telah ditetapkan pada masing-masing perspektif, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019, membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target nasional dan UPT BPOM lain yang setara, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang, dan efisiensi penggunaan sumber daya serta rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi BBPOM di Palangka Raya tahun 2020 sebesar **103,36%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

- a. *Stakeholder perspective*, capaian kinerja **100,0%**
- b. *Internal process perspective*, capaian kinerja **112,08%**
- c. *Learning and growth perspective*, capaian kinerja **98,0%**

Untuk menjaga kesesuaian nilai NPS dengan e-performance, maka indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya lebih dari 120% dihitung menjadi 120%. Dari 11 sasaran kegiatan tahun 2020, terdapat **3** sasaran kegiatan dengan kriteria "**sangat baik**", **7** sasaran kegiatan dengan kriteria "**baik**", dan **1** sasaran kegiatan dengan kriteria "**cukup**" dengan rincian capaian masing-masing sasaran kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Capaian (NPS)	Kriteria	Rerata (%)
<i>Stakeholder perspective</i>				100
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	109,96	Baik	100,0
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	94,57	Baik	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	95,48	Baik	
<i>Internal process perspective</i>				112,08
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja	107,15	Baik	112,08

No	Sasaran Kegiatan	Capaian (NPS)	Kriteria	Rerata (%)
BBPOM di Palangka Raya				
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	101,55	Baik	98,0
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	119,60	Sangat Baik	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	120,00	Sangat Baik	
<i>Learning and growth perspective</i>				98,0
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	90,85	Baik	98,0
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	110,00	Sangat Baik	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	89,49	Cukup	
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	101,64	Baik	

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 4 UPT BPOM lain dengan beban kerja yang setara yaitu BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, BPOM di Palu, dan BPOM di Jambi maka diperoleh sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Tabel perbandingan pencapaian sasaran kegiatan BBPOM di Palangka Raya dengan UPT BPOM lain yang setara

No	Sasaran Kegiatan	BBPOM di Palangka Raya	BBPOM di Mataram	BBPOM di Manado	BPOM di Palu	BPOM di Jambi
Nilai Kinerja Organisasi		103,36	106,20	106,66	104,72	105,07
<i>Stakeholder perspective</i>						
Nilai capaian perspektif		100,00	104,04	107,85	103,41	105,48
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	109,96	102,30	106,12	102,87	111,47
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	94,57	105,59	108,64	106,73	103,21
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	95,48	104,22	108,79	100,62	101,76

No	Sasaran Kegiatan	BBPOM di Palangka Raya	BBPOM di Mataram	BBPOM di Manado	BPOM di Palu	BPOM di Jambi
<i>Internal process perspective</i>						
	Nilai capaian perspektif	112,08	109,16	106,90	107,98	110,49
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	107,15	110,28	102,20	106,46	102
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT BPOM	101,55	101,13	103,33	101,37	100
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT BPOM	119,60	105,21	102,08	109,13	119,96
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT BPOM	120	120	120	114,96	120
<i>Learning and growth perspective</i>						
	Nilai capaian perspektif	98,0	105,40	105,22	102,76	99,23
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT BPOM yang optimal	90,85	97,17	95,09	92,67	90,00
9	Terwujudnya SDM UPT BPOM yang berkinerja optimal	110,00	111,47	112,87	109,70	113,43
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	89,49	108,56	109,86	104,63	89,49
11	Terkelolanya keuangan UPT BPOM secara akuntabel	101,64	104,41	103,06	104,03	103,98

Keterangan :

- capaian tertinggi
- capaian indikator kinerjanya diatas 120%

Secara umum, capaian kinerja organisasi BBPOM di Palangka Raya dan 4 UPT BPOM lain yang berada dalam satu *cluster* relatif setara berada dalam kriteria baik. Pada perspektif *stakeholder* capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya dan 4 UPT BPOM lain masuk dalam kriteria baik. Pada perspektif *internal proses*, capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja 4 UPT BPOM lain dalam 1 *cluster*, hal ini disebabkan oleh capaian 2 indikator pendukungnya lebih dari 160%, yaitu indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 165,32%, dan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi

ketentuan sebesar 275,36%. Capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 275,36% disebabkan oleh perubahan kriteria penilaian penetapan MK/TMK sarana produksi yang diperiksa dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum efektif dilaksanakan secara konsisten. Pada perspektif *learning and growth*, capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya dan 4 UPT BPOM lain masuk kriteria baik, namun capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya berada di bawah capaian kinerja 4 UPT BPOM lain dalam 1 *cluster*, hal ini disebabkan oleh capaian beberapa indikator pendukung sasaran kegiatan dalam perspektif *learning and growth* relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan 4 UPT BPOM lain yaitu indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BBPOM di Palangka Raya sebesar 86,58% dan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Palangka Raya sebesar 84,29%. Hal ini disebabkan oleh monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum efektif dilaksanakan secara konsisten dan belum terinternalisasinya budaya organisasi PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama tim, Inovatif dan Responsif/cepat tanggap) secara optimal kepada seluruh pegawai serta integritas jabatan yang masih rendah sehingga kesadaran pegawai dalam mendukung capaian kinerja belum optimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan sasaran pada *stakeholder perspective* dan *internal proses perspective* telah tercapai secara optimal, namun tujuan sasaran pada *learning and growth perspective* pada BBPOM di Palangka Raya belum tercapai optimal.

Secara keseluruhan nilai kinerja organisasi BBPOM di Palangka Raya dan 4 UPT BPOM lain dalam 1 *cluster* masuk kriteria baik, dimana nilai kinerja BBPOM di Manado tertinggi 106,66 dan nilai kinerja organisasi BBPOM di Palangka Raya terendah 103,36 diantara 4 UPT BPOM lain dalam 1 *cluster*. Untuk pencapaian kinerja yang lebih baik selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara konsisten dan menyusun langkah-langkah strategis mengawal pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja yang belum optimal serta internalisasi budaya organisasi PIKKIR secara optimal ke seluruh individu pendukung organisasi untuk mendukung capaian kinerja yang lebih baik di tahun mendatang.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah diperjanjikan 11 sasaran kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
<i>Stakeholder perspective</i>						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	94,36	116,78	Sangat Baik
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	91,86	117,77	Sangat Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	91,67	107,84	Baik
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	80,88	97,45	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	68,09	94,57	Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,60	101,86	Baik
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73	61	83,56	Cukup
		8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	88,5	89,40	101,02	Baik
<i>Internal process perspective</i>						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	50	82,66	165,32	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
	pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	produksi dan distribusi yang dilaksanakan				
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7	52,24	103,43	Baik
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	99,77	110,86	Sangat Baik
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15	41,30	275,33	Tidak Dapat Disimpulkan
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	53,24	88,73	Cukup
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	3,51	3,52	100,28	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	15. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86,62	91,99	106,20	Baik
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100	Baik
		17. Jumlah desa pangan aman	5	5	100	Baik
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	99,39	121,21	Tidak Dapat Disimpulkan
		20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	89,40	119,20	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan	63	128,57	204,08	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	di bidang Obat dan Makanan				
<i>Learning and growth perspective</i>						
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	88	76,19	86,58	Cukup
		23. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	81	77,05	95,12	Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	24. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	75	82,50	110,00	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	70,80	84,29	Cukup
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	1,51	1,43	94,70	Baik
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	27. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	93	91,16	98,02	Baik
		28. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya	Efisien (95%)	Efisien (100%)	105,26	Baik

Dari 28 indikator (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **5 indikator** dengan kriteria “**sangat baik**”, **15 indikator** dengan kriteria “**baik**”, **4 indikator** dengan kriteria “**cukup**”, dan **4 indikator** mempunyai capaian lebih dari 120% dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Kalimantan Tengah tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara 4 (empat) indikator yang memiliki nilai kategori cukup perlu penguatan dan pengawalan secara serius agar tahun mendatang memiliki capaian yang lebih baik, dan 4 (empat) indikator yang memiliki nilai kategori tidak dapat disimpulkan perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap target yang ditetapkan pada tahun mendatang sampai dengan akhir periode Rencana Strategis 2020-2024.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palangka Raya, sebagai berikut :

1 Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	94,36	116,79	Sangat Baik

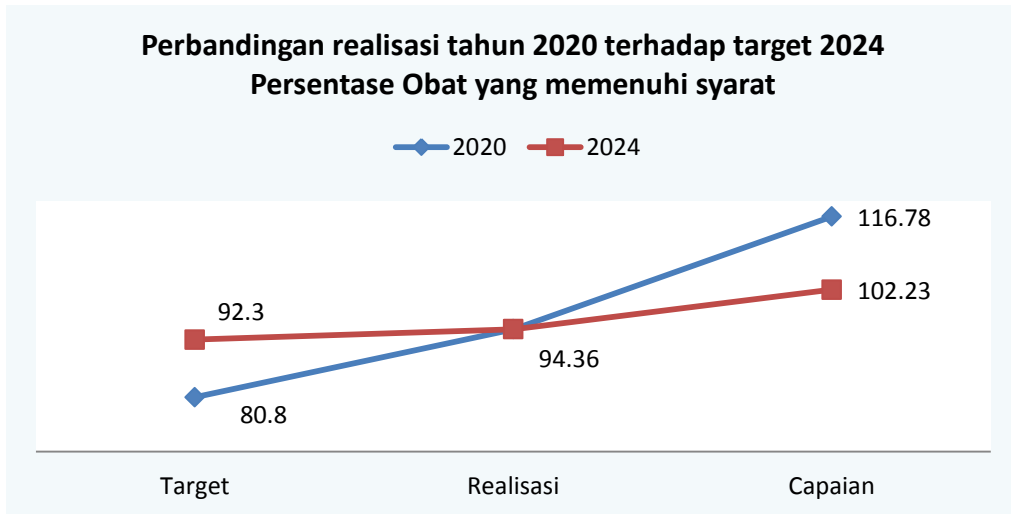
Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus =

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{jumlah sampel obat acak MS}}{\text{total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi syarat meliputi : 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

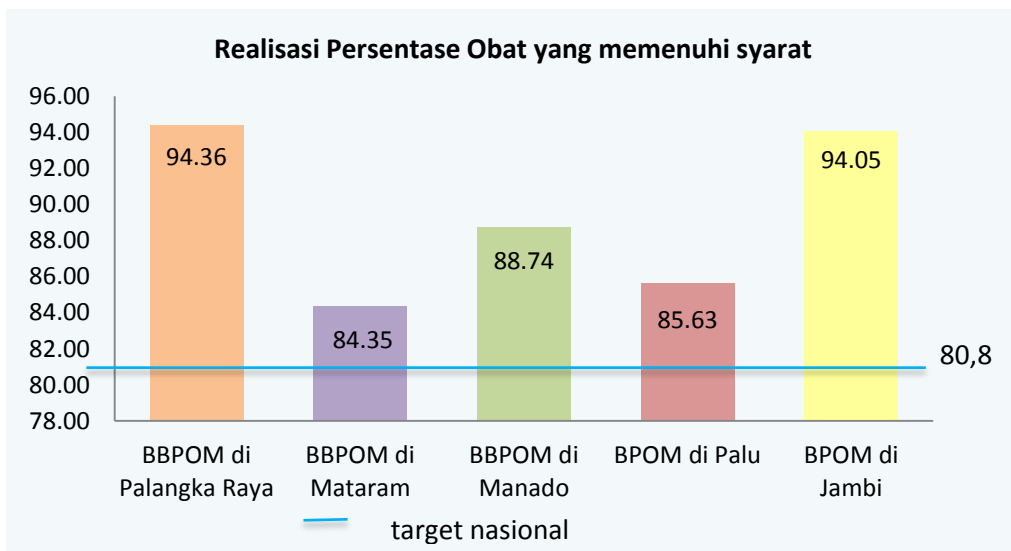
Pada tahun 2020, realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil pemeriksaan 958 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya bersama Loka POM di Kotawaringin Barat, dengan hasil 904 sampel MS (memenuhi syarat) dan 54 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Lima puluh empat sampel TMS tersebut didapatkan dari 4 sampel TMS uji laboratorium, 49 sampel TMK penandaan dan 1 sampel TMK penandaan dan TMS uji laboratorium. Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2020 telah mencapai target yaitu **116,79%** dengan kriteria "**sangat baik**".

a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 92,3%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 102,23% dengan kriteria baik, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap dipertahankan dalam kriteria sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Presentase Obat yang memenuhi syarat di BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado,

BPOM di Palu dan BPOM Jambi sudah melebihi target nasional (80,8%). BBPOM di Palangka Raya memiliki realisasi tertinggi dibandingkan 4 UPT BPOM lain yang setara.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

BBPOM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target tahun 2020 dengan kriteria sangat baik, dengan capaian 116,79%. Pelaksanaan sampling obat oleh BBPOM di Palangka Raya dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi covid-19 yang masih belum berakhir.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara *online*. Sampel kosmetik dan obat tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) menghadapi kendala karena keterbatasan variasi jenis produk dan jumlah sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan batch yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah kecil.

Jumlah total sampel obat acak pada tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 958 sampel, 904 sampel memenuhi syarat dan sampel yang tidak memenuhi syarat sejumlah 54 sampel yang terdiri dari 23 sampel BBPOM di Palangka Raya dan 31 sampel Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Lima puluh empat sampel yang tidak memenuhi syarat terdiri dari 14 sampel obat, 28 sampel obat tradisional, 3 sampel suplemen kesehatan dan 9 sampel kosmetik dengan rincian tidak memenuhi syaratnya berupa 4 sampel tidak memenuhi syarat uji laboratorium, 49 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan dan 1 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan sekaligus tidak memenuhi syarat uji laboratorium. Dapat dilihat bahwa tidak memenuhi ketentuan penandaan memiliki jumlah yang paling besar, sehingga diperlukan edukasi pemahaman terhadap sarana produksi terkait dengan penandaan sampel Obat sesuai dengan ketentuan.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase obat yang memenuhi syarat antara lain :

- Pelaksanaan sampling sampel acak obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sejumlah 958 sampel. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pelaksanaan sampling terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Pada tahun 2020 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 447 sarana.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi Persentase obat yang memenuhi syarat antara lain :

- Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait tata cara distribusi yang baik.
- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Publik Warning* Obat yang diterbitkan oleh BPOM.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi serta publikasi iklan layanan masyarakat.
- Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan.
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE).
- Meningkatkan kompetensi petugas.
- Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pandemi covid-19

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	91,86	117,77	Sangat Baik

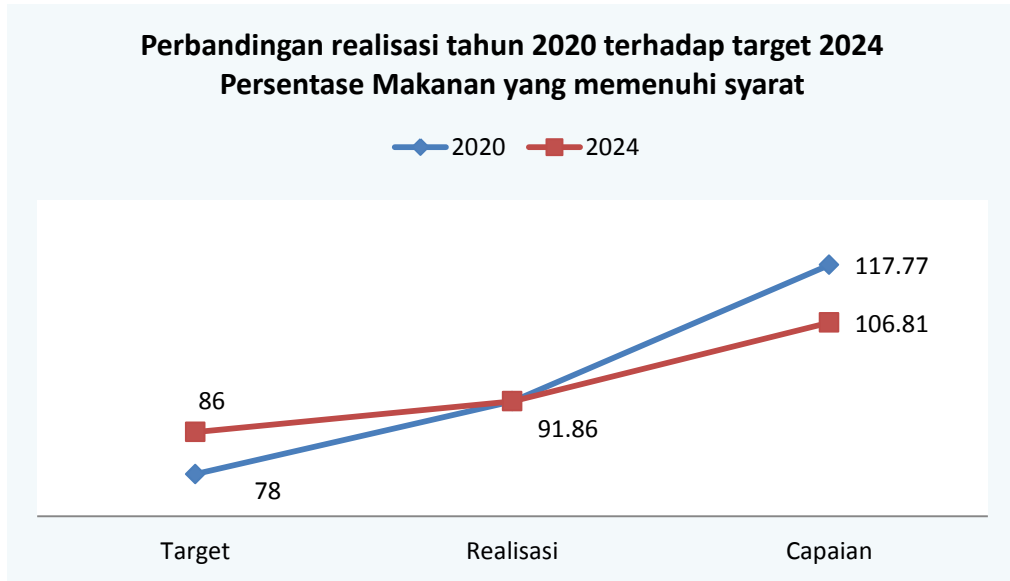
Perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus =

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{jumlah sampel makanan acak MS}}{\text{total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk beredar; berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat meliputi : 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

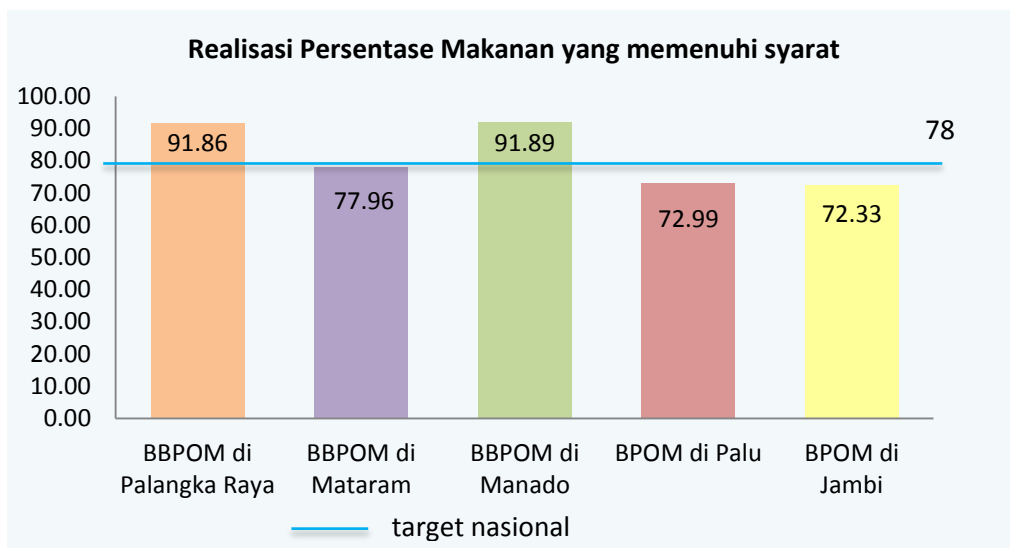
Pada tahun 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 430 sampel acak Makanan dengan hasil pemeriksaan 395 sampel memenuhi syarat (MS) dan 35 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) dengan rincian 15 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan, 14 sampel tidak memenuhi syarat pengujian, dan 6 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat pengujian. Dari data tersebut diperoleh Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu **117,77%** dengan kriteria "**sangat baik**".

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 86%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 106,81% dengan kriteria baik, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap dipertahankan dalam kriteria sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Presentase Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Palangka Raya dan BBPOM di Manado sudah melebihi

target nasional (78%), sedangkan realisasi BBOM di Mataram, BBPOM di Palu dan BBPOM di Jambi belum mencapai target nasional. BBPOM di Manado memiliki realisasi tertinggi dibandingkan 4 UPT BPOM lain yang setara.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 117,77% dengan kriteria sangat baik. Jumlah total sampel pangan acak pada tahun 2020 setelah mengalami penurunan anggaran adalah 430 sampel, 395 sampel memenuhi syarat dan sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 35 sampel.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut bisa disebabkan oleh :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kalimantan Tengah baik dengan nomor ijin edar MD, dan PIRT.
- Meningkatnya pemahaman terkait ketentuan label pangan yang beredar.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat antara lain :

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan khususnya UMKM IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) terkait pemenuhan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik).
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- Pelaksanaan sampling sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sejumlah 430 sampel. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pelaksanaan sampling terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi makanan.
- Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Pada tahun 2020 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 447 sarana.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi Persentase makanan yang memenuhi syarat antara lain :

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Meningkatkan pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi tentang peraturan terkait Obat dan Makanan, *Publik Warning System* Obat dan Makanan yang diterbitkan oleh BPOM kepada masyarakat luas melalui media sosial, media masa melalui *talkshow* bekerjasama dengan radio dan televisi serta kerjasama dengan stakeholder antara lain instansi terkait, organisasi masyarakat dan organisasi profesi dalam pelaksanaan KIE melalui daring.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi serta publikasi iklan layanan masyarakat.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasar hasil pengawasan	85	91,67	107,84	Baik

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus =

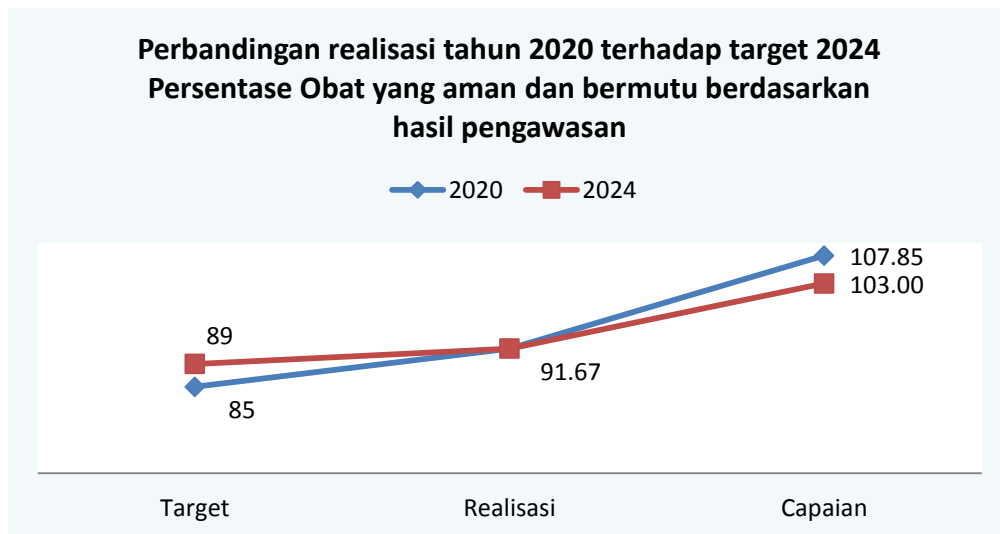
$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{jumlah sampel obat targeted MS}}{\text{total sampel obat targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan

kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi syarat meliputi : 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

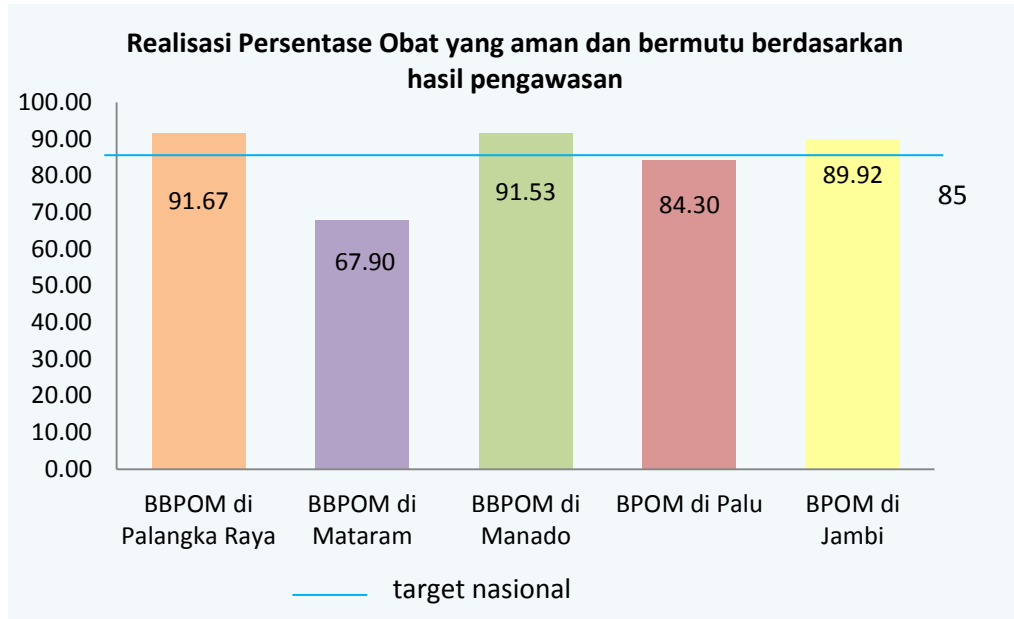
Pada tahun 2020, realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan 264 sampel targeted obat yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya bersama Loka POM di Kotawaringin Barat, dengan hasil 242 sampel MS (memenuhi syarat) dan 22 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Dua puluh dua sampel TMS tersebut didapatkan dari 15 sampel TMK penandaan dan 7 sampel TMS uji laboratorium. Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 telah mencapai target yaitu **107,84%** dengan kriteria “baik”.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 89%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 103% dengan kriteria baik, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja menjadi kriteria sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Manado dan BPOM di Jambi sudah melebihi target nasional (85%), sedangkan realisasi BBOM di Mataram dan BBPOM di Palu belum mencapai target nasional. BBPOM di Palangka Raya memiliki realisasi tertinggi dibandingkan 4 UPT BPOM lain yang setara.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan (107,84%) dengan kriteria baik. Hal ini menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun mutu produk yang dihasilkan semakin baik. Begitu pula para pelaku sarana distribusi telah melakukan pengelolaan yang baik terutama dari segi penyimpanan sehingga sampel yang rusak maupun kedaluarsa semakin berkurang.

Jumlah total sampel obat targeted pada tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 264 sampel, 242 sampel memenuhi syarat dan sampel yang tidak memenuhi syarat sejumlah 22 sampel yang terdiri dari 13 sampel BBPOM di Palangka Raya dan 9 sampel Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dua puluh dua sampel yang tidak memenuhi syarat terdiri dari 3 sampel obat, 13 sampel obat tradisional, dan 6 sampel kosmetik dengan rincian tidak memenuhi

syaratnya berupa 7 sampel tidak memenuhi syarat uji laboratorium dan 13 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan. Dapat dilihat bahwa tidak memenuhi ketentuan penandaan memiliki jumlah yang paling besar, sehingga diperlukan edukasi pemahaman terhadap sarana produksi terkait dengan penandaan sampel Obat sesuai dengan ketentuan.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain :

- Pelaksanaan sampling sampel targeted obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sejumlah 264 sampel. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pelaksanaan sampling terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Pada tahun 2020 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 447 sarana

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain :

- Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait tata cara distribusi yang baik.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya *Publik Warning* Obat yang diterbitkan oleh BPOM.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi serta publikasi iklan layanan masyarakat.

- Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan.
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE).
- Meningkatkan kompetensi petugas.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasar hasil pengawasan	83	80,88	97,45	Baik

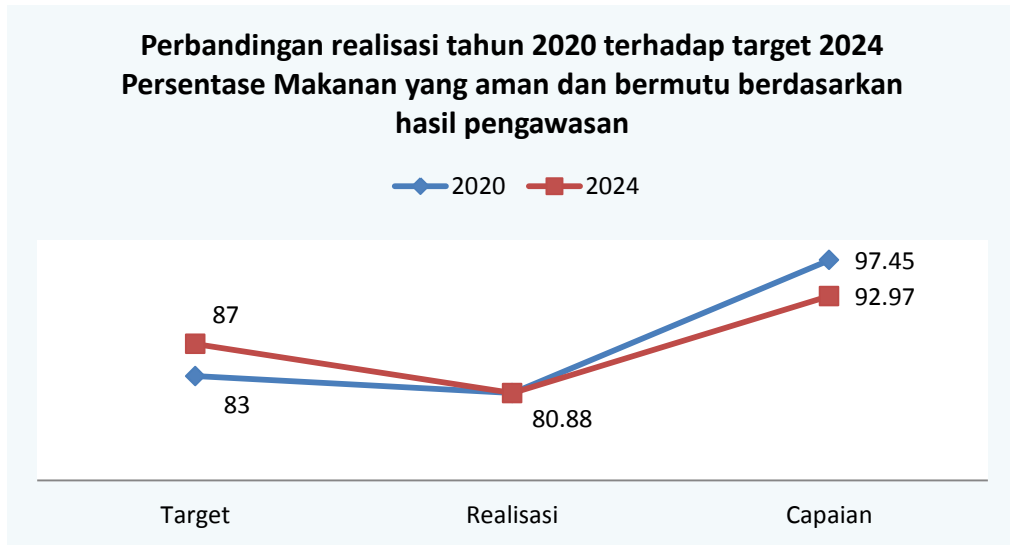
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus =

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{jumlah sampel makanan targeted MS}}{\text{total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Makanan yang aman dan bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

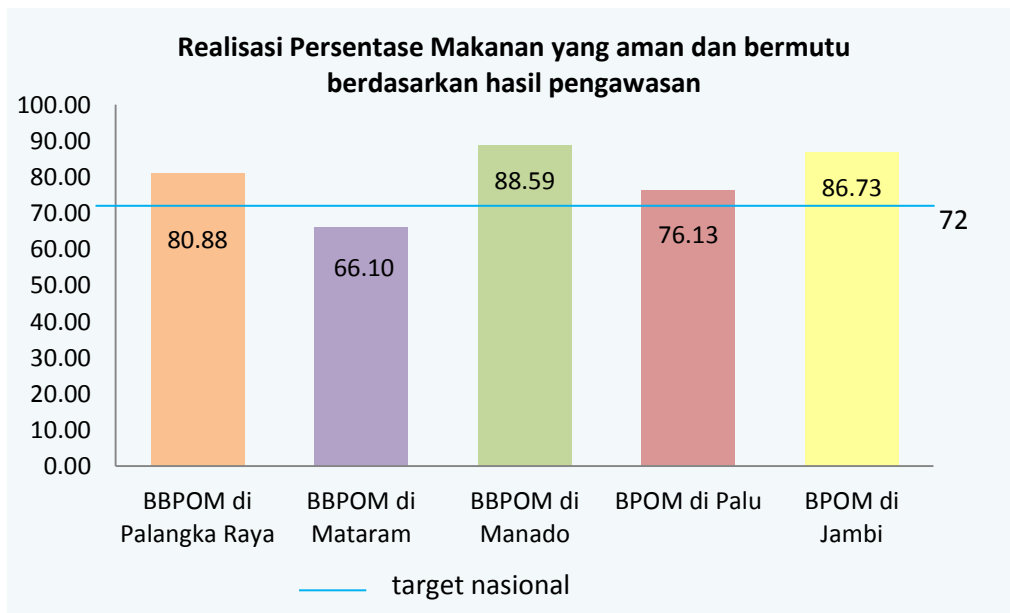
Pada tahun 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 136 sampel *targeted* Makanan dengan hasil pemeriksaan 110 sampel memenuhi syarat (MS) dan 26 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) yang kesemuanya tidak memenuhi syarat pengujian. Dari data tersebut diperoleh Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu **97,45%** dengan kriteria "**baik**".

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 87%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 92,97% dengan kriteria baik, namun mendekati ambang kriteria capaian cukup sehingga perlu disusun langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 tetap masuk kriteria baik atau menjadi sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di BBPOM di Manado, BPOM di Jambi, BBPOM di Palangka Raya, dan BPOM di Palu sudah melebihi target nasional (72%), sedangkan realisasi BBBOM di Mataram belum mencapai target nasional. BBPOM di Manado memiliki realisasi tertinggi dibandingkan 4 UPT BPOM lain yang setara.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,45% dengan kriteria baik namun telah berhasil mencapai target nasional yaitu 72% hal tersebut disebabkan oleh target yang ditetapkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan target nasional. Jumlah total sampel pangan targeted pada tahun 2020 setelah mengalami penurunan anggaran adalah 136 sampel, 110 sampel memenuhi syarat dan sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 26 sampel.

Hasil pengujian sampel makanan TMS tersebut berasal dari sampel AMIU (Air Minum Isi Ulang) sebanyak 13 sampel dengan TMS hasil pengujian yaitu parameter pH atau skala tingkat keasaman yang mana didapatkan hasil uji pH yang lebih asam dari pada yang dipersyaratkan. Selain itu ditemukan hasil TMS pada sampel Garam Beryodium sebanyak 6 sampel dengan TMS hasil pengujian parameter penetapan kadar air (2 sampel) dan parameter penetapan kadar KIO_3 (4 sampel), 1 sampel PJAS dengan hasil TMS parameter uji identifikasi borak, 6 sampel UMKM dengan hasil uji TMS parameter uji penetapan kadar sulfit (1 sampel), penetapan kadar benzoat (2 sampel) dan penetapan kadar siklamat (3 sampel).

Hal yang mempengaruhi pencapaian indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik terutama pemahaman terkait batasan penggunaan Bahan Tambahan Pangan serta penambahan fortifikasi pada pangan fortifikan khusus nya Garam beryodium. Masih terdapat sarana distribusi yang belum memenuhi persyaratan pedoman Cara Retail pangan yang Baik khusus nya sarana yang terdapat pada pasar-pasar tradisional. Kegiatan sampling PJAS selama masa pandemi Covid-19 dimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring menyebabkan berkurangnya produsen PJAS yang ditemui di lingkungan sekolah.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain :

- Pembinaan terhadap sarana distribusi makanan agar memenuhi pedoman Cara Retail Pangan yang Baik khususnya pasar tradisional dan dapat mengikuti Lomba Pasar Tingkat Nasional
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB
- Pelaksanaan kegiatan PJAS dilakukan sesuai dengan Juknis yang telah disusun

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain :

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan khususnya pelaku usaha di bidang AMIU (Air Minum Isi Ulang) terkait pemenuhan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik).
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain :

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.
- Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.

2

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan & mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	72	68,09	94,57	Baik

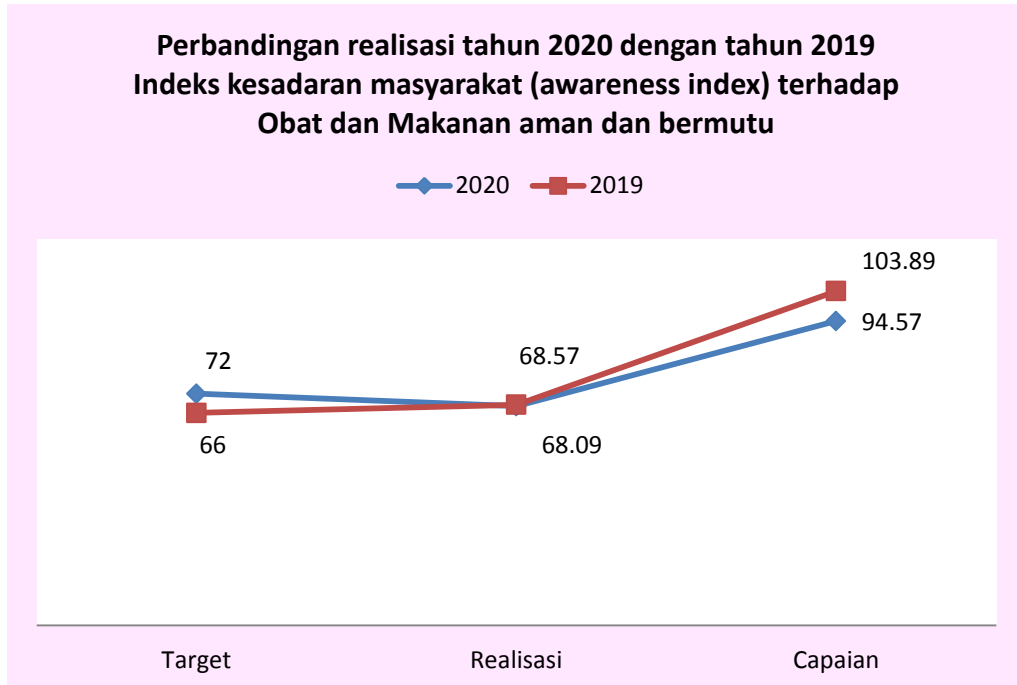
Design metodologi yang digunakan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *margin of error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasar Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tanggal yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik *interview*/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner yang telah diinstal pada *smartphone enumerator*.

Indikator berbentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kedaluarsa.

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2020 adalah 68,09. Capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan

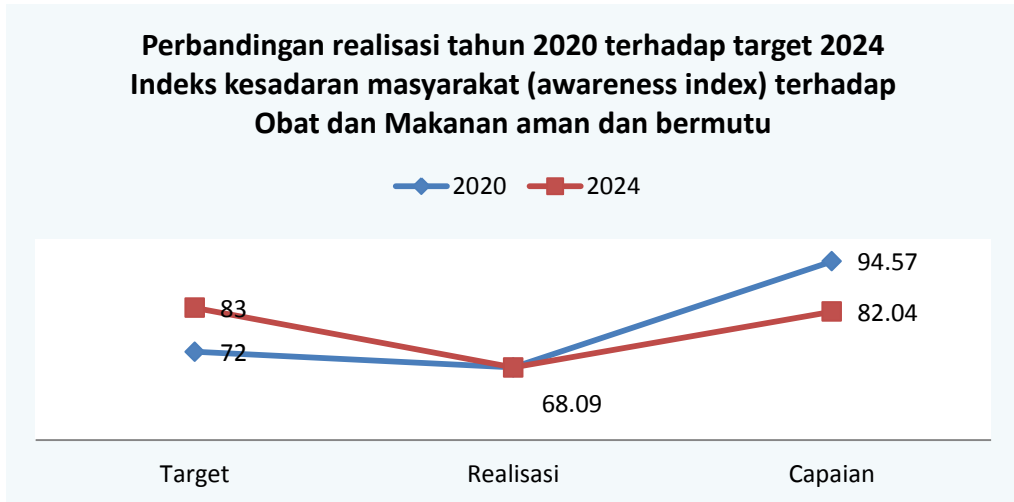
Makanan aman dan bermutu tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu **94,57%** dengan kriteria “baik”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019



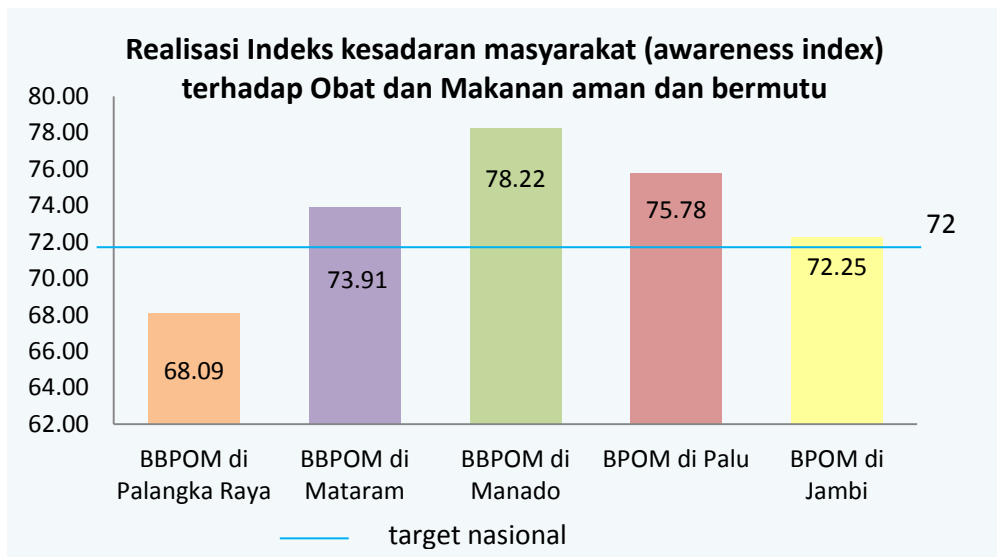
Indikator indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan salah satu indikator keberhasilan sasaran kegiatan 2. Capaian indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2019 dari 103,89% menjadi 94,57%. Hal ini merupakan salah satu dampak pandemi covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang seharusnya dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu dengan metode tatap muka dengan cakupan wilayah dan sasaran masyarakat yang lebih beragam kurang maksimal dilaksanakan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Capaian indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis tahun 2024 dari 72 menjadi 83 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tahun 2024, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 82,04% dengan kriteria cukup, sehingga perlu disusun langkah-langkah strategis baik dari segi metoda, pemilihan topik/tema yang akan disampaikan, sasaran/target yang ingin dicapai serta waktu pelaksanaan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 tetap masuk kriteria baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman yang aman dan bermutu tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya berada di bawah skala nasional dibandingkan dengan 4 (empat) UPT BPOM lain yang setara. Hal ini harus menjadi evaluasi dan perbandingan bagi BBPOM di Palangka Raya untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi guna menyusun strategi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tahun 2020 tepatnya sejak bulan Maret 2020 dengan merebaknya pandemi covid 19 merupakan tahun penuh tantangan bagi pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan terutama kegiatan yang bersifat komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) kepada masyarakat. Kegiatan KIE yang biasanya dilakukan secara tatap muka secara langsung untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu harus dilakukan dengan cara lain.

Dari survei yang pernah dilakukan oleh BPOM menunjukkan bahwa penyuluhan secara langsung kepada masyarakat memberikan dampak yang paling besar terhadap kesadaran masyarakat. Dengan adanya pandemi covid-19 BBPOM di Palangka Raya harus merubah strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media sosial menjadi pilihan yang paling dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung diubah menjadi layanan melalui telepon dan whatsapp, email, google, dll. Berdasarkan hasil survei dari 340 (tiga ratus empat puluh) responden yang diambil secara acak di wilayah Kalimantan Tengah, BBPOM di Palangka Raya mendapatkan indeks pengetahuan 70,57, indeks sikap 69,29 dan indeks perilaku 64,42 terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Umumnya masyarakat Kalimantan Tengah telah mengetahui tentang obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan, akan tetapi pengetahuan lebih detail terkait obat makanan seperti izin edar ataupun logo obat/jenis obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter masih kurang. Namun demikian, sekitar 90% responden menunjukkan sikap yang positif terhadap Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dari pendapat mereka yang menganggap penting kondisi kemasan produk, mengetahui efek samping produk, membaca petunjuk penggunaan,

mengetahui petunjuk penyimpanan, produk harus terdaftar di BPOM, dan mengetahui tanggal kedaluwarsa produk, serta mengimplementasikannya dalam keseharian.

Dari hasil survei yang diselenggarakan Pusat Riset Kajian Obat dan Makanan (PRKOM), BBPOM di Palangka Raya memperoleh nilai indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dengan kategori cukup (67,86). Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM di Palangka Raya dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu baik dari segi pengetahuan, sikap maupun perilaku.

Metode dan strategi yang dipilih serta waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat Kalimantan Tengah yang sebagian besar tinggal di pedesaan dengan keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi.

Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Hal inilah yang menjadi kendala terbesar pada saat pandemi covid-19, bagi BBPOM di Palangka Raya untuk tetap melaksanakan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat sadar akan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Selama tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya telah memberikan layanan sejumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) layanan baik secara langsung maupun melalui WhatsApp, telepon dan *google review* serta 3 (tiga) layanan pengaduan yang telah ditindaklanjuti. Sepanjang tahun 2020 Balai Besar POM di Palangka Raya telah menayangkan 1042 (seribu empat puluh dua) konten melalui 3 media sosial tersebut. BBPOM di Palangka Raya memanfaatkan semua komunitas yang dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dikaitkan dengan kondisi pandemi covid-19.

Selama tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya telah menyebarkan infografis, leaflet/brosur maupun spanduk melalui berbagai komunitas misalnya kader keamanan pangan desa di beberapa kabupaten yang telah diintervensi melalui program Desa Pangan Aman maupun petugas pengelola pasar yang telah diintervensi melalui program Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya. Semua komunitas tersebut merupakan *agent of change* BBPOM di Palangka Raya yang telah dibentuk dan mempunyai ikatan yang erat dengan BBPOM di Palangka Raya. Infografis yang

disebarluaskan oleh BBPOM di Palangka Raya menjadi viral untuk menjadi counter informasi yang efektif menangkal informasi yang menyesatkan (*hoax*) yang beredar di masyarakat. Semua upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya ini dilakukan baik disisi produsen maupun dari sisi konsumen. Produsen dan konsumen merupakan bagian dari pilar pengawasan dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Masyarakat yang telah meningkat kesadarannya akan mampu memilih Obat dan Makanan yang aman bagi diri sendiri dan keluarganya. Peningkatan pemberdayaan masyarakat ini akan memaksa produsen untuk memproduksi Obat dan Makanan yang aman bermutu (*Community Empowerment will induce Voluntary Compliance*).

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2020, BBPOM di Palangka Raya memperoleh nilai 68,09 dimana nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 72, walaupun realisasi capaian 94,57% dengan kategori “Baik”. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BBPOM di Palangka Raya untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan antara lain:

- Pandemi covid-19 yang melanda dunia sejak Maret 2020 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam strategi dan metoda yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja. Metoda yang seharusnya dilakukan secara tatap muka harus dibatasi dengan memperhatikan protokol kesehatan dan penetapan PSBB di beberapa daerah di propinsi Kalimantan Tengah.
- Luas wilayah Kalimantan Tengah yang cukup luas merupakan salah satu kendala dalam menjangkau seluruh pelosok agar kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dapat meningkat.
- Perubahan metoda KIE terkait obat dan makanan selama masa Pandemi Covid-19 dari luring menjadi daring juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi karena tidak seluruh wilayah di propinsi Kalimantan Tengah memiliki kemudahan dalam

akses internet sehingga target peserta KIE hanya dapat dilakukan di daerah yang memiliki akses internet.

Akan tetapi, BBPOM di Palangka Raya tetap berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu dengan melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain

- Melaksanakan KIE secara daring melalui Webinar dan Webtalkshow terkait Tips Memilih Kosmetika yang aman dan Pangan Aman
- Layanan Pengaduan dan Informasi secara langsung di BBPOM di Palangka Raya maupun melalui Hotline Infokom “0811-555-633” serta melalui media sosial Facebook, Instagram dan Twiter
- Melaksanakan program KIE melalui Operasional Mobil Keliling kepada komunitas pasar (pelaku usaha dan pembeli) maupun masyarakat sekitar di beberapa wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya
- Pengawasan terhadap desa dan pasar yang telah diintervensi oleh BBPOM di Palangka Raya dengan memberdayakan kader-kader yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat sekitarnya terkait obat dan makanan.
- Melaksanakan KIE melalui media cetak dan elektronik (iklan radio dan televisi, talkshow di radio dan televisi) maupun sebagai narasumber di beberapa kegiatan lintas sektor

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Dari hasil survei kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu ini menunjukkan kinerja BBPOM di Palangka Raya masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. BBPOM di Palangka Raya harus menentukan metoda dan strategi dalam memilih dan menetapkan komoditi mana yang masih harus sering dikomunikasikan kepada masyarakat dengan pilihan target dan waktu penyampaian yang tepat. Pilihan topik dan sub topik harus cukup menarik dan sesuai dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat luas sehingga masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi yang reliable dan valid sehingga dapat menangkal informasi yang tidak benar (*HOAX*). Bagaimana memahami label pangan, bagaimana memilih kosmetik yang aman, bagaimana mengkonsumsi obat tradisional yang aman dan berkhasiat.

3

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan

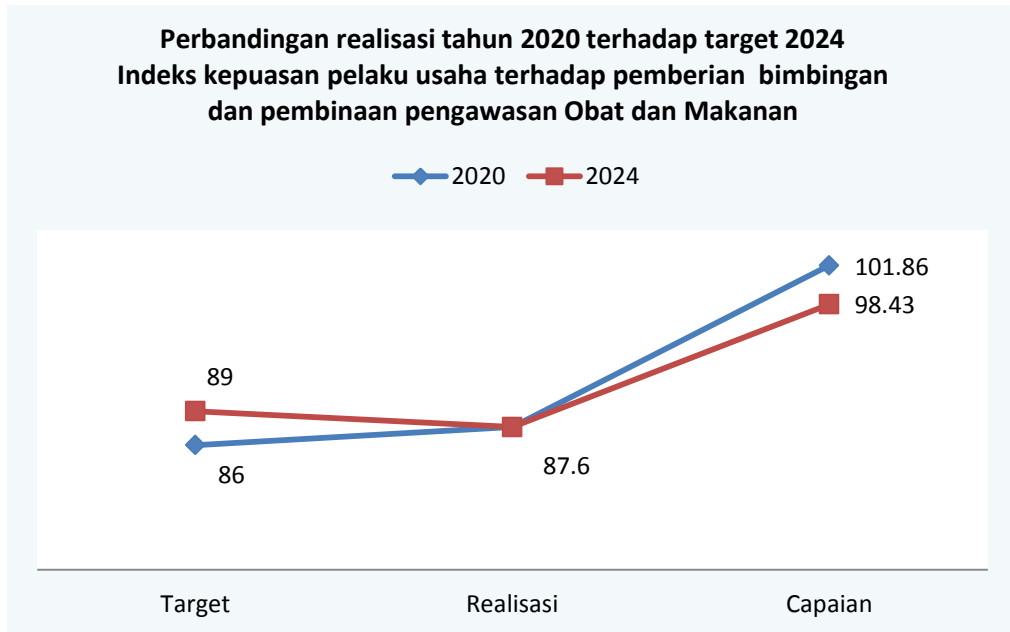
a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan	86	87,60	101,86	Baik

Pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie dan Morgan dengan margin of error sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

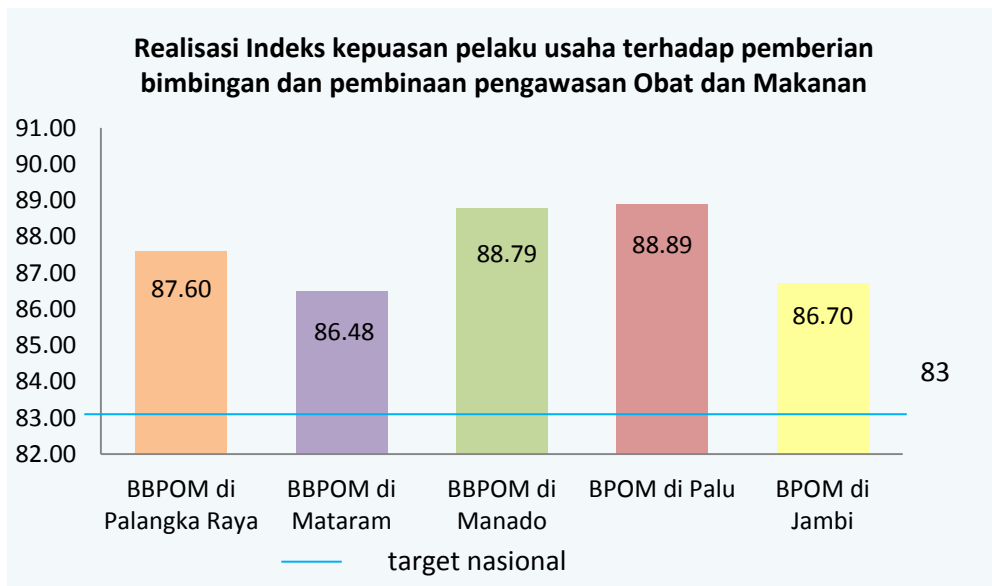
Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu **101,86%** dengan kriteria "**baik**". Namun demikian, dapat diketahui bahwa Pelaku usaha yang dilakukan survei berfokus pada lingkup pelaku usaha/produsen dalam rangka membantu pemenuhan penerapan persyaratan ijin edar BPOM.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 89. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 98,43% dengan kriteria baik, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja menjadi kriteria sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya, dan 4 UPT BPOM lainnya yang setara (BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, BPOM di Palu dan BPOM di Jambi) diatas target nasional yaitu 83.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian target indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan target 86, realisasi yang di dapat 87.60 dengan capaian realisasi sebesar 101,73% dengan kriteria baik.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BBPOM di Palangka Raya. Bimbingan dan pembinaan berfokus pada pemberian bimbingan teknis (fasilitasi/pendampingan) dan supervisi yang mencakup sosialisasi/ bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, Pelaku usaha Obat dan Makanan yang dimaksud mencakup produsen/pelaku usaha dalam rangka fasilitasi/pendampingan pemenuhan penerapan CPPOB/CPOTB/CDOB/CPKB dalam rangka mendapatkan ijin edar Badan POM. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah : 1) Aspek bimbingan dan pembinaan; 2) Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; 3) Aspek penanganan saran dan masukan; 4) Aspek manfaat; 5) Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; serta 6) Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Jumlah kegiatan yang dilakukan BBPOM di Palangka Raya dalam mendapatkan survei adalah 4 (empat) dengan Total Jumlah responden 19 (sembilan belas) meliputi; kegiatan sendiri 16 (enam belas) responden dan kegiatan bersama 3 (tiga) responden. Kurangnya total jumlah responden yang hanya 19 (sembilan belas) yang seharusnya adalah 30 (tiga puluh) responden, hal ini disebabkan aspek jenis kegiatan yang masih terbatas hanya pada pelaku usaha yang mengikuti bimtek registrasi pangan olahan serta desk dan fasilitasi/ pendampingan UMKM dalam rangka mendapatkan ijin edar saja, belum mencakup dalam pelaku usaha distributor obat dan makanan serta pelayanan (RS, Puskesmas, Apotek, dll).

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain :

- BBPOM di Palangka Raya dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap pelaku usaha dengan melakukan bimbingan berupa pendampingan/fasilitasi terhadap UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan registrasi produk UMKM.
- Upaya pelayanan prima yg di berikan berupa jemput bola dengan melakukan fasilitasi dan pendampingan secara intens baik secara langsung dengan datang ke kantor maupun melalui telepon atau whatsapp terhadap pelaku usaha/UMKM produk pangan olahan, obat tradisional maupun kosmetik yang ingin mengembangkan produknya memiliki ijin edar BPOM.
- Selain itu pendampingan/ fasilitasi yang dilakukan berupa bimtek mandiri bagi pelaku usaha dengan menggunakan aplikasi UMKM HARATI untuk UMKM produk pangan, dimana dilakukan pembelajaran secara online sehingga pelaku usaha umkm dapat meningkatkan pengetahuan tentang penerapan CPPOB.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya adalah:

- 1) Memperluas cakupan aspek kegiatan dalam mendapatkan jumlah responden yang sesuai
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya Pelaku usaha melalui pembinaan serta fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dengan *stakeholder* terkait dalam hal pembinaan terhadap pelaku usaha baik dalam produksi maupun distribusi produk obat dan makanan

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73	61	83,56	Cukup

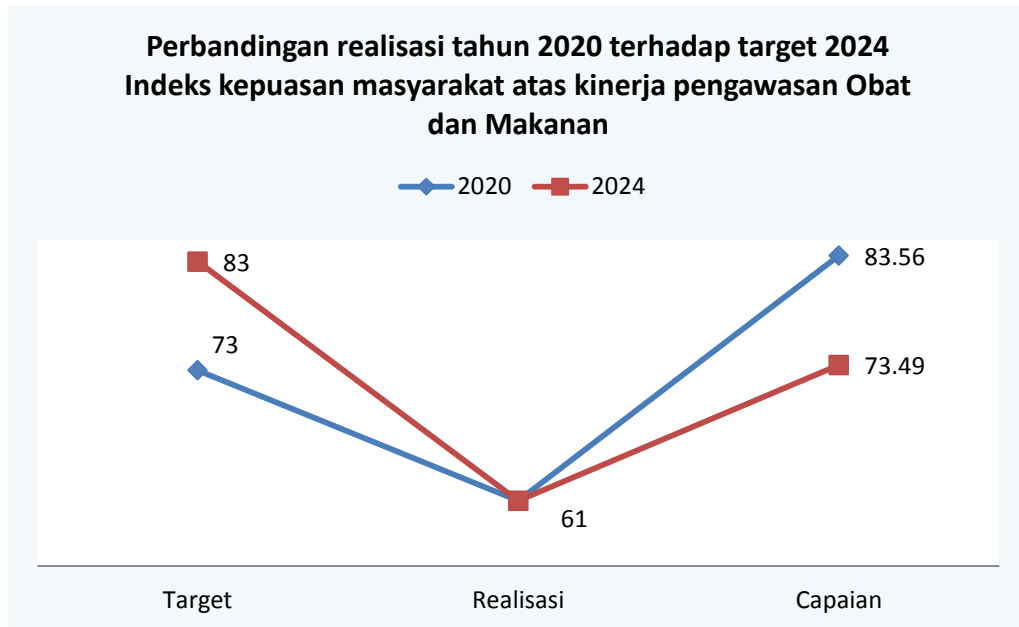
Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan diperoleh melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur kelima indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Hasil survei pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palangka Raya tahun 2020 yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) adalah 61 dari target yang ditetapkan 73. Survei dilakukan terhadap 5 komoditi yang diawasi BPOM yaitu obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Hasil survei per komoditi secara nasional adalah : ♣ Obat : 75,12 (Baik) ♣ Obat Tradisional : 70,50 (Cukup Baik) ♣ Suplemen Kesehatan : 71,13 (Cukup Baik) ♣ Kosmetik : 71,06 (Cukup Baik) ♣ Pangan Olahan : 73,81 (Cukup Baik) Capaian realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja

BBPOM di Palangka Raya tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu **83,56 %** dengan kriteria “cukup”.

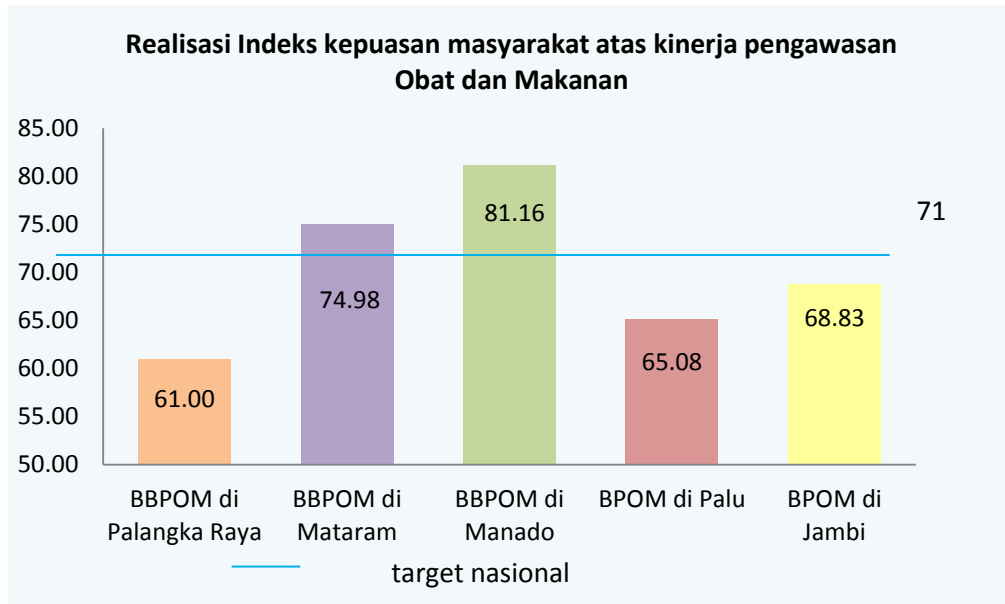
b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis tahun 2024 dari 73 menjadi 83 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tahun 2024, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 73,49% dengan kriteria cukup, sehingga perlu disusun langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 tetap masuk kriteria baik.

Hal ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi BBPOM di Palangka Raya untuk mencapai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan 5 (lima) tahun kedepan. BBPOM di Palangka Raya harus mampu menyusun strategi dan metoda yang tepat dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat secara langsung melalui fasilitas website dan media sosial BPOM di Palangka Raya (*tangibles*) maupun secara tidak langsung sehingga masyarakat merasa puas terhadap kinerja BPOM di Palangka Raya dalam pengawasan (*reability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya, dan 2 UPT BPOM lain yang setara yaitu BPOM di Palu dan BPOM di Jambi belum berhasil mencapai target nasional yaitu 71, sedangkan BBPOM di Manado dan BBPOM di Mataram telah berhasil mencapai target nasional. BBPOM di Manado memiliki realisasi tertinggi sedangkan BBPOM di Palangka Raya memiliki realisasi terendah diantara UPT BPOM lain yang setara.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab belum berhasilnya capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan disebabkan oleh belum tersosialisasinya kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga masyarakat luas belum mengetahui kinerja BBPOM di Palangka Raya dalam pengawasan Obat dan Makanan, strategi publikasi yang belum tepat sasaran yang dapat menjangkau masyarakat luas, serta materi publikasi belum menggambarkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Jika kita melihat capaian pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pelayanan publik, pengawasan Obat dan Makanan beredar melalui pemeriksaan dan pengujian sampel

serta penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan meningkat dilihat capaiannya pada tahun 2020. Capaian kinerja tersebut ternyata belum dirasakan dan diketahui oleh masyarakat luas, BBPOM di Palangka Raya belum menyebarkan secara luas informasi atas kinerja yang telah dilaksanakan.

Meski belum berhasil mencapai indikator ini, namun dalam pengawasan Obat dan Makanan beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator tersebut meningkat antara lain :

- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya
- Pengawasan pre-market serta bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan
- Pengawasan post-market melalui kegiatan inspeksi terhadap sarana produksi, pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan
- Penyebaran informasi melalui media sosial

Beberapa alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2021, antara lain :

- Membuat materi publikasi yang lebih beragam menggambarkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang mencakup tugas dan pokok yang dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya
- Mengembangkan metode publikasi penyebaran informasi yang informatif, dapat diakses oleh masyarakat luas dengan pertimbangan efisiensi anggaran seperti video tron, sms blast, pemasangan baliho/billboard di tempat-tempat strategis, iklan radio di beberapa daerah di wilayah Kalimantan Tengah selain mengoptimalkan media publikasi yang telah berjalan seperti media sosial.
- Mengoptimalkan jaringan yang telah dibangun melalui berbagai komunitas komunitas misalnya kader keamanan pangan desa di beberapa kabupaten yang telah diintervensi oleh BBPOM di Palangka Raya melalui program Desa Pangan Aman, petugas pengelola pasar yang telah diintervensi melalui program Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya. Semua komunitas tersebut merupakan BBPOM di Palangka Raya yang telah dibentuk dan mempunyai ikatan yang erat dengan BBPOM di Palangka Raya serta membangun kerjasama dengan Pramuka.
- Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya
- Meningkatkan pengawasan pre-market serta bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan

- Meningkatkan pengawasan post-market melalui kegiatan inspeksi terhadap sarana produk pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan
- Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan KIE, pelayanan publik dan publikasi di berbagai media
- Mengembangkan kegiatan KIE dan publikasi sesuai dengan karakteristik spesifik loka untuk lebih dekat dengan masyarakat

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator pencapaian kinerja namun masih belum berhasil menjadi pengungkit pencapaian kinerja, yaitu :

- Layanan informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran Obat dan Makanan melalui tatap muka, whatsapp, telepon, email, media sosial, dan aplikasi UMKM Harati namun media layanan tersebut belum terpublikasi optimal tepat sasaran dapat dikenal oleh masyarakat luas
- Pendampingan/ fasilitasi yang dilakukan berupa bimtek mandiri bagi pelaku usaha dengan menggunakan aplikasi umkm harati untuk umkm produk pangan, dimana dilakukan pembelajaran secara online sehingga pelaku usaha umkm dapat meningkatkan pengetahuan tentang penerapan CPPOB
- Pengawasan distribusi vaksin covid-19
- Pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Tengah
- Inspeksi terhadap sarana produksi, pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan
- Pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan
- KIE secara daring dan luring serta melalui infografis tentang Obat dan Makanan
- Publikasi kegiatan dan kinerja pengawasan Obat dan Makanan masih belum optimal serta strategi publikasi yang belum tepat dengan waktu yang tepat

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan maka hal-hal yang akan menjadi prioritas dalam rangka perbaikan Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah :

- Membuat materi publikasi dan penyebaran informasi yang lebih variatif, baik dari segi komoditi, kegiatan-kegiatan pendukung pengawasan Obat dan Makanan, layanan yang diberikan oleh BBPOM di Palangka Raya termasuk layanan

pengaduan, hotline yang dapat dihubungi melalui berbagai macam media publikasi

- Mengembangkan berbagai media publikasi dengan pertimbangan media tersebut mudah diakses oleh seluruh masyarakat luas di berbagai daerah di wilayah Kalimantan Tengah dengan mempertimbangkan anggaran yang digunakan efisien namun memberi daya ungkit besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepuasan masyarakat atas peran BBPOM di Palangka Raya dalam pengawasan Obat dan Makanan seperti video tron, sms blast, baliho/spanduk, iklan radio yang dipublikasikan di beberapa daerah tidak hanya seputar Palangka Raya maupun Pangkalan Bun.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, KIE, penyebaran informasi dan publikasi untuk menyusun langkah strategi yang lebih relevan mendukung capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Tengah.

3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palangka Raya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

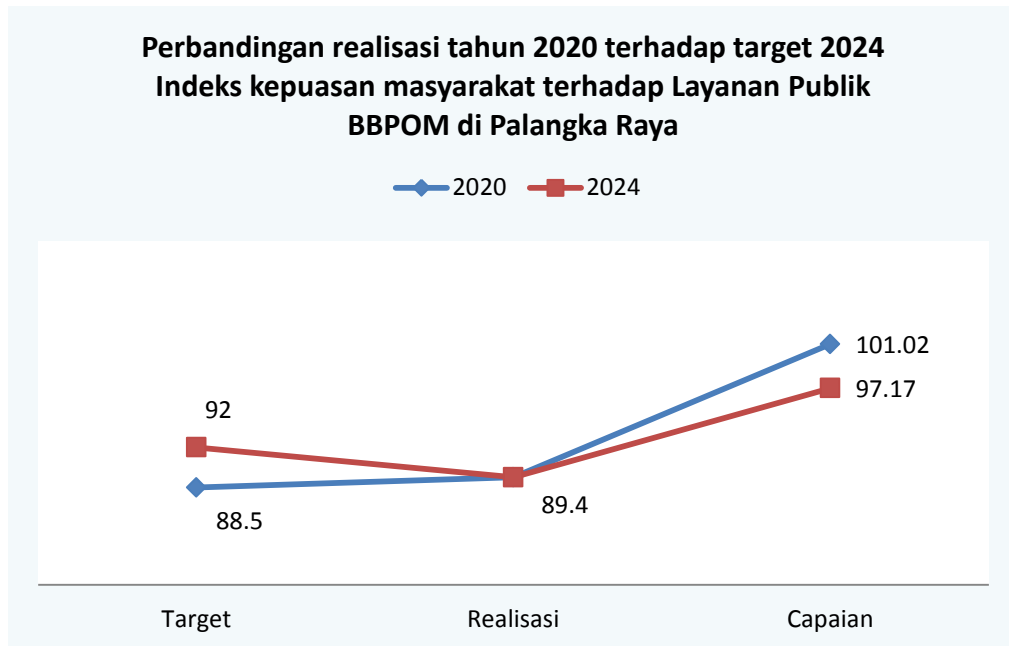
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BBOPM di Palangka Raya	88,5	89,40	101,02	Baik

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi Simolekdesi dengan nilai SKM unit sebesar 89,40 dengan target 88,5. Capaian Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu **101,02%** dengan kriteria **“baik”**.

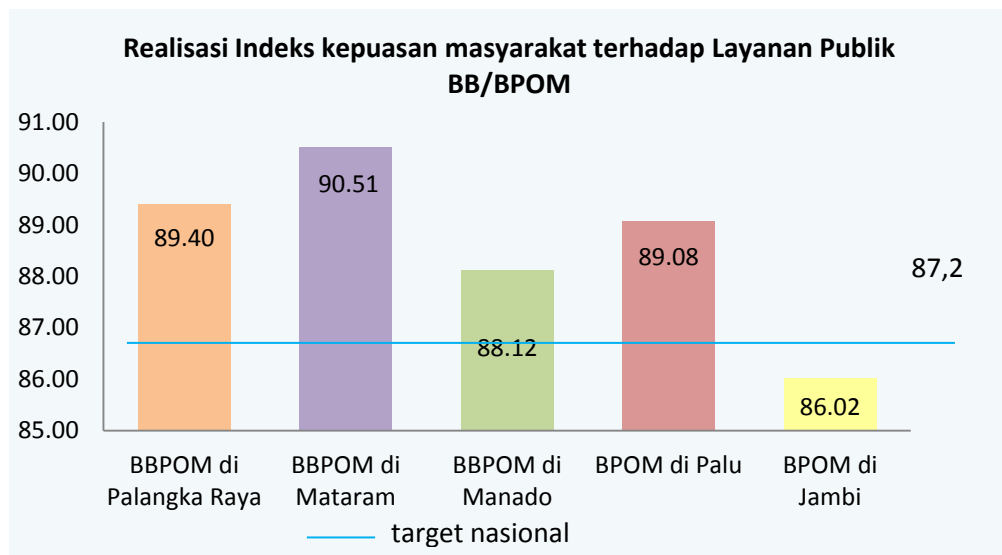
b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dari 88,5 menjadi 92 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tahun 2024, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 97,17% dengan kriteria baik, meskipun demikian perlu disusun untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 masuk kriteria sangat baik. Hal ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi BBPOM di Palangka Raya untuk mencapai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya 5 (lima) tahun kedepan. BBPOM di Palangka Raya harus mampu menyusun strategi dan metoda yang tepat dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hal ini juga merupakan implementasi pelaksanaan *Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015* di lingkungan BPOM.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya tahun 2020 sudah berada di atas target nasional dan memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan 3 (tiga) UPT BPOM lain yang setara, realisasi tertinggi oleh BBPOM di Mataram dan realisasi terendah oleh BPOM di Jambi. Hal ini harus menjadi evaluasi dan perbandingan bagi BBPOM di Palangka Raya untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi guna menyusun strategi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta meningkatkan unsur-unsur yang ada untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini menjadi kendala dan tantangan tersendiri bagi BBPOM di Palangka Raya dalam rangka memberikan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Aktivitas konsultasi/layanan informasi secara tatap muka masih belum bisa dilaksanakan dan dialihkan secara online melalui telepon, email, aplikasi *whatsapp*, *google review*, Instagram, dan lain-lain. Hal ini disambut baik oleh

masyarakat karena dimasa pandemi seperti ini kebutuhan akan layanan informasi terkait Obat dan Makanan masih dapat dipenuhi oleh BBPOM di Palangka Raya, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya dilakukan terhadap 2 (dua) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan yaitu Pengujian sebanyak 10 orang dan Layanan Informasi dan Pengaduan sebanyak 26 orang. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BBPOM di Palangka Raya terhadap penyelenggaraan layanan publik adalah sebesar 89,40 terhadap target yang ditetapkan yaitu 88,50. Berdasarkan hasil survei tersebut layanan publik di BBPOM di Palangka Raya mendapat katagori B (Baik). Namun jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 2019, walaupun secara keseluruhan mengalami kenaikan akan tetapi ada 2 (dua) unsur pelayanan yang mengalami penurunan, yaitu unsur Penanganan pengaduan, masukan dan saran serta Sarana dan prasarana. Hal ini disebabkan karena selama masa pandemi covid-19 tidak dapat dilaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang memerlukan pemeriksaan ke sarana sehingga tindak lanjut yang dilakukan dianggap belum tuntas atau memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk penyelesaian. Selain itu masih terdapat beberapa sarana dan prasarana pendukung yang masih belum tersedia dalam rangka memberikan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat di BBPOM Palangka Raya.

Aktivitas konsultasi/layanan informasi secara tatap muka masih belum bisa dilaksanakan dan dialihkan secara *online* melalui telepon, email, aplikasi whatsapp, twitter, Instagram, dan lain-lain. Hal ini disambut baik oleh masyarakat karena di masa pandemi seperti ini kebutuhan akan layanan informasi terkait Obat dan Makanan masih dapat dipenuhi oleh BBPOM di Palangka Raya, ditunjukkan dengan adanya hasil perolehan SKM unit sebesar 89,40 dari total 36 responden yang terdiri dari 26 responden layanan informasi dan 10 responden layanan pengujian sampel pihak ketiga.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi Simolekdesi dengan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit sebesar 89,40 dengan target 88,5 dan capaian Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,02% dengan kriteria "**baik**", menunjukkan bahwa masyarakat puas terhadap layanan publik

yang telah diberikan. Upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya ini antara lain:

- Meningkatkan layanan informasi dan pengaduan secara langsung/tatap muka di BBPOM di Palangka Raya maupun melalui Hotline Infokom “0811-555-633” serta melalui media sosial Facebook, Instagram dan Twiter.
- Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi dan pengaduan BBPOM di Palangka Raya dengan melaksanakan pelatihan Publik Speaking bagi petugas dan Study Banding ke Unit Kerja yang memiliki pelayanan prima kepada konsumen.

Walaupun telah mencapai target yang telah ditetapkan BBPOM di Palangka Raya tetap berusaha untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Dalam hal ini, masih ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Keterbatasan anggaran dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang layanan publik sehingga pemenuhan tidak dapat secara maksimal.
- Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan KIE baik secara langsung maupun secara *online*

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat tahun 2020, BBPOM di Palangka Raya harus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Dari survei tersebut indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 2,44 meskipun terdapat 2 unsur yang mengalami penurunan yang cukup bermakna yaitu: 1) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 2) Sarana dan Prasarana. Kondisi pandemi sangat mempengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan oleh BBPOM di Palangka Raya. Beberapa layanan tetap diberikan dengan berbagai penyesuaian dan inovasi. konsultasi dan pemberian layanan secara intensif dilakukan melalui media sosial dan media lainnya.

4

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50	82,66	165,32	Tidak dapat disimpulkan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus =

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain = (jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPTlain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

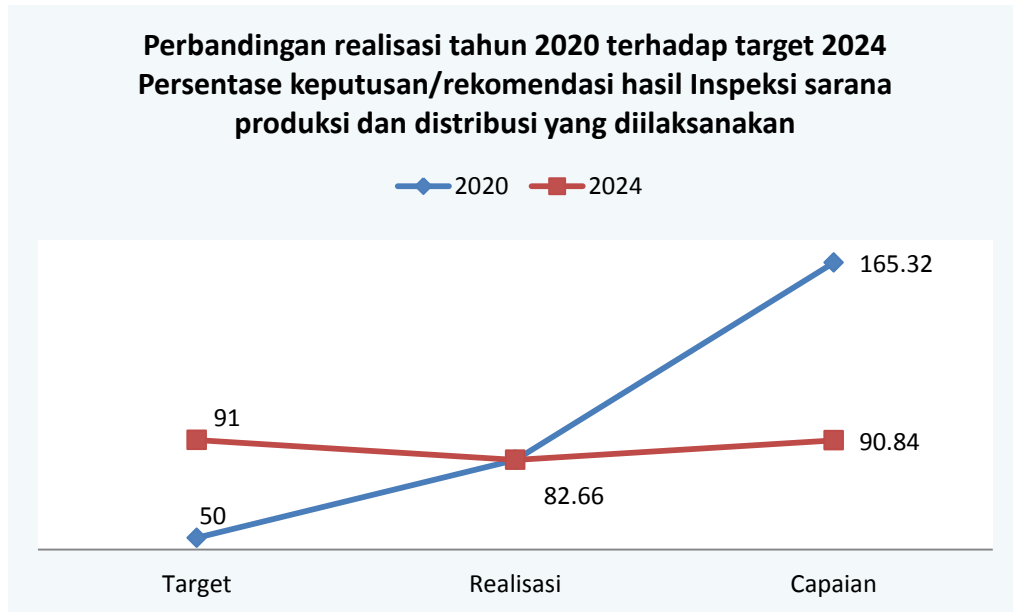
- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat; dan
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2020, BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 61 keputusan/ rekomendasi dari 61 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan yaitu **165,32%** dengan kriteria **“tidak dapat disimpulkan”**.

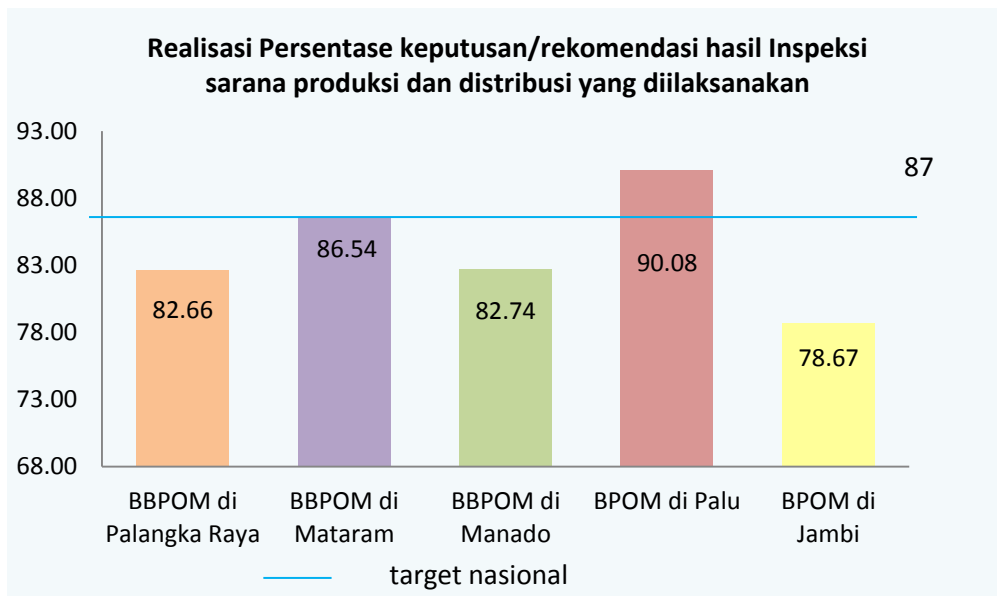
Tahun 2020 tepat sejak bulan Maret 2020 dengan merebaknya pandemi covid-19 terjadi pembatasan aktivitas, dan hal ini berdampak pada kegiatan inspeksi pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Pada pembatasan aktivitas ini terjadi pemberlakuan *Work From Home* (WFH) bagi pegawai, sehingga aktivitas kinerja pegawai dalam kegiatan pengawasan fokus pada menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan secara lebih intensif.

a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target yang ditetapkan pada tahun 2024 berdasarkan perubahan target pada penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, indikator sasaran kegiatan ini ditetapkan sebesar 91%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 90,84% dengan kriteria baik tipis, untuk itu perlu dilakukan pengkajian kembali target yang akan ditetapkan untuk tahun 2022-2024 serta perlu disusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja tahun 2024 menjadi kriteria sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Realisasi kinerja tahun 2020 pada persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan apabila dibandingkan dengan target nasional, capaian BBPOM di Palangka Raya berada di bawah target nasional. Pada indikator ini BPOM di Palu mencapai realisasi tertinggi di atas rata-rata nasional.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2020, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh hasil 50%. Persentase/rekomendasi dari hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh hasil yang paling rendah dibandingkan dengan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT diperoleh sebesar 100%, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 80,64%, dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%. Walaupun kriteria pada indikator ini adalah "tidak dapat disimpulkan", namun capaian pada indikator ini melebihi target karena meningkatnya jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang dilakukan.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan disebabkan intensitas pemeriksaan sarana secara onsite meningkat dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut surat rekomendasi yang dikeluarkan BBPOM Palangka Raya berupa surat perintah pemeriksaan sarana dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya. Demikian juga surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat yang berupa perintah pemeriksaan

setempat ke sarana terkait temuan produk illegal, produk palsu maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya maupun Loka POM Kotawaringin Barat. Surat rekomendasi dari pemangku kepentingan yang berupa permintaan narasumber, permintaan dari pelaku usaha sebagai saksi pemusnahan juga dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Meskipun capaian pada indikator ini melebihi target, namun hal yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I dan Kedeputian II) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7	52,24	103,04	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus =

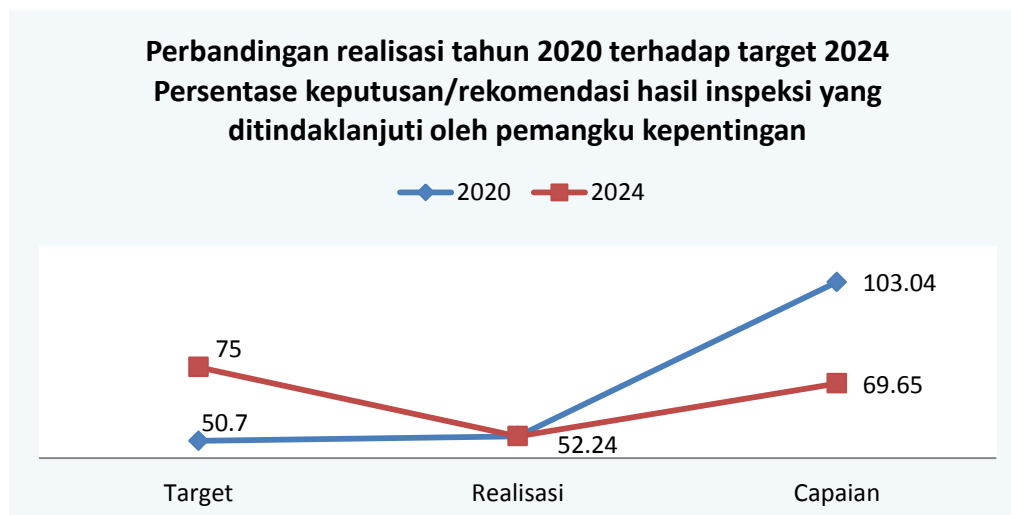
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = $(\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = $(\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

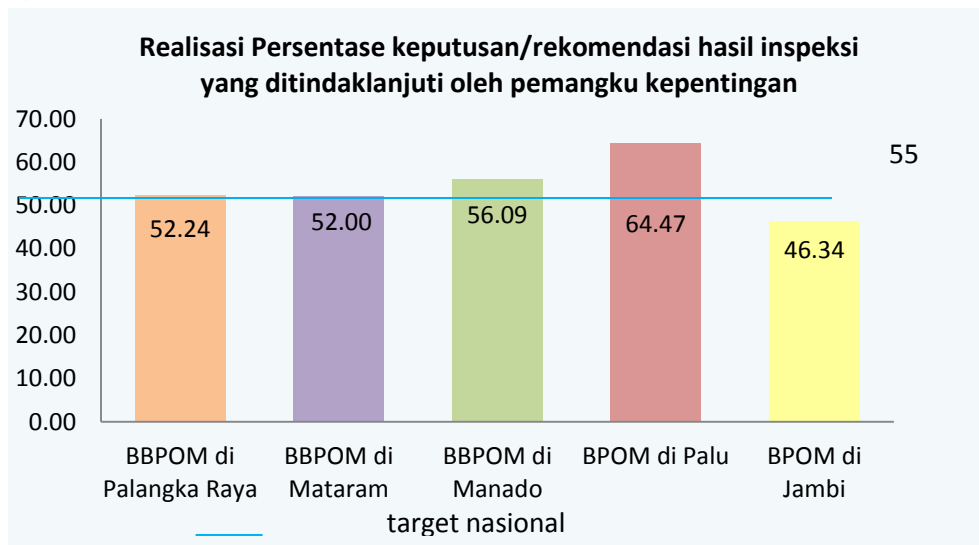
Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberikan kepada sarana produksi, distribusi, sarana pelayanan farmasi baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang telah ditentukan. *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Pada tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT BPOM kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 225 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 124 sarana/pelaku usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/*feedback*. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian **103,04%** dengan kriteria “**baik**”.

- b. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024**



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran sasaran kegiatan ini adalah sebesar 75%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini adalah sebesar 69,65% dengan kriteria kurang, untuk itu perlu dilakukan penyusunan langkah-langkah strategis kegiatan yang diperlukan sebagai penguangkit peningkatan capaian kinerja di tahun 2024 menjadi kriteria baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Pada tahun 2020, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM di Palangka Raya berada di bawah rata-rata nasional bersama dengan BBPOM di Mataram dan BPOM di Jambi. Apabila dilakukan perbandingan antar UPT BPOM lain yang setara, BPOM di Palu mencapai realisasi tertinggi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2020, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha sebesar 55,11%, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor sebesar 47,56%. Dengan demikian, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/lintas sektor mencapai target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor

disebabkan adanya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/*feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan disebabkan adanya komunikasi dan edukasi oleh petugas kepada pelaku usaha untuk memberikan tindak lanjut/*feedback* hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan sarana.

Kendala dari pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas BBPOM di Palangka Raya.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain :

- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan
- Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui kegiatan Penguatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dan stake holder dalam memenuhi peraturan perundang-undangan. Pola tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh BPOM mendorong pelaku usaha/stake holders untuk secara aktif dan persuasive melakukan tindakan perbaikan melalui pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan evaluasi tahun 2020, untuk meningkatkan target persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/lintas sektor, maka

BBPOM di Palangka Raya perlu melakukan komunikasi baik secara formal maupun informal secara intensif kepada penanggung jawab sarana maupun kepada narahubung pada lintas sektor terkait untuk melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	99,77	110,86	Sangat Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus =

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \left(\frac{\text{jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Jenis layanan sertifikasi BBPOM di Palangka Raya terdiri dari :

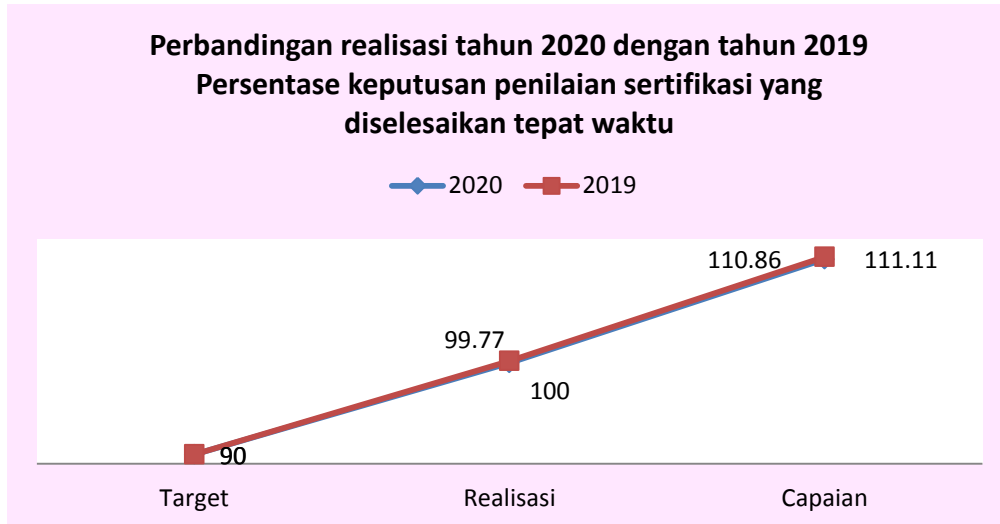
- 1) Rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 2) Rekomendasi pemenuhan aspek CDOB/CPOTB/CPKB dalam rangka Izin edar produk
- 3) Sertifikasi pengujian sampel pihak ketiga merupakan layanan sertifikasi sepanjang tahun 2020.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 110,86% dengan kriteria “**sangat baik**”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 99,77% pengajuan sertifikasi pada BBPOM di Palangka Raya telah berhasil diselesaikan tepat waktu.

Pada tahun 2020 terdapat sejumlah permohonan rekomendasi/sertifikasi dan telah menerbitkan 3 jenis rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu rekomendasi CPPOB dan rekomendasi CPOTB, dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sebanyak 7 (tujuh) meliputi 6 (enam) rekomendasi CPPOB dan 1 (satu) Rekomendasi CPOTB serta penerbitan SKE produk CPO minyak sawit.

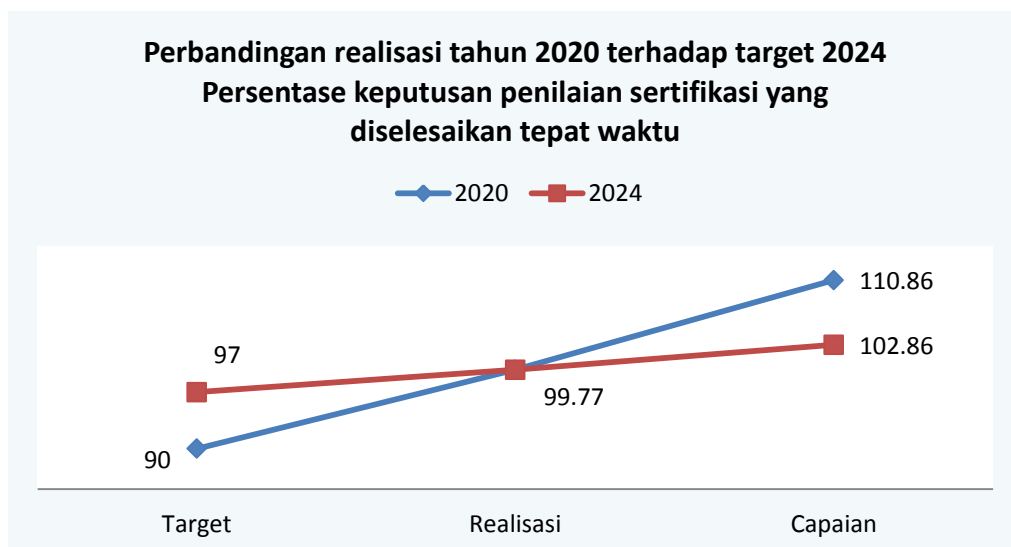
Pada tahun 2020 Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga sejumlah 864 sertifikat yang diselesaikan tepat waktu.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019



Pada tahun 2020 realisasi persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil di tahun 2019 dari 100 % menjadi 99,77%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 tepatnya sejak bulan Maret 2020 dengan merebaknya Pandemi Covid 19 sehingga untuk proses pelaksanaan sertifikasi sedikit terhambat perlu usaha yang lebih intens.

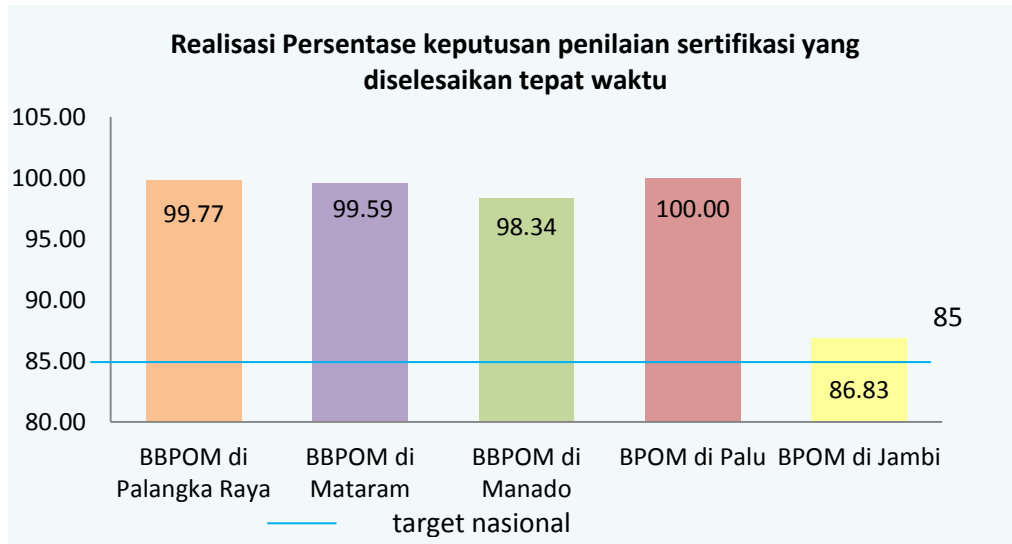
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 97%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target

tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 102,86% dengan kriteria baik, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap dipertahankan dalam kriteria sangat baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Palangka Raya, BBOM di Mataram, BBPOM di Manado, BPOM di Palu dan BPOM di Jambi sudah melebihi target nasional (85%), dengan realisasi tertinggi BPOM di Palu dibandingkan 4 UPT BPOM lain yang setara.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target dengan kriteria sangat baik, walaupun pada tahun 2020 tepatnya sejak bulan Maret 2020 dengan merebaknya pandemi covid-19 sehingga untuk proses pelaksanaan sertifikasi sendiri perlu usaha yang lebih intens dalam melakukan fasilitasi/pendampingan terhadap pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar produk serta demikian pula dengan pengujian sampel pihak ketiga. Meskipun demikian BBPOM di Palangka Raya telah menerbitkan 3 jenis rekomendasi yang telah diselesaikan tepat waktu dan sertifikat pengujian pihak ketiga sebanyak 864 sehingga persentase capain tahun 2020 menjadi 110,86%

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas SDM dalam melakukan penilaian sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga. Meski demikian masih terdapat hambatan internal dalam pelaksanaan penilaian sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga diantaranya adalah terbatasnya jumlah SDM serta penguatan kompetensi teknis petugas. Upaya lain yang dilakukan adalah terus melakukan fasilitasi/pendampingan secara intens baik secara langsung dengan datang ke kantor maupun melalui telepon atau whatsapp terhadap Pelaku Usaha/UMKM produk pangan olahan, obat tradisional maupun produk kosmetik yang ingin mengembangkan produknya memiliki izin edar BPOM.

Proses registrasi BBPOM di Palangka Raya juga melakukan fasilitasi/pendampingan terhadap proses perbaikan CAPA (*Corective Action, Preventif Action*) sehingga sampai mendapatkan hasil rekomendasi yang baik. Fasilitasi/pendampingan yang dilakukan bukan hanya dengan memberikan saran saja tetapi juga memberikan bimbingan teknis secara langsung dengan memberikan solusi yang terbaik bagi pelaku usaha/UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan izin edar BPOM baik produk Pangan Olahan, produk Obat Tradisional maupun produk Kosmetik. Pendampingan yang dilakukan meliputi pembuatan dokumen (Prosedur/SOP, formulir, dll), implementasi/monitoring dokumen, saran perbaikan sarana dan lain-lain, seperti mendesain CPPOB/CPOTB/CPKB yang sesuai dengan situasi dan kondisi sarana produksi.

Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan sertifikasi adalah Proses CAPA yang lambat berpengaruh dalam penyelesaian keputusan penilaian sertifikasi yang tepat waktu. Keterlambatan pembuatan CAPA terkait dengan temuan yang berhubungan dengan perbaikan prasarana dari ruang produksi hal ini disebabkan karena minimnya anggaran dana UMKM untuk melakukan perbaikan sarana produksi dan kurangnya pengetahuan UMKM tentang penerepan CPPOB/CPOTB/CPKB.

Selain telah dilaksanakan kegiatan bimtek Registrasi Pangan Olahan yang bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM pada bulan September 2020, pelaksanaan Fasilitasi/pendampingan yang dilakukan selama tahun 2020 telah dilakukan sebanyak 48 kali hal ini salah satu yang mendukung proses sertifikasi.

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian dari Persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 adalah 110,86% dengan kriteria baik. Hal ini ditunjang oleh kegiatan fasilitasi/pendampingan terhadap umkm dalam rangka mendapatkan izin edar.

Fasilitasi/pendampingan yang dilakukan memberikan bimbingan teknis secara langsung dengan memberikan solusi yang terbaik bagi pelaku usaha/UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan izin edar BPOM baik produk Pangan Olahan, produk Obat Tradisional maupun produk Kosmetik. Pendampingan yang dilakukan meliputi Penerapan CPOB/CPOTB/CPKB yang sesuai dengan situasi dan kondisi sarana produksi.

Bentuk fasilitasi/pendampingan dengan telah dilaksanakan kegiatan bimtek Registrasi Pangan Olahan yang bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM pada bulan September 2020, pelaksanaan Fasilitasi/pendampingan yang dilakukan selama tahun 2020 telah dilakukan sebanyak 48 kali hal ini salah satu yang mendukung proses sertifikasi

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Rencana atau tindak lanjut yang akan dilakukan dari hasil evaluasi adalah:

- Fasilitasi/ pendampingan akan dilakukan secara intensif kepada pelaku usaha dalam proses pemenuhan penerapan CPOB/CPOTB/CPKB maupun dalam proses untuk mendapatkan izin edar dari BPOM.
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka melakukan pembinaan terhadap UMKM.
- Meningkatkan pemenuhan *timeline* pengujian sampel pihak ketiga sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15	41,30	275,33	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus =

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target

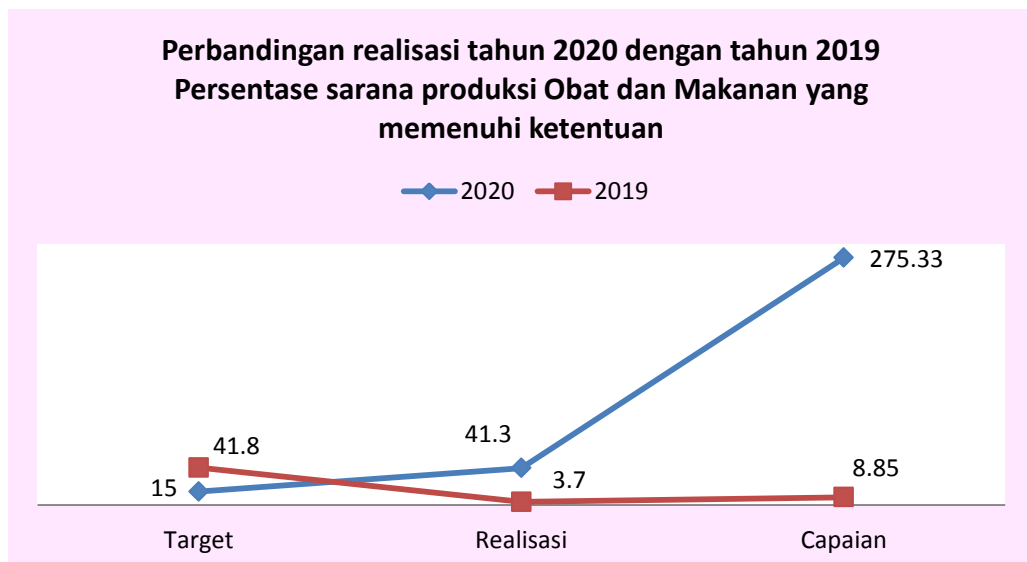
jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Pangan dan Industri Pangan Rumah Tangga. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Terjadinya pandemi covid-19 sejak bulan Maret 2020 menyebabkan pembatasan aktivitas yang mempengaruhi kegiatan pengawasan sarana produksi pada tahun 2020. Jumlah sarana produksi yang diperiksa adalah sejumlah 46 sarana dengan hasil sebanyak 19 sarana memenuhi ketentuan dan 27 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga capaian persentasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 adalah sebesar 41,30%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu **275,33%** dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

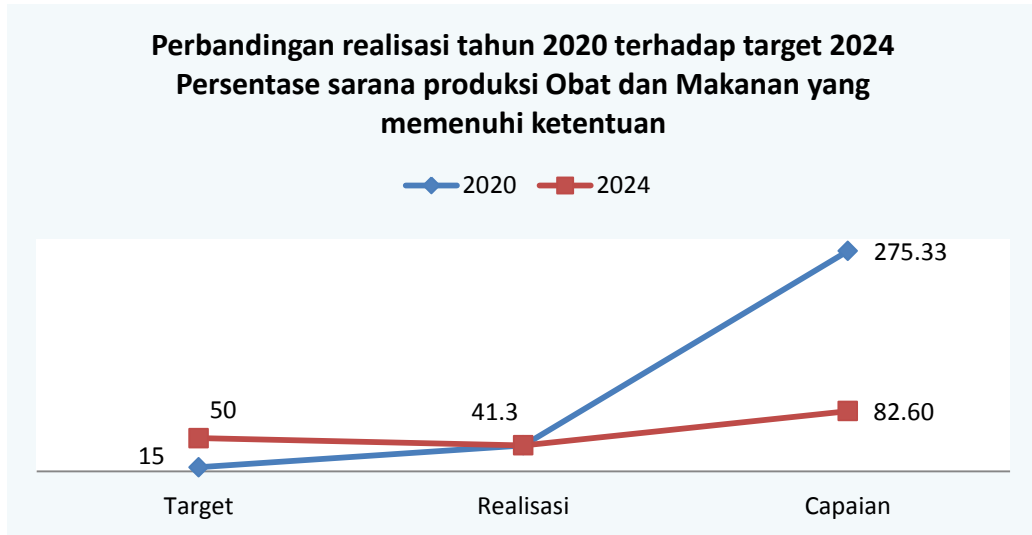
b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019



Realisasi capaian kinerja tahun 2020 sebesar 41,3%, meningkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 3,7%, namun realisasi kinerja tahun 2020 masih kurang jika dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 41,8%, hal ini disebabkan oleh persentase jumlah sarana produksi yang diperiksa sebagian besar

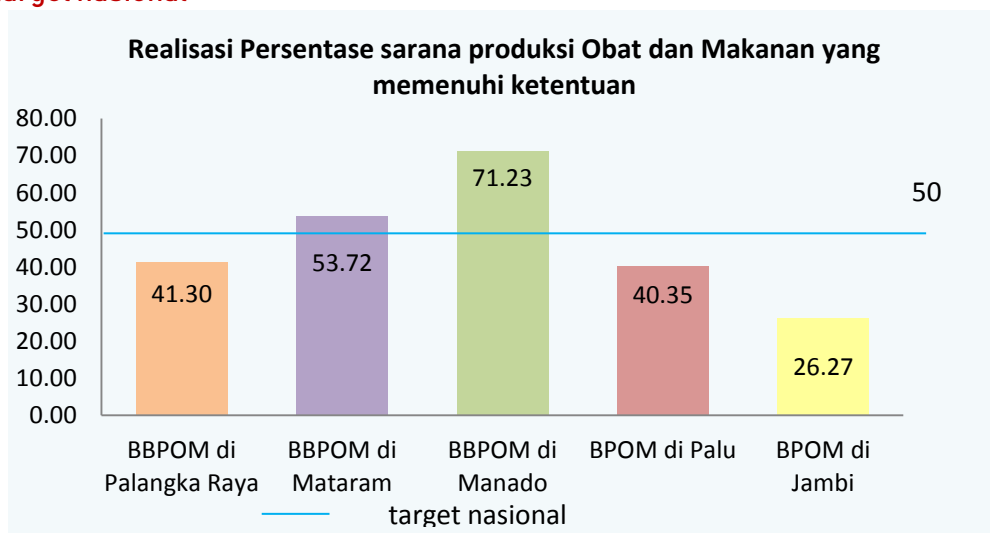
berupa PIRT meskipun jumlah sarana produksi yang memiliki izin MD sudah meningkat. Peningkatan realisasi indikator ini disebabkan oleh perbedaan kriteria dalam penetapan MK-TMK terhadap sarana produksi yang diperiksa.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target yang ditetapkan pada tahun 2024 berdasarkan perubahan target pada penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, indikator sasaran kegiatan ini ditetapkan sebesar 50%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 82,60% dengan kriteria cukup, untuk itu perlu dilakukan pengkajian kembali target yang akan ditetapkan untuk tahun 2022-2024 serta perlu disusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja tahun 2024 menjadi kriteria baik atau sangat baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa persentase realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya berada di bawah target nasional. Untuk indikator ini, BBPOM di Manado mencapai realisasi paling tinggi jika dibandingkan 4 UPT BPOM lain yang setara.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit), serta kosmetik golongan A dan B. Sesuai dengan karakteristik daerahnya, maka Balai Besar POM di Palangka Raya melakukan optimalisasi pembinaan pada sarana IRTP dan seluruh sarana MD dan UKOT dalam pemenuhan CPPB dan CPOTB serta meningkatkan monitoring surat tindak lanjut hasil pemeriksaan IRTP ke Dinas Kesehatan

Beberapa hal yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja tahun 2021 antara lain :

- Pemutakhiran data sarana produksi
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder Dinas Kesehatan dalam pembinaan sarana produksi UMKM
- Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) akan dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam kajian risiko penyusunan prioritas pemeriksaan sarana
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan
- Menyediakan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh :

- Sarana produksi MD yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 adalah sejumlah 42,85 %. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep Cara

Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dari para pelaku usaha. Kajian terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi MD selama tahun 2020 bahwa pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh pelaku usaha pangan adalah pada aspek pengendalian hama dan sanitasi-higiene, dan hal ini perlu menjadi perhatian pada pengawasan tahun berikutnya.

- Industri Rumah Tangga Pangan juga berkontribusi terhadap jumlah sarana yang memenuhi ketentuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya intervensi dari Dinas Kesehatan setempat yang selaras dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) NF Pangan BPOM untuk pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pengawasan IRTP semakin baik. Tren sarana TMK yang masih tinggi dari tahun ketahun pada sarana IRTP didominasi oleh temuan tidak adanya dokumentasi produksi serta alat timbang untuk penimbangan Bahan Tambahan Pangan tidak teliti. Pada sarana IRTP yang memang sarana produksi rumahan masih belum terbiasa dengan pendokumentasian kegiatan produksi dan penakaran BTP menggunakan timbangan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan merupakan indikator yang diukur di awal periode kinerja Renstar 2020-2025. Indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diukur untuk lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya. Pada periode sebelumnya, indikator ini merupakan hasil reuiv Renstra 2015-2019 OTK baru, dan dilanjutkan pengukurannya pada periode renstra 2020-2025.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	53,24	88,73	Cukup

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus =

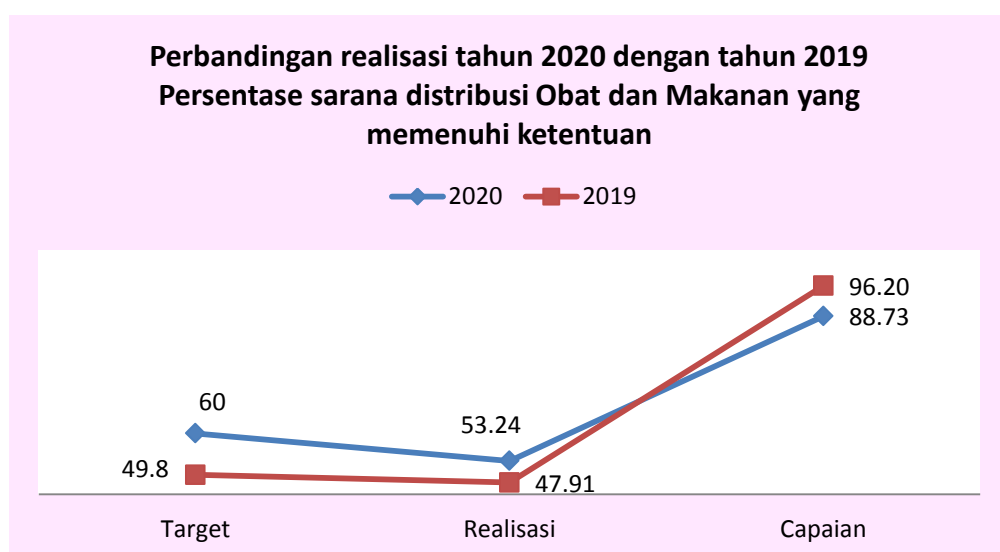
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada :

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

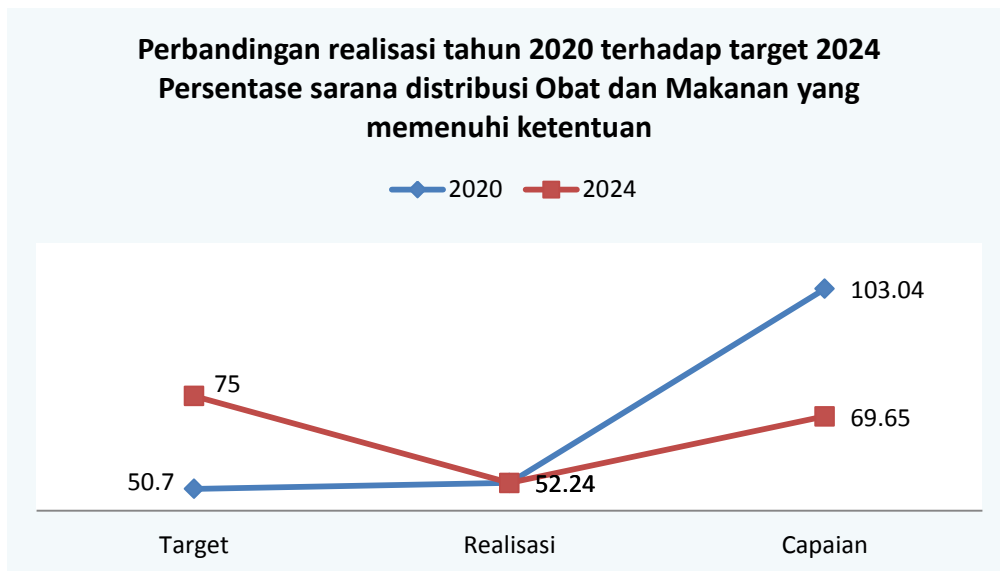
Realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kotawaringin Barat kepada 447 sarana dari 418 sarana yang ditargetkan, dengan hasil 238 sarana memenuhi ketentuan dan 209 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan yaitu **88,73%** dengan kriteria “cukup”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019



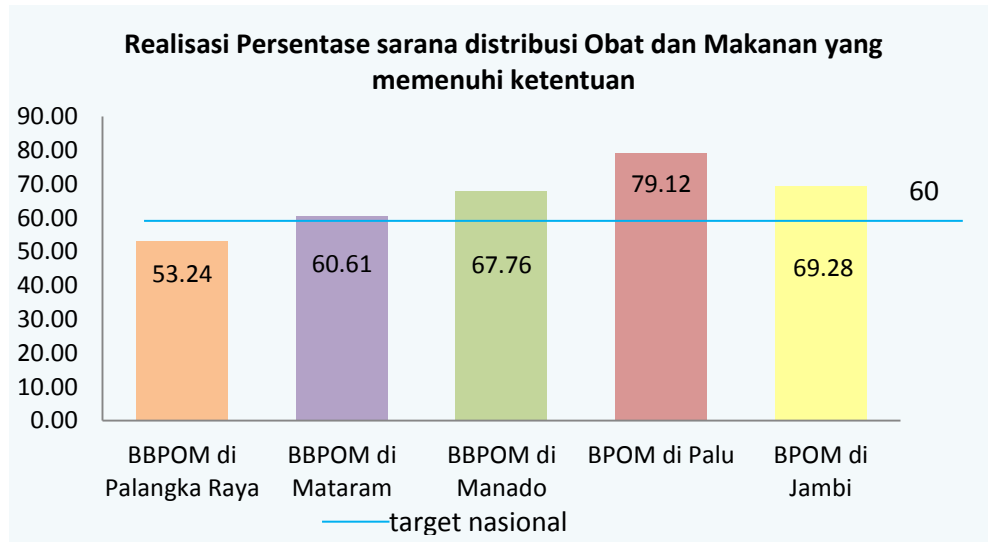
Apabila dilakukan perbandingan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 terhadap capaian tahun 2019, menunjukkan penurunan capaian, meskipun demikian realisasi kinerja tahun 2020 (53,24%) meningkat jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019 (47,91%), realisasi kinerja tahun 2020 berhasil melampaui target tahun 2019 (49,8%) hal ini menunjukkan bahwa jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan semakin meningkat, hal tersebut dipengaruhi oleh upaya pembinaan sarana yang semakin intensif.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 75%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 69,65% dengan kriteria kurang, Realisasi indicator tahun 2020 (52.24%) masih jauh berada dibawah target jangka menengah tahun 2024 (75%), sehingga perlu disusun langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja masuk dalam kriteria baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya belum berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 60%. Realisasi UPT BPOM lain yang setara yaitu BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, BPOM di Palu, dan BPOM di Jambi seluruhnya telah melebihi standar Nasional. Diantara kelima UPT BPOM lain yang setara, realisasi tertinggi dicapai oleh BPOM di Palu dan terendah dicapai oleh BBPOM di Palangka Raya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator ini pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,47% dari capaian tahun sebelumnya. Namun, apabila dilihat dari capaian terhadap jumlah sarana yang diperiksa, 53,24% merupakan sarana yang memenuhi ketentuan. Beberapa hal yang mempengaruhi penurunan capaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah :

- Pemeriksaan sarana secara *onsite* memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dikarenakan pada saat pemeriksaan langsung ke sarana, kita dapat melihat langsung kondisi secara riil di sarana dan dapat memperoleh ketidaksesuaian yang lebih banyak.

- Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan/perundang-undangan yang berlaku;
- Pembinaan kepada pelaku usaha, penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi/pelayanan obat yang tidak memenuhi ketentuan;
- Koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota sehingga tindak lanjut pada tahun 2020 yang masih berupa rekomendasi dapat ditindaklanjuti oleh sarana dengan efektif dan maksimal; dan
- Adanya pandemi covid-19, terjadi fokus pengawasan pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang mengelola obat-obat yang digunakan pengobatan covid-19 (deksamethasone, Chloroquin dan Hydrochloroquin), kesiapan Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) dan IFK Kabupaten/Kota dalam menerima vaksin Covid-19 (pengelolaan CCP), dan persiapan pengawalan pendistribusian Vaksin Covid-19 pada sarana pelayanan pemerintah (IFP, IFK dan Puskesmas)

Beberapa solusi yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain :

- Pengelolaan vaksin Covid-19 di sarana pelayanan kesehatan masih merupakan isu penting di tahun 2021. Hal yang masih menjadi fokus dalam pengawasan adalah pengawalan pendistribusian vaksin Covid-19, monitoring mutu dan penandaan vaksin Covid-19 serta pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) bersama stakeholder terkait. Untuk menunjang tugas ini, kompetensi petugas BBPOM di Palangka Raya dan koordinasi dengan stake holder terkait perlu ditingkatkan.
- Optimalisasi pengawasan rutin terhadap sarana distribusi masih perlu dilakukan dengan cara sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha, membuka forum komunikasi untuk konsultasi CAPA dari pelaku usaha, serta meningkatkan kompetensi petugas

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian persentase sarana disitribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain

- Pada tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya lebih banyak melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, dimana persen TMK nya

mencapai 58,75%. Persentase TMK ini masih cukup tinggi karena pelaku usaha masih kurang berkomitmen dalam penerapan cara pengelolaan obat yang baik di sarana pelayanan kefarmasian dan belum tersosialisasi dengan peraturan yang berlaku.

- Terbatasnya tenaga pengawas di BBPOM di Palangka Raya sehingga hanya bisa mengawasi 28,46% dari seluruh sarana distribusi yang ada di Jawa Timur yang jumlahnya 1.479 sarana

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, maka untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, perlu dilakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan, serta melakukan perencanaan pengawasan dengan lebih cermat berdasarkan analisis risiko.

6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	3,51	3,52	100,28	Baik

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian indeks pelayanan publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai:

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D. penilaian Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik ditetapkan 6 (enam) aspek penilaian meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)*
- 2) Profesionalitas SDM (18%)*

3) Sarana Prasarana (15%)

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)

5) Konsultasi dan Pengaduan (15%)

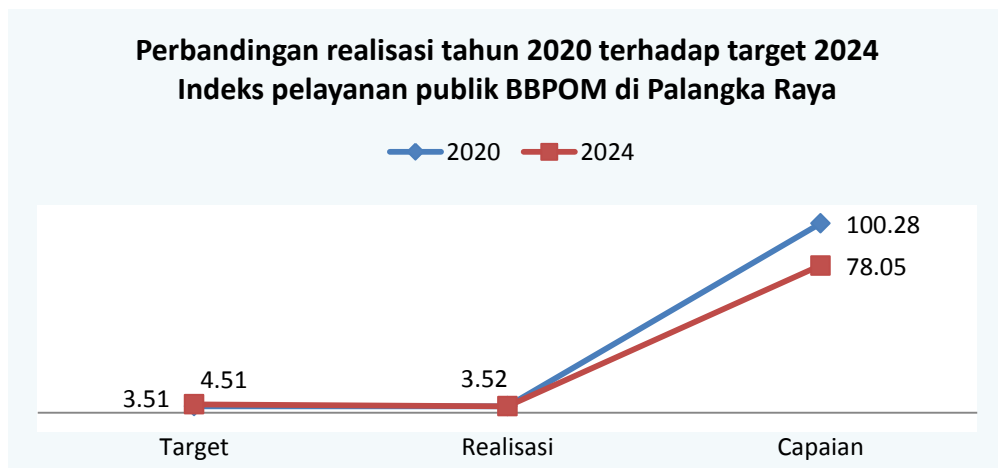
6) Inovasi (7%).

Hasil penilaian enam aspek Indeks Pelayanan Publik, dikategorikan sebagai berikut :

Range Nilai	Kategori	Makna
4,51-5,0	A	Pelayanan Prima
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
3,51-4,0	B	Baik
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51-3,0	C	Cukup
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51-2,0	D	Buruk
1,01-1,5	E	Sangat Buruk
0-1,0	F	Gagal

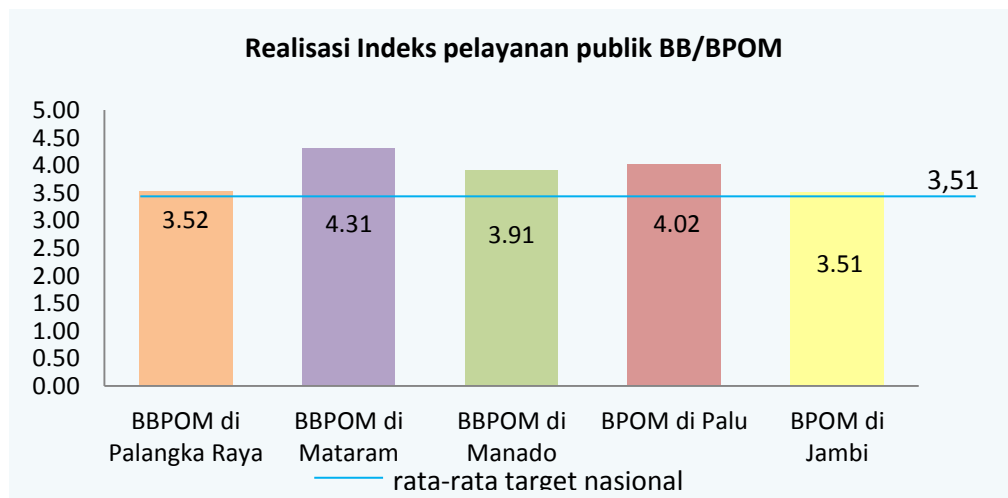
Pada triwulan III telah dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut dengan realisasi sebesar 3,52 dengan kategori “baik” dibawah rata-rata IPP Unit Kerja Pusat sebesar 4,14 “sangat baik” dan rata-rata IPP UPT BPOM sebesar 4,00 “sangat baik”. Pada triwulan IV tidak dilakukan pengukuran indikator tersebut, realisasi pada triwulan IV menggunakan realisasi hasil pengukuran pada triwulan III. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas sebesar **100,28%** dengan kriteria “baik”.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 4,51 atau pelayanan prima. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 78,05% dengan kriteria kurang, untuk itu perlu dilakukan penyusunan langkah-langkah strategis kegiatan yang diperlukan sebagai pengungkit peningkatan capaian kinerja di tahun 2024 menjadi kriteria baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Indeks pelayanan publik BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado dan BPOM di Palu sudah melebihi target nasional (3,51), sedangkan realisasi BPOM di Jambi realisasinya sesuai dengan target nasional, BBPOM di Mataram memiliki realisasi tertinggi dibandingkan 4 UPT BPOM lain yang setara. Meski BBPOM di Palangka Raya telah berhasil melebihi target nasional, namun realisasi BBPOM di Palangka Raya dibawah rata-rata realisasi Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Berita Acara hasil pemantauan dan evaluasi penilaian Indeks Pelayanan Publik pada tanggal 29 Juli 2020, pada aspek-aspek pengungkit penilaian indikator ini masih banyak terdapat rekomendasi peningkatan. Meskipun capaian realisasi lebih dari target, namun capaian yang didapat sangat sedikit peningkatannya 0,01 terhadap target yang ditetapkan, sehingga masih belum berhasil apabila dibandingkan dengan realisasi rata-rata Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM, realisasi BBPOM di Palangka Raya

berada dalam urutan ke-3 terbawah. Rekomendasi untuk peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik sebagai berikut :

✓ Aspek Kebijakan Pelayanan (30)

- Lampiran data dukung terkait tindak lanjut survei IKEPU belum disusun dan dilampirkan pada saat penilaian
- Hasil SKM dari seluruh jenis pelayanan dalam bentuk saran dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti belum dilampirkan pada saat penilaian
- Lampiran data dukung berupa publikasi di ruang pelayanan dan media informasi berupa leaflet/pamphlet/brosur, buku saku/katalog, poster serta publikasi di media cetak belum dilampirkan pada saat penilaian
- Lampiran data dukung publikasi Maklumat Pelayanan di dalam ruang ruangan (buku saku/katalog, media cetak), dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard) belum lengkap disampaikan pada saat penilaian
- Lampiran data dukung publikasi Standar Pelayanan dalam bentuk media sms/telepon, e-mail belum dilampirkan pada saat penilaian
- Lampiran data dukung berupa : 1) Standar Pelayanan yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya; 2) sosialisasi Standar Pelayanan pada pelanggan dan melalui website atau media sosial; dan 3) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap Standar Pelayanan belum tersedia
- Lampiran data dukung berupa publikasi Standar Pelayanan di area ruang pelayanan (buku saku/katalog), media informasi (baliho/billboard), media cetak belum tersedia
- Lampiran data dukung penyusunan Standar Pelayanan yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait (stakeholder) belum tersedia

✓ Aspek Profesionalisme SDM (18)

- Bukti pelaksana layanan mengenakan pakaian seragam khusus, identitas nama, PIN/atribut/logo unit pelayanan serta praktek 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat untuk memberika Solusi) pada saat melakukan pelayanan belum lengkap dilampirkan pada saat penilaian
- Lampiran komisi disiplin UPP atau bukti implementasi SOP Makro belum dilampirkan pada saat penilaian

- Kerta kerja pendukung untuk pemilihan pegawai teladan dan bukti implementasi SIP makro pemberian penghargaan belum dilampirkan pada saat penilaian
- Lampiran data dukung berupa SOP Makro pemberian penghargaan belum tersedia
- Bukti kesigapan layanan berupa dokumentasi/video pada saat pelayanan belum tersedia
- Lampiran data dukung untuk seluruh jenis layanan dengan memperhatikan nomenklatur yang diminta (posisi pelaksana layanan publik, masa kerja, pendidikan formal, riwayat diklat dan sertifikat) dan melakukan publikasi di area layanan belum disusun
- ✓ Aspek Sarana Prasarana (15)
 - Fasilitas untuk pengguna berkebutuhan khusus berupa toilet khusus pengguna layanan yang berkebutuhan khusus belum tersedia
 - Fasilitas antrean elektronik belum tersedia
 - Data dukung fasilitas parker yang dilengkapi dengan CCTV belum tersedia
- ✓ Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (15)
 - Publikasi Standar Internal Pelayanan Publik (SIPP) di perpustakaan daerah belum dilampirkan pada saat penilaian
 - Lampiran data dukung berupa *printscreen* subsite di bagian update berita internal belum tersedia
 - Lampiran pemutakhiran data dan informasi diutamakan sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja lembaga belum tersedia
 - Lampiran data dukung berupa *printscreen* sistem pengelolaan pengaduan mengacu Simpel LPK, SKM mengacu aplikasi Simolekdesi dan SDM mengacu SIASN belum dilampirkan pada saat penilaian
- ✓ Aspek Konsultasi dan Pengaduan (15)
 - Lampiran data dukung berupa arsip dokumentasi hasil layanan baik manual maupun yang dapat diakses melalui media sosial atau website (subsite) belum tersedia
 - Lampiran data dukung data petugas khusus untuk layanan konsultasi dan uraiannya telah diisi dengan lengkap belum tersedia

Rekomendasi hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik diatas akan ditindaklanjuti yang tertuang dalam roadmap peningkatan pelayanan publik di tahun 2021.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Meski realisasi Indeks Pelayanan Publik telah melampaui target yang ditetapkan, namun capaian indikator tersebut dibawah rata-rata Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM dan menduduki peringkat ke-3 dari bawah, Beberapa hal yang mempengaruhi belum berhasilnya Indeks Pelayanan Publik antara lain :

- Komponen penilaian pada setiap aspek pendukung Indeks Pelayanan Publik masih belum menjadi fokus strategi dalam peningkatan pelayanan publik, belum sepenuhnya tertuang dalam kegiatan yang akan dilaksanakan
- Publikasi yang telah dilakukan masih belum sesuai dalam memberikan daya ungkit pelayanan publik sehingga informasi pelayanan publik terhadap masyarakat luas belum tersampaikan
- Belum ditetapkan roadmap kegiatan pendukung Indeks Pelayanan Publik sehingga monitoring dan evaluasi belum berjalan efektif

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan maka hal-hal yang akan menjadi prioritas dalam rangka peningkatan Indeks Pelayanan Publik adalah :

- Menyusun roadmap kegiatan pendukung Indeks Pelayanan Publik di tahun 2021
- Menyusun kegiatan pendukung pelayanan publik yang memerlukan anggaran
- Melaksanakan kegiatan pendukung Indeks Pelayanan Publik berdasarkan roadmap yang telah dibuat
- Membuat publikasi dan mempublikasikannya komponen pendukung publikasi pelayanan publik
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

5

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE	86,62	91,99	106,20	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat baik dari segi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

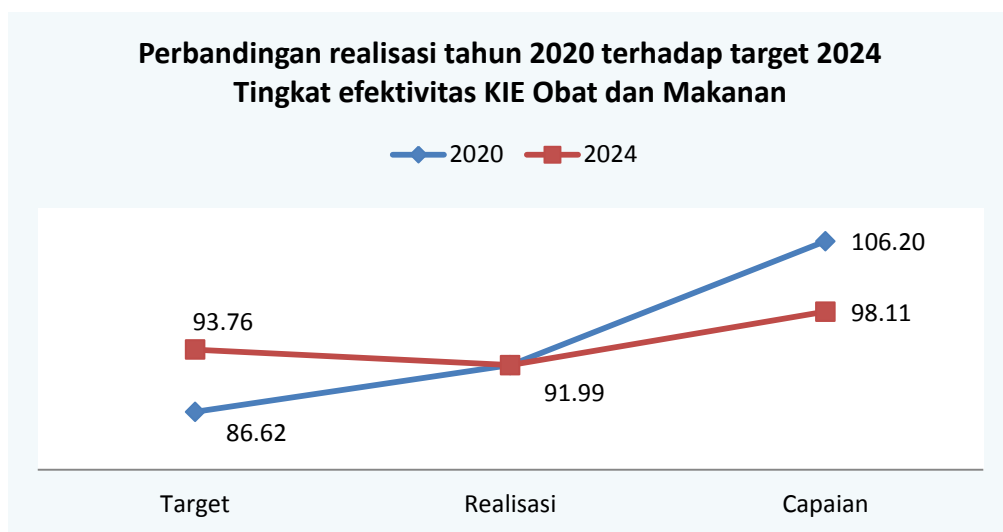
- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; dan
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BPOM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online* survei.

Pada tahun 2020, Tingkat efektivitas KIE BBPOM di Palangka Raya sebesar 91,99 dengan capaian **106,20%** dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 (86,62%) dengan kriteria "**baik**". Capaian Tingkat efektivitas KIE BBPOM di Palangka Raya sudah

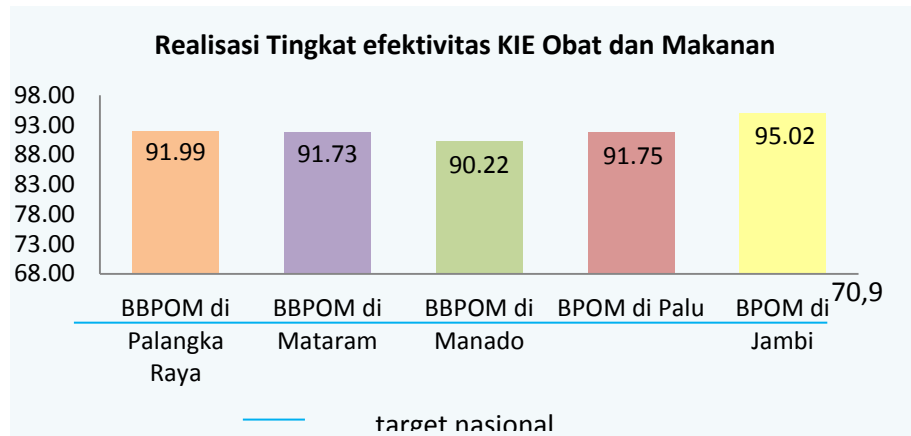
melebihi target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap pelaksanaan efektifitas KIE yang telah dilakukan BBPOM di Palangka Raya, bahwa masyarakat peserta KIE memahami materi yang mengenai obat dan makanan yang telah disampaikan dari beberapa media dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan harapan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 93,76. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 98,11 dengan kriteria baik, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga dapat mempertahankan capaian kinerja dalam kriteria sangat baik..

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas KIE tahun 2020 Balai Besar POM di Palangka Raya sudah berada di atas target nasional dengan 4 (empat) UPT BPOM lain yang setara. Realisasi tingkat efektivitas KIE tertinggi terdapat pada BPOM di Jambi. Hal ini harus menjadi evaluasi dan perbandingan bagi BBPOM di Palangka Raya untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi guna menyusun strategi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta meningkatkan unsur-unsur yang ada untuk dapat memberikan manfaat langsung KIE tentang obat dan makanan bagi masyarakat.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tahun 2020 tepatnya sejak bulan Maret 2020 dengan merebaknya pandemi covid-19 merupakan tahun penuh tantangan bagi BPOM dalam upaya meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan. Kegiatan KIE yang semula dilakukan secara langsung *face to face* dalam masa pandemi covid-19, intensitas pelaksanaan menjadi dikurangi dengan menerapkan protokol kesehatan dengan kapasitas peserta yang dibatasi bahkan mengubah metoda pelaksanaan yang semula secara langsung/luring menjadi pelaksanaan secara daring.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM POM di Palangka Raya untuk meningkatkan efektivitas KIE obat dan makanan selama tahun 2020, antara lain:

- Kegiatan penyebaran informasi mengenai obat, obat tradisional, pangan suplemen kesehatan, kosmetik dan bahan berbahaya melalui penyampaian iklan

Layanan Masyarakat di radio, spanduk, media sosial instagram ,dan *talkshow* di media elektronik;

- Penyebaran informasi dengan menayangkan video edukasi dan pemberian media edukasi dalam bentuk leaflet, brosur tentang obat, obat tradisional, pangan, suplemen kesehatan, kosmetik dan bahan berbahaya disetiap pertemuan yang dilakukan oleh BBPOM Palangka Raya dan di ruang tunggu konsultasi bagi konsumen yang melakukan konsultasi maupun pengaduan langsung.
- Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan melalui kegiatan Operasional Mobil Keliling di pasar tradisional dan pelaku usaha sampai tingkat desa dan kelurahan dengan pembagian brosur/leaflet, pemasangan spanduk, KIE langsung kepada beberapa komunitas pasar (pelaku usaha dan pengunjung).
- Penyebaran informasi melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan (KIE) *Webtalkshow* secara daring dengan tema tentang kosmetika dan pangan aman
- Sebagai Narasumber dalam berbagai kegiatan lintas sektor baik di kabupaten/kota maupun propinsi terkait obat dan makanan

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2020, BBPOM di Palangka Raya memperoleh tingkat efektifitas KIE sebesar 91,99 dengan capaian **106,20%** dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 (86,62%) dengan kriteria **"baik"**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan efektifitas KIE yang telah dilakukan BBPOM di Palangka Raya telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan KIE antara lain:

- Melaksanakan kegiatan penyebaran informasi mengenai obat, obat tradisional, pangan suplemen kesehatan, kosmetik dan bahan berbahaya melalui penyampaian Iklan Layanan Masyarakat di radio, spanduk, media sosial instagram ,dan *talkshow* di media elektronik;
- Melaksanakan Penyebaran informasi dengan menayangkan video edukasi dan pemberian media edukasi dalam bentuk leaflet, brosur tentang obat, obat tradisional, pangan, suplemen kesehatan, kosmetik dan bahan berbahaya disetiap pertemuan yang dilakukan oleh BBPOM Palangka Raya dan di ruang tunggu konsultasi bagi konsumen yang melakukan konsultasi maupun pengaduan langsung.

- Melaksanakan Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan melalui kegiatan Operasional Mobil Keliling di pasar tradisional dan pelaku usaha sampai tingkat desa dan kelurahan dengan pembagian brosur/leaflet, pemasangan spanduk, KIE langsung kepada beberapa komunitas pasar (pelaku usaha dan pengunjung).
- Melaksanakan Penyebaran informasi melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan (KIE) *Webtalkshow* secara daring dengan tema tentang kosmetika dan pangan aman
- Sebagai Narasumber dalam berbagai kegiatan lintas sektor baik di kabupaten/kota maupun propinsi terkait obat dan makanan

Walaupun telah mencapai target yang telah ditetapkan BBPOM di Palangka Raya masih ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Pandemi covid-19 yang melanda dunia sejak Maret 2020 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam strategi dan metoda yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya terutama untuk pelaksanaan KIE secara efektif. Metoda yang seharusnya dilakukan secara tatap muka harus dibatasi dengan memperhatikan protokol kesehatan dan penetapan PSBB di beberapa daerah di propinsi Kalimantan Tengah.
- Luas wilayah Kalimantan Tengah yang cukup luas merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan KIE yang menjangkau seluruh pelosok agar KIE terkait obat dan makanan secara merata di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.
- Perubahan metoda KIE terkait obat dan makanan selama masa Pandemi Covid-19 dari luring menjadi daring juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi karena tidak seluruh wilayah di propinsi Kalimantan Tengah memiliki kemudahan dalam akses internet sehingga target peserta KIE hanya dapat dilakukan di daerah yang memiliki akses internet.

Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi BBPOM di Palangka Raya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan layanan kepada masyarakat terkait obat dan makanan

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Indeks efektifitas KIE ini menjadi dasar kajian dan masukan bagi BBPOM di Palangka Raya untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering baik secara daring maupun

luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

Semua upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat yang telah meningkat kesadarannya akan mampu memilih Obat dan Makanan yang aman bagi diri sendiri dan keluarganya. Kegiatan penyebaran informasi melalui komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan ini dilakukan kepada komunitas masyarakat melalui :

- Kegiatan penyebaran informasi mengenai obat, obat tradisional, pangan, suplemen kesehatan, kosmetik dan bahan berbahaya melalui penyampaian Iklan Layanan Masyarakat di radio, spanduk, media sosial Instagram ,dan talkshow di media elektronik.
- Penyebaran informasi dengan menayangkan video edukasi dan pemberian media edukasi dalam bentuk leaflet, brosur tentang obat, obat tradisional, pangan, suplemen kesehatan, kosmetik dan bahan berbahaya disetiap pertemuan yang dilakukan oleh BBPOM Palangka Raya dan di ruang tunggu konsultasi bagi konsumen yang melakukan konsultasi maupun pengaduan langsung.
- Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan melalui kegiatan Operasional Mobil Keliling di pasar tradisional dan pelaku usaha di desa/kelurahan yang telah diintervensi program Desa Pangan Aman dengan pembagian brosur/leaflet, pemasangan spanduk, KIE langsung kepada beberapa komunitas pasar (pelaku usaha dan pengunjung).
- Penyebaran Informasi melalui Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan (KIE) secara daring/live melalui media elektronik maupun media sosial.
- Sebagai Narasumber dalam berbagai kegiatan lintas sektor baik di kabupaten/kota maupun propinsi terkait Obat dan Makanan

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

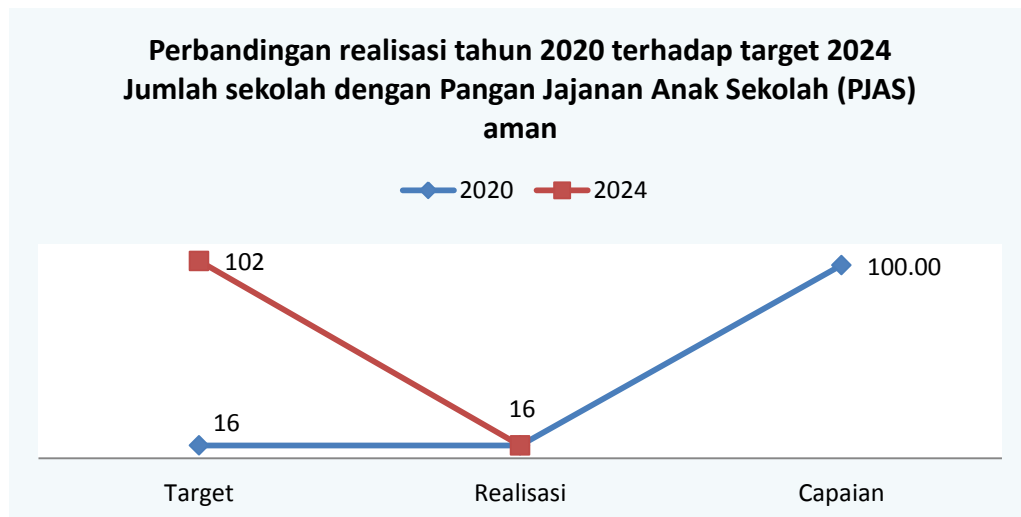
a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100	Baik

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.

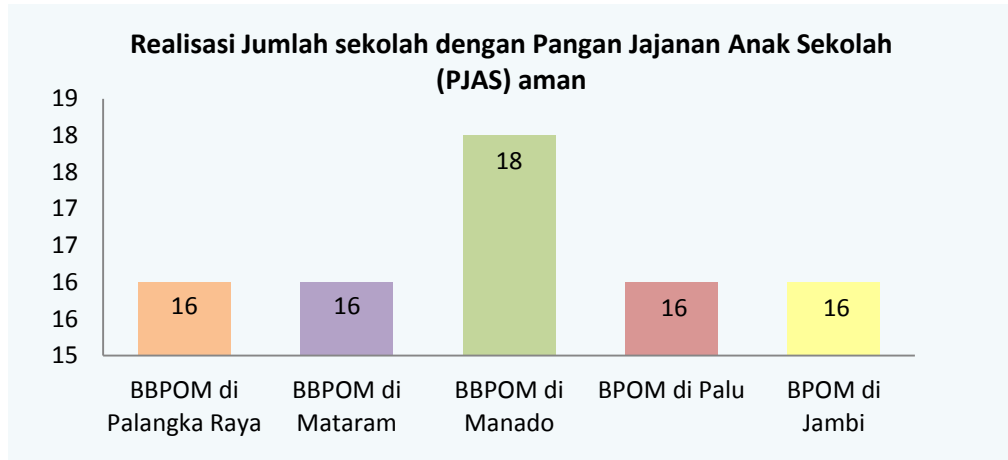
Pada tahun 2020 seluruh tahapan kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dilakukan sampai dengan tahap sertifikasi level I, realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada tahun 2020 adalah sebanyak 16 sekolah. Capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah mencapai target yaitu **100%** dengan kriteria “baik”, yang akan dilanjutkan tahapan pemberian sertifikat Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah di tahun 2021.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Palangka Raya pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dari 16 sekolah menjadi 102 sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. BBPOM di Palangka Raya harus tetap mengevaluasi dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi guna mencapai target jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 5 (lima) tahun kedepan.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara**



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya bersama dengan 3 UPT BPOM lain yang setara. BBPOM di Manado mencapai target sekolah lebih tinggi dibanding dengan 4 UPT BPOM lain yang setara. Hal ini harus menjadi evaluasi dan perbandingan bagi BBPOM di Palangka Raya untuk mengidentifikasi strategi dan metoda dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Tahun 2020 tepatnya sejak bulan Maret 2020 dengan merebaknya pandemi covid-19 merupakan tahun penuh tantangan bagi BPOM terutama dalam melaksanakan program Pangan Jajanan Sekolah Aman, dimana seluruh aktivitas/kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan dialihkan secara daring, demikian halnya dengan aktivitas di kantin sekolah. Hal ini mengakibatkan program kerja yang telah disusun belum dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi. Kegiatan intervensi keamanan PJAS yang dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten telah mengalami penyesuaian tahapan kegiatan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut maka untuk tahun 2020 tahapan intervensi PJAS yakni audit sarana kantin menjadi ditiadakan dan kegiatan intervensi yang dilakukan hanya sampai pada tahap sertifikasi level 1 (Komitmen Sekolah Dalam Penerapan Keamanan Pangan). Target sekolah yang semula 20 (dua puluh) sekolah menjadi 16 (enam belas) sekolah dengan output hanya sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1. Pada tahun 2020, tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah monitoring terhadap komitmen sekolah untuk melaksanakan

self assesment mandiri yang diverifikasi oleh petugas BBPOM di Palangka Raya sampai diperolehnya sertifikasi level I untuk 16 (enam belas) sekolah yang diintervensi di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Selatan dan akan dilanjutkan tahapan pemberian sertifikat Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah di tahun 2021.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2020, BBPOM di Palangka Raya berhasil mencapai target sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman sebanyak 16 (enam belas) sekolah dengan sertifikat level I. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program terpadu nasional terkait PJAS aman yang telah dilakukan BBPOM di Palangka Raya telah dilaksanakan dengan baik walaupun terjadi pengurangan target akibat Pandemi Covid-19. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman antara lain:

- Melaksanakan Advokasi Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Terkait di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi yaitu Kabupaten Katingan dan Barito Selatan guna mensosialisasikan dan menggalang komitmen pemerintah daerah dan lintas sector terkait untuk mensukseskan program Terpadu nasional.
- Melaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi, yaitu Kabupaten Katingan dan Barito Selatan sehingga terbentuk Kader Keamanan Pangan Sekolah yang berkompetensi memberdayakan komunitas sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah dengan PJAS aman;
- Melaksanakan pengawalan serta monitoring dan evaluasi terhadap komitmen sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah dengan PJAS Aman sehingga memperoleh Sertifikat Level I untuk diajukan Menerima Piagam Bintang Keamanan Pangan di Tahun 2021.
- Pemberian paket edukasi kepada 16 (enam belas) sekolah di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi, sebagai sarana pendukung dalam memberdayakan komunitas sekolah dengan PJAS Aman.

Walaupun BBPOM di Palangka Raya telah mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan:

- Pandemi covid-19 yang melanda dunia sejak Maret 2020 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam strategi dan metoda yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya terutama untuk pelaksanaan program PJAS Aman. Metoda yang seharusnya dilakukan secara tatap muka harus dibatasi dengan memperhatikan protokol kesehatan dan penetapan PSBB di desa yang akan diintervensi
- Keterbatasan ketersediaan akses internet di daerah menjadi kendala yang cukup besar saat pandemi Covid-19 karena pelaksanaan di daerah tidak dapat dilaksanakan secara daring sehingga pelaksanaan sempat tertunda sampai situasi dan kondisi di daerah memungkinkan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- Perubahan Juknis akibat Pandemi Covid-19 mengakibatkan kendala dalam memonitoring dan mengevaluasi persyaratan yang harus dipenuhi sekolah untuk diajukan memperoleh sertifikat Level 1.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Pandemi covid-19 di tahun 2020 menyebabkan adanya berbagai macam penyesuaian dalam tahapan intervensi kegiatan PJAS aman sehingga mengakibatkan adanya tahapan yang tidak bisa dilakukan di tahun 2020. Untuk itu BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan pendampingan dan pengawalan kepada sekolah dalam memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah. Tahapan lanjutan setelah memperoleh sertifikasi level I untuk 16 (enam belas) sekolah yang belum bisa dilakukan di tahun 2020 selanjutnya akan dilakukan di tahun 2021.

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	5	5	100	Baik

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, untuk pemenuhan konsumsi pangan yang aman dan bergizi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan program intervensi keamanan pangan dengan konsep pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

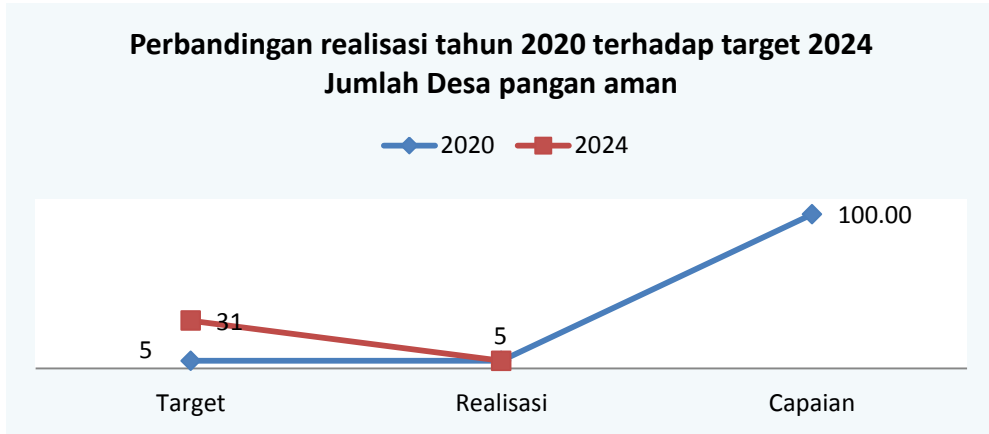
pangan yang aman dan bergizi. Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh BPOM dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat desa di bidang keamanan pangan, mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan serta memperkuat ekonomi desa melalui program Keamanan Pangan Desa.

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri, atau integrasi dengan program lain)

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi *stunting*, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan $\leq 0,815$ dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0,599$ dan $\leq 0,707$, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

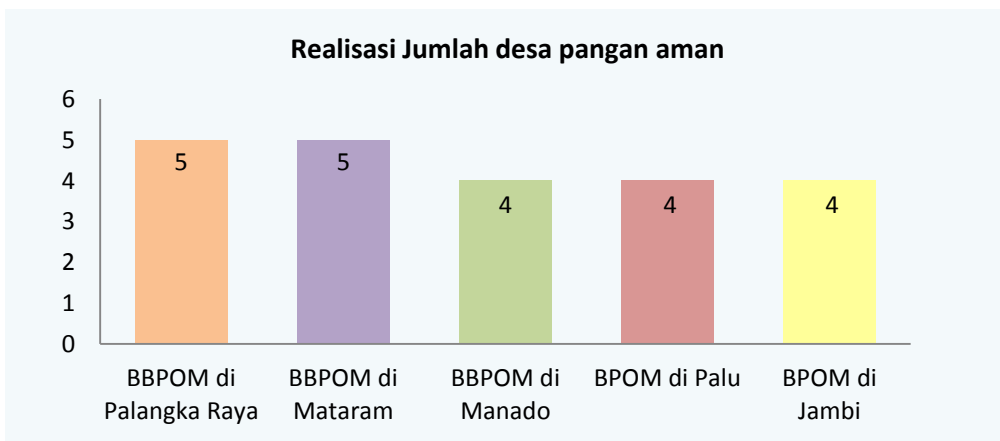
Intervensi keamanan pangan yang dilakukan melalui program Desa Pangan Aman tahun 2019 di Kabupaten Barito Selatan kelurahan Buntok Kota berhasil meraih Juara 3 Desa Pangan Aman. Hal ini tentu tidak lepas dari komitmen tim kader keamanan pangan serta pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk senantiasa mendukung terlaksananya program Desa Pangan Aman secara mandiri. Pada tahun 2020 seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap Monitoring dan Evaluasi. Realisasi jumlah Desa Pangan Aman tahun 2020 adalah sebanyak 5 (lima) desa. Capaian Jumlah desa pangan aman telah mencapai target yaitu **100%** dengan kriteria “baik”.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Capaian jumlah desa pangan aman BBPOM di Palangka Raya pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dari 5 menjadi 31 desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. BBPOM di Palangka Raya harus mengevaluasi dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi guna mencapai target jumlah desa pangan aman 5 (lima) tahun kedepan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian target jumlah desa pangan aman tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya bersama dengan 4 (empat) UPT BPOM lain yang setara. BBPOM di Palangka Raya harus mengidentifikasi kendala dan risiko yang dihadapi guna penyusunan strategi dan metoda dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Merebaknya pandemi covid 19 tepatnya sejak bulan Maret 2020, merupakan tantangan baru bagi BPOM terutama dalam melaksanakan program Desa Pangan Aman, dimana beberapa wilayah/kabupaten termasuk zona merah dan menerapkan PSBB merupakan kendala utama untuk menjalankan tahapan kegiatan Desa Pangan Aman. Hal ini mengakibatkan program kerja yang telah disusun belum dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi. Kegiatan Desa Pangan Aman ini juga telah mengalami penyesuaian tahapan kegiatan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Target desa yang diintervensi yang semula 6 (enam) desa menjadi 5 (lima) desa. Pada tahun 2020, seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap Monitoring dan Evaluasi.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2020, BBPOM di Palangka Raya berhasil mencapai target 5 (lima) Desa Pangan Aman di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program terpadu nasional terkait Desa Pangan Aman yang telah dilakukan BBPOM di Palangka Raya telah dilaksanakan dengan baik walaupun terjadi pengurangan target akibat Pandemi Covid-19. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Desa Pangan Aman antara lain:

- Melaksanakan Advokasi Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Terkait di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi yaitu Kabupaten Katingan dan Barito Selatan guna mensosialisasikan dan menggalang komitmen pemerintah daerah dan lintas sector terkait untuk mensukseskan program Terpadu nasional.
- Melaksanakan Bimtek Kader Keamanan di 5 (lima) desa di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi, yaitu Kabupaten Katingan dan Barito Selatan sehingga terbentuk Kader Keamanan Pangan Desa yang berkompetensi memberdayakan komunitas desa untuk mewujudkan Desa Pangan Aman;
- Melaksanakan Bimtek Komunitas oleh Kader Keamanan Pangan Desa yang telah dilatih di 5 (lima) desa di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi dalam upaya memberdayakan komunitas desa untuk mewujudkan Desa Pangan Aman;

- Melaksanakan Fasilitasi Keamanan Pangan Pra dan Post Intervensi guna memonitoring dan mengevaluasi perubahan sikap dan perilaku masyarakat desa terkait Keamanan Pangan guna mewujudkan Desa Pangan Aman.
- Melaksanakan pengawalan melalui intensifikasi keamanan pangan terhadap desa yang telah diintervensi melalui program operasional mobil keliling.
- Pemberian paket edukasi kepada 3(tiga) desa yang diintervensi tahun sebelumnya, yaitu Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper dan Desa Baru sebagai sarana pendukung dalam upaya memberdayakan komunitas desa untuk mewujudkan Desa Pangan Aman.
- Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap desa/kelurahan yang telah diintervensi untuk mengidentifikasi, memonitoring dan mengevaluasi keberlanjutan program dan kendala yang dihadapi desa dalam konsistensi mewujudkan Desa Panga Aman.

Walaupun BBPOM di Palangka Raya telah mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan:

- Pandemi covid-19 yang melanda dunia sejak Maret 2020 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam strategi dan metoda yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya terutama untuk pelaksanaan program Desa Pangan Aman. Metoda yang seharusnya dilakukan secara tatap muka harus dibatasi dengan memperhatikan protokol kesehatan dan penetapan PSBB di desa yang akan diintervensi
- Keterbatasan ketersediaan akses internet di daerah menjadi kendala yang cukup besar saat pendemi Covid-19 karena dilaksanakan di daerah tidak dapat dilaksanakan secara daring sehingga pelaksanaan sempat tertunda sampai situasi dan kondisi di daerah memungkinkan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- Target Peserta pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi di bulan desember 2020 tidak dapat terpenuhi akibat Pandemi Covid-19.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan pendampingan dan pengawalan kepada Desa Pangan Aman yang telah diintervensi dalam pelaksanaan keamanan pangan di desa serta tetap memonitoring komitmen lebih lanjut dari Kepala Desa/Lurah dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat agar program dan

kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Desa Pangan Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	2	2	100	Baik

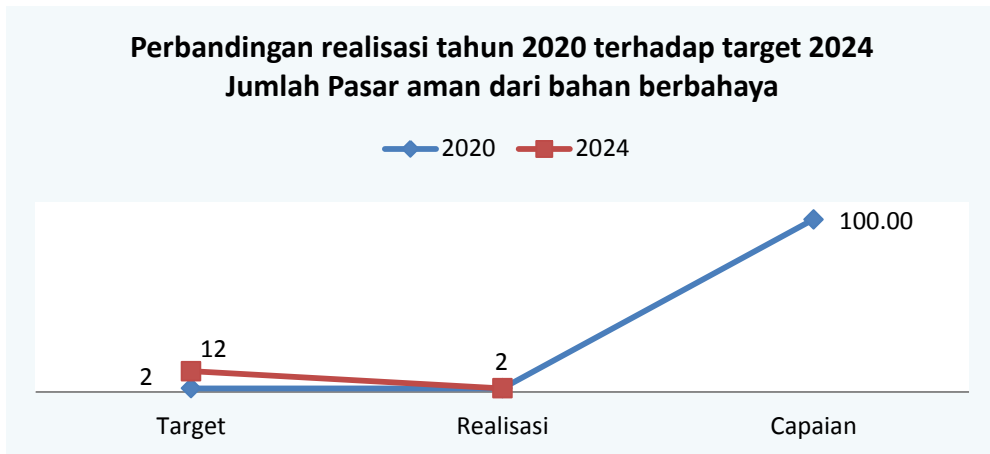
Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Strategi yang dilakukan oleh BPOM untuk mewujudkan Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya dalam bentuk intervensi yang dilakukan melalui kegiatan survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, money pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dihitung dari jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

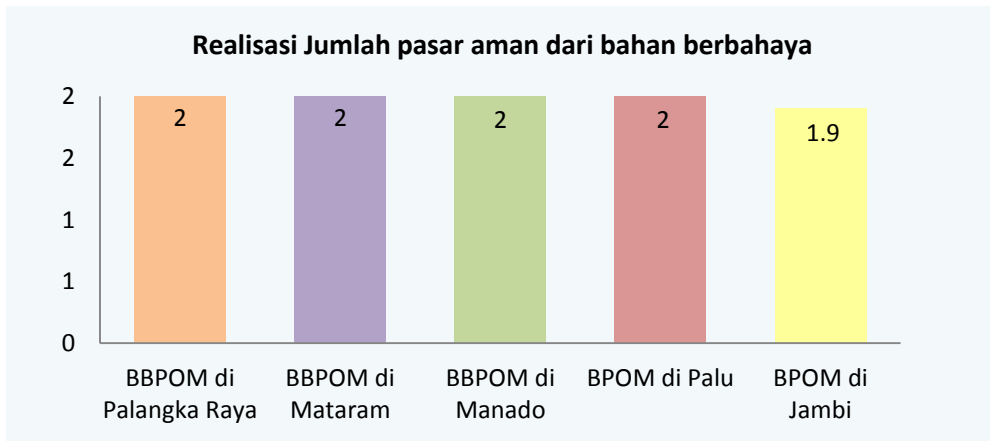
Pada tahun 2020, realisasi capaian kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya BBPOM di Palangka Raya adalah 2 pasar aman dari bahan berbahaya dengan capaian **100%** dengan kriteria **“baik”**.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Capaian jumlah pasar aman bebas dari bahan berbahaya BBPOM di Palangka Raya pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dari 2 menjadi 12 pasar aman dari bahan berbahaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. BBPOM di Palangka Raya harus mengevaluasi dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi guna mencapai target jumlah desa pangan aman 5 (lima) tahun kedepan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian target jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2020 Balai Besar POM di Palangka Raya bersama dengan 4 (empat) UPT BPOM lain yang setara. BBPOM di Palangka Raya harus mengidentifikasi kendala dan risiko yang dihadapi guna penyusunan strategi dan metoda dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pandemi covid-19 tepatnya bulan Maret 2020, merupakan tantangan tersendiri bagi BPOM dalam melaksanakan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dimana beberapa wilayah/kabupaten merupakan zona merah dan menerapkan PSBB merupakan kendala utama untuk menjalankan tahapan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Hal ini mengakibatkan tahapan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya belum dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi. Walaupun terkendala pandemi covid-19, di tahun 2020 ini, seluruh tahapan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi (Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Selatan) dapat terlaksana dengan baik sampai dengan monitoring tahap II yang mana dalam pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan protocol kesehatan.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2020, BBPOM di Palangka Raya berhasil mencapai target 2 (dua) Pasar Aman Bebas Bahan Berbahaya di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program terpadu nasional terkait Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya yang telah dilakukan BBPOM di Palangka Raya telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya antara lain:

- Melaksanakan Advokasi Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Terkait di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi yaitu Kabupaten Katingan dan Barito Selatan guna mensosialisasikan dan menggalang komitmen pemerintah daerah dan lintas sector terkait untuk mensukseskan program Terpadu nasional..
- Melaksanakan Bimtek Petugas Pasar di 2(dua) pasar di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi, yaitu Kabupaten Katingan dan Barito Selatan sehingga terbentuk Fasilitator Keamanan Pangan yang berkompetensi memberdayakan komunitas pasar untuk mewujudkan Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya;
- Melaksanakan Penyuluhan Komunitas Pasar di 2(dua) pasar di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi dalam upaya memberdayakan komunitas pasar untuk mewujudkan Desa Pangan Aman;
- Melaksanakan Kampanye Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya di 2(dua) pasar di 2 (dua) kabupaten yang diintervensi dalam upaya memberdayakan

komunitas pasar (Pelaku usaha dan pembeli) untuk mewujudkan Desa Pangan Aman.

- Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pasar yang telah diintervensi yang terbagimenjadi 2 (dua) tahap untuk mengidentifikasi, memonitoring dan mengevaluasi penggunaan dan ketersediaan bahan berbahaya ataupun pangan yang mengandung bahan berbahaya sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan guna mewujudkan Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya.

Walaupun BBPOM di Palangka Raya telah mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan:

- Pandemi covid-19 yang melanda dunia sejak Maret 2020 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam strategi dan metoda yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya terutama untuk pelaksanaan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Metoda yang seharusnya dilakukan secara tatap muka harus dibatasi dengan memperhatikan protokol kesehatan dan penetapan PSBB di desa yang akan diintervensi
- Keterbatasan ketersediaan akses internet di daerah menjadi kendala yang cukup besar saat pandemi Covid-19 karena dilaksanakan di daerah tidak dapat dilaksanakan secara daring sehingga pelaksanaan sempat tertunda sampai situasi dan kondisi di daerah memungkinkan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Walaupun terkendala pandemi covid-19, tidak menjadi hambatan yang berarti dalam terus melaksanakan keamanan pangan di komunitas pasar khususnya di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Katingan yang menjadi target intervensi tahun 2020. BBPOM di Palangka Raya akan terus melakukan pengawalan terhadap Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya yang telah diintervensi di tahun 2020, selain itu juga diperlukan komitmen lebih lanjut dari petugas dan kepala pasar serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Pasar Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan, bahkan diharapkan akan direplikasi ke pasar-pasar lainnya yang ada di daerah.

6

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	99,39	121,21	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

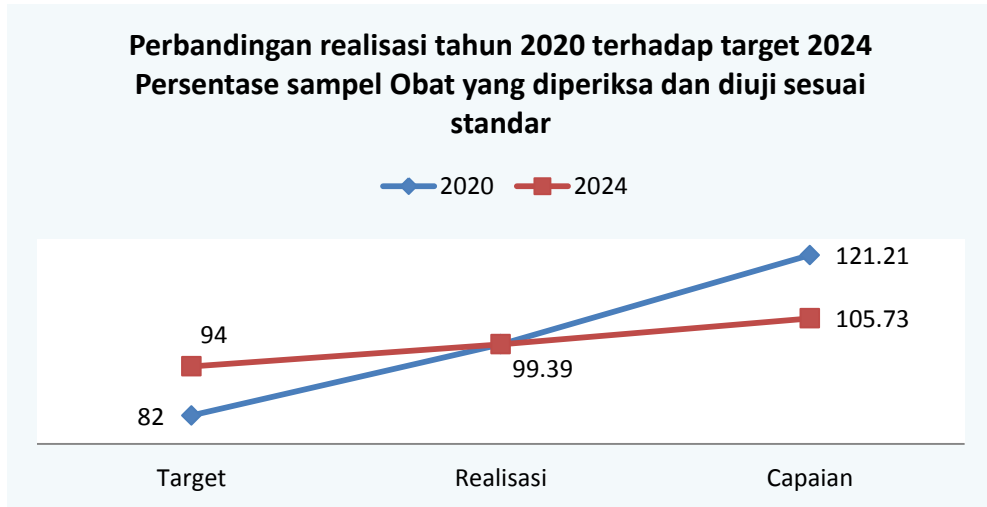
A. (jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar / jumlah target sampel Obat) x 100%

B. (jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar / jumlah target sampel Obat) x 100%

Obat mencakup obat, obat tradisional, suplemen kesehatan serta kosmetik. Sampel Obat yaitu sampel yang disampling berdasarkan prioritas sampling yang telah ditetapkan. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling, pemenuhan pengujian parameter uji kritis serta *timeline* pengujian yang ditetapkan pada pedoman/SOP. Diperiksa yaitu pengecekan terhadap nomor ijin edar, kemasan sampel, tanggal kedaluarsa, serta penandaan atau label. Diuji meliputi pengujian laboratorium baik pengujian kimia maupun mikrobiologi.

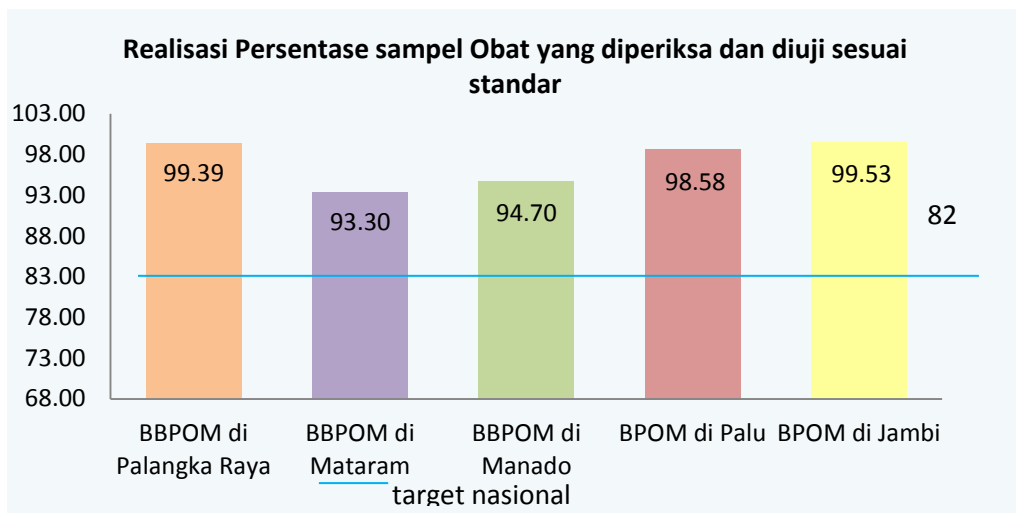
Realisasi sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 yaitu sebesar 99,3% dengan capaian sebesar 121,21% dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”. Pada tahun 2020 sebanyak 1222 sampel Obat telah diperiksa sesuai standar dan sebanyak 1207 sampel yang diuji sesuai standar dengan target sampel sebanyak 1221 Sampel. Sampel yang diperiksa dan diuji merupakan sampel yang berasal dari wilayah pengawasan BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat.

a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah 94%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 105,73% dengan kriteria baik, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga dapat mempertahankan capaian kinerja dalam kriteria sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya telah melebihi target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 82%. Realisasi UPT BPOM lain yang setara

yaitu BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, BPOM di Palu, BPOM di Jambi seluruhnya telah melebihi standar nasional. Diantara kelima UPT BPOM lain yang setara, BBPOM di Palangka Raya realisasinya tertinggi dan realisasi terendah oleh BBPOM di Mataram.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pemenuhan capaian obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pelaksanaan sampling terhadap produk Obat dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling, pengurangan target sampel sebesar 25% semula 1628 sampel menjadi 1221 sampel dikarenakan pandemi covid-19, penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 secara konsisten, pengadaan alat yang telah terealisasi pada bulan Oktober 2020 sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis, pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis, pengaturan kehadiran pegawai sesuai dengan kondisi *new normal* dengan pemberlakuan WFH (*work from home*) dan WAO (*work at office*), berkurangnya penerimaan sampel pihak ketiga (PNBP) serta optimalisasi sisa anggaran pengadaan reagensia media untuk pengadaan sarana prasarana pengujian.

Kendala yang dihadapi antara lain beberapa parameter uji menggunakan metoda analisa terbaru yang belum pernah diujikan di laboratorium, kurangnya anggaran suku cadang alat laboratorium sehingga beberapa kebutuhan suku cadang tidak dapat direalisasikan, meski demikian pada akhir tahun diadakan pengadaan suku cadang hasil optimalisasi sisa anggaran pengadaan reagensia kimia dan media mikrobiologi untuk menambah kekurangan suku cadang alat laboratorium. Kendala lain yang dihadapi terdapat personil penguji yang terkonfirmasi positif covid-19 dan wajib melaksanakan isolasi mandiri menyebabkan terhambatnya proses pengujian sampel. Beberapa sampel melewati *timeline* pengujian yang ditetapkan disebabkan adanya kerusakan alat laboratorium antara lain LCMSMS dan Densitometer yang membutuhkan waktu perbaikan. Terdapat 2 sampel rujuk Obat dengan parameter uji identifikasi DNA Porcine yang tidak dapat memenuhi parameter uji kritis disebabkan UPT BPOM rujukan (BBPOM di Makasar) tidak dapat melakukan pengujian identifikasi DNA Porcine karena alat PCR beserta kelengkapannya digunakan untuk pengujian covid-19.

Beberapa alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain :

- Koordinasi sampling dan pengujian yang lebih baik, dengan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian yang dikaji setiap bulan untuk menghindari sampel tidak dapat diuji tepat waktu akibat tidak tersedianya baku pembanding/reagensia kimia-media mikrobiologi atau sarana prasarana pendukung pengujian laboratorium
- Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat laboratorium yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan sampling, pemeriksaan, dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling, pemeriksaan, dan pengujian sesuai dengan target yang ditetapkan pada rencana pelaksanaan kegiatan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat meningkat.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini pada tahun 2020 disebabkan oleh :

- Dengan adanya kondisi pandemi covid-19 pada tahun 2020, telah dilakukan *refocusing* anggaran untuk mengatasi pandemi covid-19. Salah satunya dengan dilakukan penurunan jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 25% semula 1628 sampel menjadi 1221 sampel. Penurunan target output ini sejalan dengan perubahan sistem kerja, yaitu adanya sistem *work from home*. Pengaturan sistem kerja ini diatur sedemikian rupa sehingga jam kerja tetap efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan tercapainya indikator ini.
- Target yang ditetapkan untuk sampel yang diperiksa sesuai standar adalah 100% dengan realisasi sebesar 100,08% (1222 sampel dari 1221 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan 64%, namun realisasinya 98,77% (1207 sampel dari 1222 sampel yang diuji). Dari uraian ini terlihat bahwa sampel yang diuji capaiannya jauh melebihi target yang ditetapkan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, untuk mencapai Persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar secara maksimal, maka perlu penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium, selain itu juga pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada pedoman sampling, peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara daring, serta pengaturan kehadiran pegawai terkait pandemi covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	89,40	119,20	Sangat Baik

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

A. (jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / jumlah target sampel Makanan) x 100%

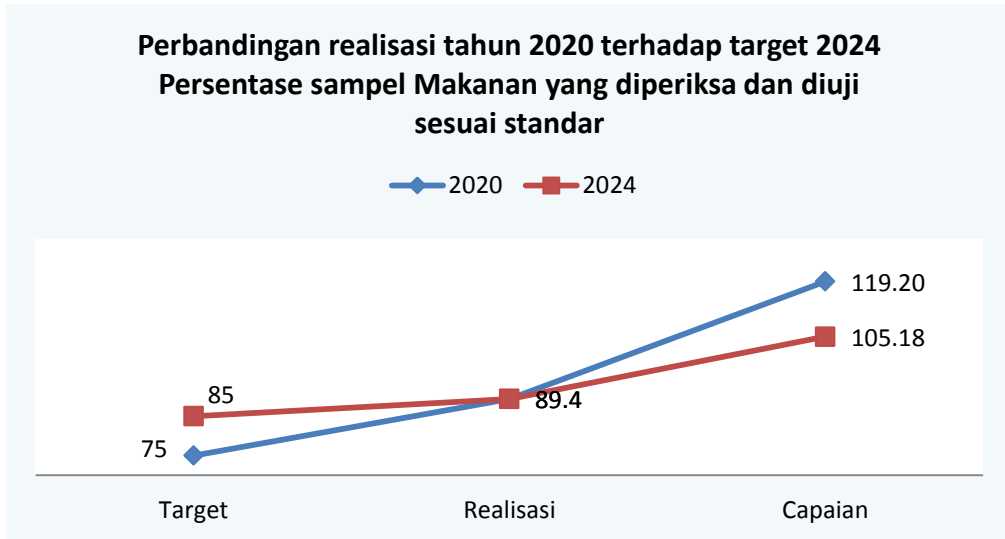
B. (jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / jumlah target sampel Makanan) x 100%

Sampel makanan yang dimaksud meliputi sampel yang telah ditetapkan pada pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling, pemenuhan pengujian parameter uji kritis serta *timeline* pengujian yang ditetapkan pada pedoman/SOP. Diperiksa yaitu pengecekan terhadap nomor ijin edar, kemasan sampel, tanggal kedaluarsa, serta penandaan atau label. Diuji meliputi pengujian laboratorium baik pengujian kimia maupun mikrobiologi.

Realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 yaitu sebesar 89,4% dengan capaian sebesar 119,20% dengan kriteria “sangat baik”. Pada tahun 2020 sebanyak 566 sampel Obat telah diperiksa sesuai standar dan sebanyak 446 sampel yang diuji sesuai standar dengan target sampel sebanyak 564 Sampel.

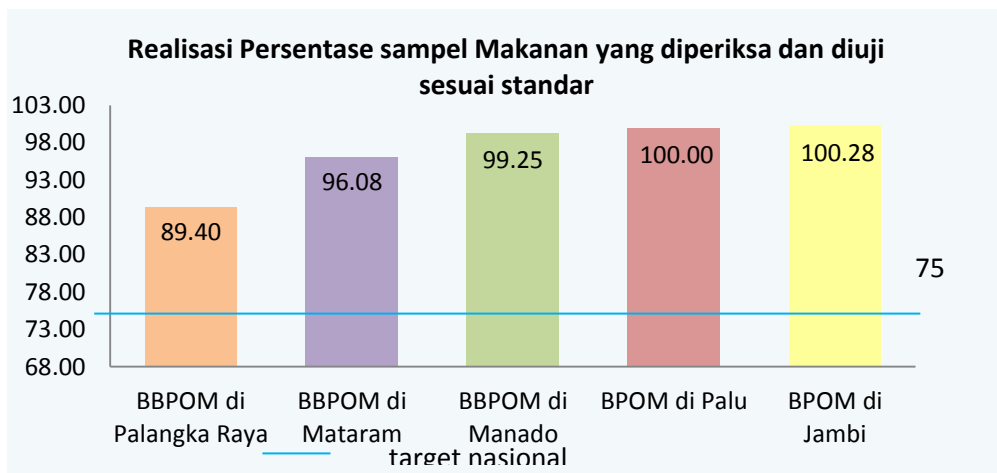
Sampel yang diperiksa dan diuji merupakan sampel yang berasal dari wilayah pengawasan BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah 85%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 105,18% dengan kriteria baik, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga dapat mempertahankan capaian kinerja dalam kriteria sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya telah melebihi target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 75%. Realisasi UPT BPOM lain yang setara yaitu BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, BPOM di Palu, BPOM di Jambi seluruhnya telah melebihi standar Nasional. Diantara kelima UPT BPOM lain yang setara, realisasi tertinggi dicapai oleh BPOM di Jambi dan terendah dicapai oleh BBPOM di Palangka Raya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pemenuhan capaian sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pelaksanaan sampling terhadap produk Makanan dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling, adanya pengurangan target sampel sebesar 25% semula 752 sampel menjadi 564 sampel dikarenakan pandemi covid-19, penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 secara konsisten, pengadaan alat yang telah terealisasi pada bulan Oktober 2020 sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis, pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis, pengaturan kehadiran pegawai sesuai dengan kondisi *new normal* dengan pemberlakuan WFH (*work from home*) dan WAO (*work at office*), berkurangnya penerimaan sampel pihak ketiga (PNBP) serta optimalisasi sisa anggaran pengadaan reagensia media untuk pengadaan sarana prasarana pengujian.

Kendala yang dihadapi antara lain beberapa parameter uji menggunakan metoda analisa terbaru yang belum pernah diujikan di laboratorium, kurangnya anggaran suku cadang alat laboratorium sehingga beberapa kebutuhan suku cadang tidak dapat direalisasikan, meski demikian pada akhir tahun diadakan pengadaan suku cadang hasil optimalisasi sisa anggaran pengadaan reagensia kimia dan media mikrobiologi untuk menambah kekurangan suku cadang alat laboratorium; terlambatnya pengadaan reagen KIT dan beberapa suku cadang, sebagai contoh DON *preb* tidak tersedia dalam jangka waktu lama sebagai akibat diberlakukannya lockdown di beberapa negara produsen reagen KIT dan baku pembanding DON yang disebabkan oleh pandemi global covid-19; terbatasnya jumlah tabung gas khususnya tabung gas argon untuk pengujian logam dan terdapat personel penguji yang harus melakukan isolasi mandiri karena kontak dengan penderita covid-19, serta jumlah sampel yang

masuk ke laboratorium cukup banyak pada awal pemberlakuan WFH di pertengahan bulan Maret 2020 sehingga timeline pengujian tidak dapat terpenuhi.

Beberapa alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain :

- Koordinasi sampling dan pengujian yang lebih baik, dengan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian yang dikaji setiap bulan untuk menghindari sampel tidak dapat diuji tepat waktu akibat tidak tersedianya baku pembanding/reagensia kimia-media mikrobiologi atau sarana prasarana pendukung pengujian laboratorium
- Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat laboratorium yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan sampling, pemeriksaan, dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling, pemeriksaan, dan pengujian sesuai dengan target yang ditetapkan pada rencana pelaksanaan kegiatan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini pada tahun 2020 disebabkan oleh :

- Dengan adanya kondisi pandemi covid-19 pada tahun 2020, telah dilakukan *refocusing* anggaran untuk mengatasi pandemi covid-19. Salah satunya dengan dilakukan penurunan jumlah sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sebanyak 25% semula 752 sampel menjadi 564 sampel. Penurunan target output ini sejalan dengan perubahan sistem kerja, yaitu adanya sistem *work from home*. Pengaturan sistem kerja ini diatur sedemikian rupa sehingga jam kerja tetap efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan tercapainya indikator ini.
- Target yang ditetapkan untuk sampel yang diperiksa sesuai standar adalah 100% dengan realisasi sebesar 100,35% (566 sampel dari 564 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan 50%, namun realisasinya 78,80% (446 sampel dari 566 sampel yang diuji). Dari uraian ini terlihat bahwa sampel yang diuji capaiannya jauh melebihi target yang ditetapkan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, agar pemenuhan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dicapai maksimal, maka perlu penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium, selain itu juga pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada pedoman sampling, penambahan pembelian tabung gas untuk mengakomodir kebutuhan gas pengujian logam, melakukan identifikasi kebutuhan baku pembanding sesuai dengan pedoman sampling dan pemenuhan parameter uji kritis, peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara daring, pengaturan kehadiran pegawai terkait pandemi covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

7 Sasaran Kegiatan

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63	128,57	204,08	Tidak Dapat Disimpulkan

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15%
- Tahap I sebesar 40%
- P21 sebesar 30%
- Tahap 2 sebesar 15%

Nilai realisasi masing-masing tahapan adalah sebagai berikut :

a. $SPDP/nilai A = [(a+b+c+d)/total\ jumlah\ perkara\ yang\ ditangani]$

b. Tahap 1/nilai B = [(b+c+d)/total jumlah perkara yang ditangani]

c. P21/nilai C = [(c+d)/total jumlah perkara yang ditangani]

d. Tahap 2/nilai D = (d/total jumlah perkara yang ditangani)

(a adalah jumlah perkara pada tahapan SPDP, b adalah jumlah perkara pada tahapan "tahap 1", c adalah jumlah perkara pada tahapan P21, d adalah jumlah perkara pada tahapan "tahap 2")

Persentase Keberhasilan Penindakan = [(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)] x (jumlah capaian perkara/target perkara)

Perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga didalamnya tahapan SP3. Apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

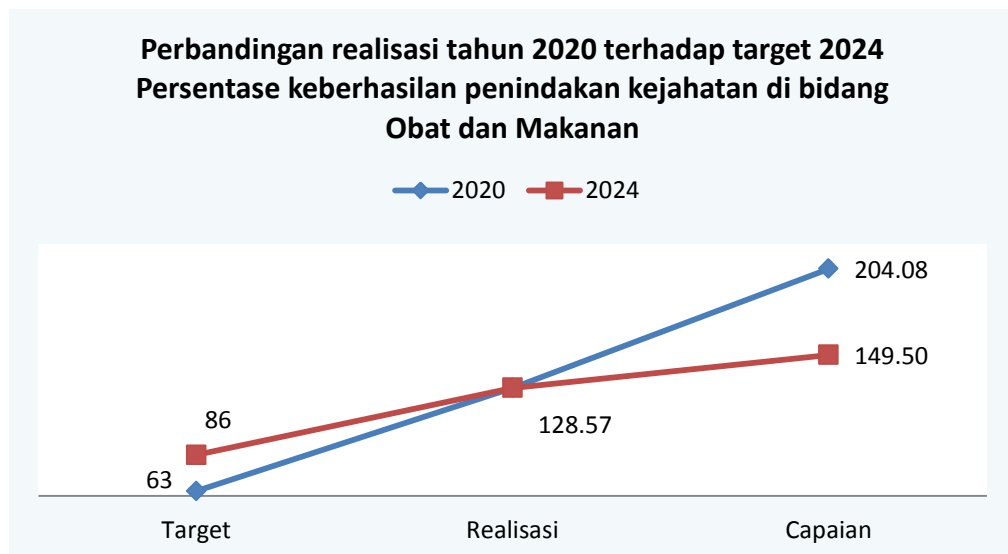
Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- Penyampaian SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I yaitu tahap Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- P21 yaitu Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum
- Tahap 2 yaitu tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Pada tahun 2020 realisasi perkara BBPOM di Palangka Raya sebanyak 9 perkara meliputi 7 perkara tahun berjalan (6 perkara di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dan 1 perkara di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat) dan 2 perkara *carry over* di wilayah Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tahapan dari 9 perkara tersebut sampai dengan akhir tahun 2020 seluruhnya sudah mencapai tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga jika dihitung menggunakan rumus diatas diperoleh persentase keberhasilan

penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 128,57%. Dengan capaian sebesar **204,08%** terhadap target 63% dengan kriteria **“tidak dapat disimpulkan”**. Kriteria capaian tahun 2020 tidak dapat disimpulkan disebabkan oleh realisasi jauh melebihi target yang ditetapkan, dimana 7 perkara tahun berjalan yang didapat dan ditangani berhasil diselesaikan sampai dengan tahap II di tahun 2020, termasuk juga dengan perkara *carry over*. Pencapaian ini merupakan keberhasilan dalam menyelesaikan target perkara yang sudah tercapai pada triwulan II. Pada triwulan III BBPOM di Palangka Raya mendapatkan tambahan 2 perkara dan mampu diselesaikan sampai tahap II sehingga realisasi perkara tahun berjalan menjadi 5 perkara, tambahan 2 perkara ini merupakan tindak lanjut informasi intelijen tentang tindak pidana obat dan makanan yang diperoleh dari UPT BPOM lain dan Direktorat Intelijen BPOM. Pada bulan Oktober dan Nopember 2020, BBPOM di Palangka Raya kembali mendapatkan tambahan 2 perkara dan dapat diselesaikan sampai tahap II, sehingga total perkara tahun berjalan yang berhasil ditangani dan diselesaikan sampai tahap II sebanyak 7 perkara, untuk itu perlu dilakukan pengkajian terhadap penetapan target tahun mendatang.

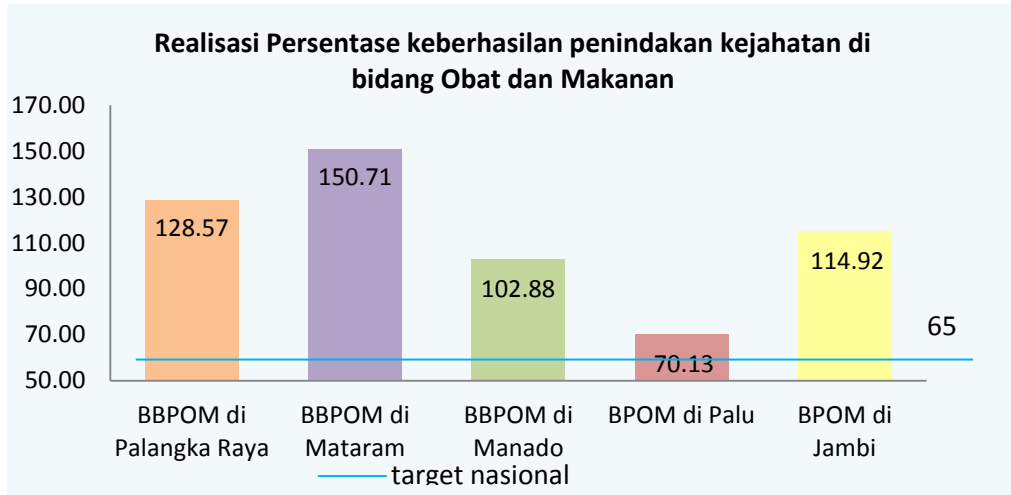
b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target yang ditetapkan pada tahun 2024 berdasarkan perubahan target pada penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, indikator sasaran kegiatan ini ditetapkan sebesar 86%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 149,50% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, untuk itu perlu dilakukan pengkajian kembali target

yang akan ditetapkan untuk tahun 2022-2024 dengan memperhitungkan kriteria penetapan kasus yang yang dapat ditindaklanjuti secara pro-justisia sehingga pada akhir tahun periode Rencana Strategis tahun 2024 dapat diperoleh capaian kinerja dalam kriteria sangat baik.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan rata-rata nasional**



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, BPOM di Palu dan BBPOM di Jambi **melebihi** target nasional yaitu 65%. Dari 5 UPT BPOM lain yang setara, 4 diantaranya yaitu BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado dan BPOM di Jambi memiliki capaian kinerja dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” dengan capaian tertinggi adalah BBPOM di Mataram, sedangkan kriteria capaian kinerja BPOM di Palu adalah “sangat baik”.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya tahun 2020 **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 204,08% dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Realisasi perkara pada tahun 2020 sebanyak 7 perkara dari target yang ditetapkan sebanyak 5 perkara, di mana 3 perkara didapatkan di triwulan IV yang merupakan

tindak lanjut informasi intelijen yang diperoleh dari Direktorat Intelijen Kedeputian IV BPOM.

- Koordinasi aktif dengan CJS terkait dengan penyelesaian perkara sehingga perkara dapat dinyatakan lengkap oleh JPU dan selanjutnya dapat dilakukan proses tahap II walaupun dalam kondisi pandemi covid-19 dengan tetap menjalankan prosedur dan protokol kesehatan
- Kegiatan patrol siber aktif dilaksanakan dalam masa pandemi covid-19
- Melakukan pendalaman informasi terkait informasi intelijen yang didapatkan baik dari patrol siber, informasi masyarakat maupun Direktorat Intelijen BPOM
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi maupun asosiasi/ Asperindo untuk membentuk jejaring dalam hal kegiatan intelijen dan penanganan perkara di bidang Obat dan Makanan
- Upaya pengendalian capaian output tidak lebih dari 100%. Pada awal triwulan IV dilakukan penyesuaian target perkara dari 3 perkara menjadi 5 perkara. Namun pada akhir tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya mendapatkan 2 perkara tambahan dan mampu menyelesaikannya sampai dengan tahap 2 sehingga realisasi output perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan terealisasi menjadi 7 perkara melebihi target yang baru saja disesuaikan, sehingga capaian indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan meningkat menjadi tidak dapat disimpulkan. Dua perkara tambahan di akhir tahun 2020 yang dapat diselesaikan tersebut tidak dapat diusulkan penyesuaian target output pada DIPA karena sudah melewati batas waktu pengajuan revisi target output.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ketujuh, yaitu “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya” dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 kegiatan, yaitu : Penyidikan Obat dan Makanan dan Dukungan teknis investigasi awal di bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi BBPOM di Palangka Raya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 pada tanggal 4 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan

penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.

1. Penyidikan Obat dan Makanan

Pada tahun 2020 jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan sebanyak 7 perkara yang kesemuanya telah diselesaikan sampai dengan tahap II.

Dari 7 perkara yang ditangani tersebut, taksiran nilai ekonomi barang bukti sebesar **Rp282.822.000** Dengan rincian nilai ekonomi barang bukti yang ditangani sebagaimana tabel berikut :

Jenis Barang Bukti	Nilai Taksiran Sitaan	
	Pro Justicia	Non Justicia
Pangan	-	-
Obat	Rp67.139.500	Rp4.199.000
Kosmetika	Rp211.422.500	
Obat Tradisional	Rp4.260.000	
Total	Rp282.822.000	Rp4.199.000
	Rp 287.061.000	

2. Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan

Kegiatan penyidikan di atas didukung dengan beberapa kegiatan antara lain :

- Kegiatan investigasi terhadap adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat, pengembangan kasus yang ditangani, penelusuran melalui media *online*/patrol siber maupun informasi intelijen yang diperoleh dari Direktorat Intelijen Kedeputian IV BPOM dan UPT lain. Pada tahun 2020 dilakukan kegiatan investigasi pada 27 sarana, dan dari rapat gelar kasus dilakukan operasi penindakan pada 8 sarana, 7 kasus ditindaklanjuti secara pro-justisia sedangkan 1 kasus ditindaklanjuti secara non justisia.

Pada proses investigasi awal dilakukan pengujian terhadap 3 sampel dengan perincian, 3 macam kosmetik dengan hasil sebagai berikut :

1. 2 sampel kosmetik Memenuhi Syarat
2. 1 sampel kosmetik Tidak Memenuhi Syarat

Tidak semua sampel investigasi dilakukan pengujian karena pembelian sampel dimaksudkan untuk memastikan adanya unsur tindak pidana terkait izin edar suatu produk dengan pemeriksaan penandaan.

- Peningkatan kompetensi PPNS dan staf penindakan

Kondisi pandemi covid-19 mengubah sistem peningkatan kompetensi, yang semula direncanakan dilaksanakan secara terpadu dengan Unit Kerja Pusat

dibatalkan diubah menjadi kegiatan peningkatan kompetensi dalam bentuk daring dan luring dengan peserta pejabat struktural/staf bidang/fungsi Penindakan BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :

- Pelatihan “Teknik Interogasi/Deteksi Perilaku Bohong Non Verbal Secara Tatap Muka” pada tanggal 27 Juli 2020
- Bimbingan Teknis “Teknik Dasar Intelijen” pada tanggal 12 Oktober 2020
- Koordinasi lintas sektor CJS (*Criminal Justice System*).
 - BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat aktif melakukan koordinasi terkait penanganan serta penyelesaian perkara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan *physical distancing* pada setiap kegiatan yang dilakukan.
 - BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan koordinasi dengan CJS meliputi unsur kepolisian (Polda Kalimantan Tengah dan jajaran Polres di kabupaten) sebagai pengembalian fungsi korwas PPNS, unsur kejaksaan baik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah maupun Kejaksaan Negeri di tiap kabupaten.
 - Koordinasi dilakukan pada setiap tahapan penyidikan dimulai dari tahapan investigasi sampai dengan perkara tersebut dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum/tahap P21 dan selanjutnya dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti/tahap II.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan I belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renja dengan kriteria “sangat kurang”, namun demikian BBPOM di Palangka Raya berhasil menyelesaikan 2 perkara yang sudah diterbitkan SPDP. Sedangkan capaian indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan II, III, dan IV masuk kriteria “tidak dapat disimpulkan”, hal ini disebabkan oleh perbedaan cara perhitungannya. Upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang antara lain :

- Mengkaji kembali penetapan target tahun-tahun mendatang sehingga dapat masuk dalam kriteria sangat baik
- Mengkaji kembali penetapan kriteria kasus yang bisa dinaikkan menjadi perkara/ditindaklanjuti secara pro justitia

8

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal

1. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	88	76,19	86,58	Cukup

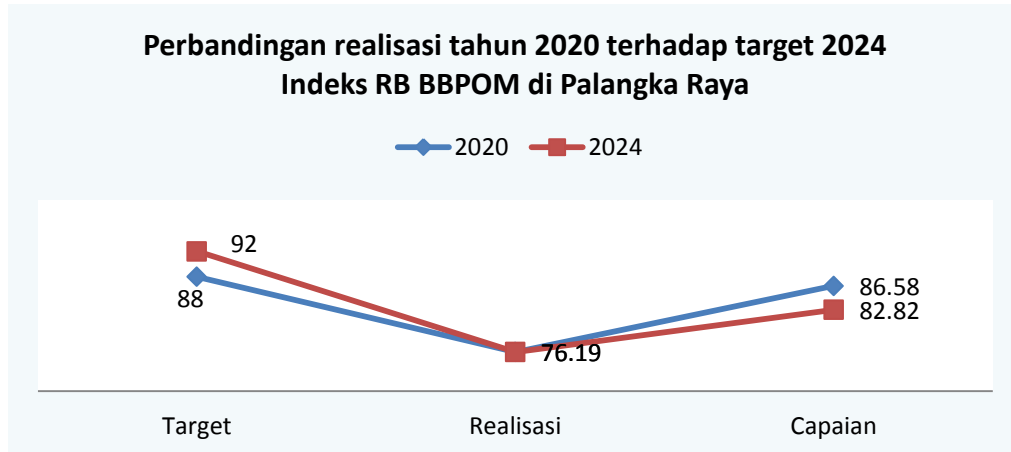
Indeks RB BBPOM di Palangka Raya diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Saker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tata laksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%). Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%). Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahana yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%).

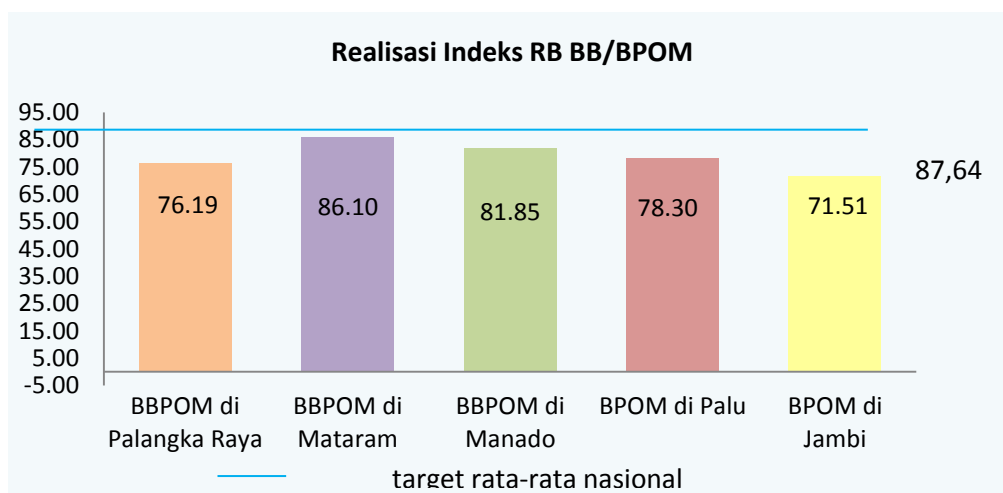
Penilaian indeks RB BBPOM di Palangka Raya dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan hasil 76,19 (capaian **86,58%**), belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 88 dengan kriteria “cukup”.

- a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Perbandingan realisasi kinerja indeks RB BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020 sebesar 76,19 dengan capaian 86,58% dari target 88 memerlukan lompatan capaian untuk mengejar realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan pada periode akhir Renstra tahun 2024 yaitu sebesar 92. Saat ini Indeks RB BBPOM di Palangka Raya berada pada persentase capaian 82,82 bila dihitung terhadap target Tahun 2024.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, dan BPOM di Palu berada dibawah target nasional 87,64. BBPOM di Mataram berada pada

urutan pertama, BBOM di Palangka Raya pada urutan ke-4 dan BPOM di Jambi berada pada urutan terakhir pada klaster yang sama.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks RB BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2020 berdasarkan penilaian Inspektorat Utama adalah sebesar 76,19 dengan capaian 86,58% dari target 88. Implementasi RB dibangun melalui program kerja pada tim ZI pada masing-masing pokja RB BBPOM di Palangka Raya meliputi Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Tata Laksana, Pokja Manajemen SDM, Pokja Akuntabilitas Kinerja, Pokja Sistem Pengawasan dan Pokja Pelayanan Publik.

- Area Manajemen Perubahan telah dibentuk Tim ZI dengan prosedur/mechanisme yang jelas, memiliki rencana Pembangunan ZI dan program prioritas, serta Pembangunan ZI melibatkan seluruh pegawai dan pimpinan telah berperan sebagai role model dan berkomitmen dalam Pembangunan ZI.
- Area Tata Laksana telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja unit yaitu Site Monelaku dan pemberian pelayanan kepada publik yaitu Aplikasi UMKM Harati serta terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap.
- Area Penataan Sistem Manajemen SDM melakukan kegiatan penempatan pegawai mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun dan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan training need analysis. Ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Capaian kinerja pegawai dimonitor secara periodik.
- Area Penguatan Akuntabilitas didukung oleh pimpinan yang terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja.
- Area Sistem Pengawasan telah melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi secara berkala, internalisasi Whistle Blowing System dan evaluasi atas penerapan WBS, serta identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.

- Area Pelayanan Publik telah mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu Si TiMO dan Pembinaan dan Grading Industri Rumah Tangga Pangan.

Berdasarkan hasil survei lapangan pada komponen hasil dari 30 responden diperoleh nilai IPP 3,33 (syarat 3,2) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB, namun nilai IPAK 3,46 (syarat 3,6) berada di bawah persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Adapun kendala dalam implementasi RB BBPOM di Palangka Raya antara lain belum melaksanakan monitoring dan evaluasi secara memadai terhadap Pembangunan ZI. Belum memiliki inovasi terkait Operasionalisasi manajemen SDM, aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, lingkungan pengendalian, pengaduan masyarakat berkadar pengawasan intern, *Whistle Blowing System* serta Kebijakan standar dan maklumat pelayanan. Belum menerapkan *reward and punishment* (sanksi) bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi kaitannya dengan perbaikan kinerja. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi belum memenuhi batas minimal survei WBK yang kemungkinan disebabkan faktor nonteknis kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai instrumen yang dipakai untuk survey. Petugas tidak memberikan pemahaman lebih dahulu mengenai butir-butir pertanyaan yang diberikan kepada responden sehingga responden memiliki persepsi yang tidak seragam dalam menjawab pertanyaan.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian indeks RB antara lain penguatan pemahaman budaya organisasi melalui internalisasi budaya organisasi PIKKIR yang dilakukan oleh perwakilan *agent of change*, peringatan HUT Badan POM dengan kegiatan bertema Reformasi Birokrasi meliputi lomba untuk mengasah inovasi, kreativitas dan aksi-aksi untuk menumbuhkan jiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Bimbingan teknis pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilaksanakan dengan narasumber dari Inspektorat II Badan POM RI untuk membangkitkan semangat dan pendampingan untuk capaian yang lebih optimal. Pemanfaatan media whatsapp group pegawai BBPOM di Palangka Raya untuk membagi pengetahuan dan informasi-informasi terkait pembangunan ZI. Hal tersebut

dilakukan untuk membentuk mental yang kuat supaya pegawai memahami dan menyadari pentingnya Reformasi Birokrasi.

Kegiatan selanjutnya adalah penyebarluasan dan pengenalan BBPOM di Palangka Raya kepada masyarakat termasuk informasi kegiatan/kinerja melalui berita aktual, infografis pada media sosial, media elektronik dan media cetak, ucapan hari besar keagamaan melalui TVRI Kalimantan Tengah, pemenuhan sarana prasarana penunjang layanan publik, penggunaan aplikasi dan pemanfaatan media online. Kampanye antigratifikasi dilakukan melalui banner yang diletakkan di tempat strategis dan mudah dibaca oleh seluruh pegawai dan peserta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya. Inovasi UMKM Harati dalam rangka fasilitasi/pendampingan registrasi bagi UMKM sangat optimal dimanfaatkan oleh masyarakat/komunitas yang mempunyai keterbatasan.

Kegiatan yang telah disampaikan diatas ternyata belum cukup untuk mencapai realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan namun BBPOM di Palangka Raya masih berkesempatan besar untuk mengejar target tersebut sampai dengan periode Renstra Tahun 2024. Hal-hal yang masih kurang optimal pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian diantaranya kurangnya monitoring dan evaluasi sejauhmana internalisasi reformasi birokrasi berdampak pada perilaku dan motivasi kerja pegawai, kurangnya inovasi pada tiap kelompok/area kerja reformasi birokrasi, belum dilakukannya perjanjian kerjasama atas inisiatif BBPOM di Palangka Raya yang dapat menunjang capaian indeks RB, kurangnya kualitas pelayanan publik dikaitkan dengan data sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak merata dan strategi penguatan akuntabilitas yang belum dipahami oleh sebagian besar pegawai.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan maka hal-hal yang akan menjadi prioritas dalam rangka perbaikan nilai Indeks Reformasi Birokrasi adalah:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI secara berkala dengan menunjukkan timeline realisasi, output, kendala dan hambatan, rencana aksi tindak lanjut termasuk bukti atas tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
- Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
- Mengimplementasikan kebijakan punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima.

- Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
- Membangun komunikasi efektif dengan pengguna layanan sehingga atas hal-hal yang belum baik yang dirasakan pengguna layanan dapat segera diperbaiki guna meningkatkan persepsi pengguna layanan terhadap indeks anti korupsi.
- Peningkatan dan Perkuatan Program Reformasi Birokrasi melalui Agen Perubahan.

2. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

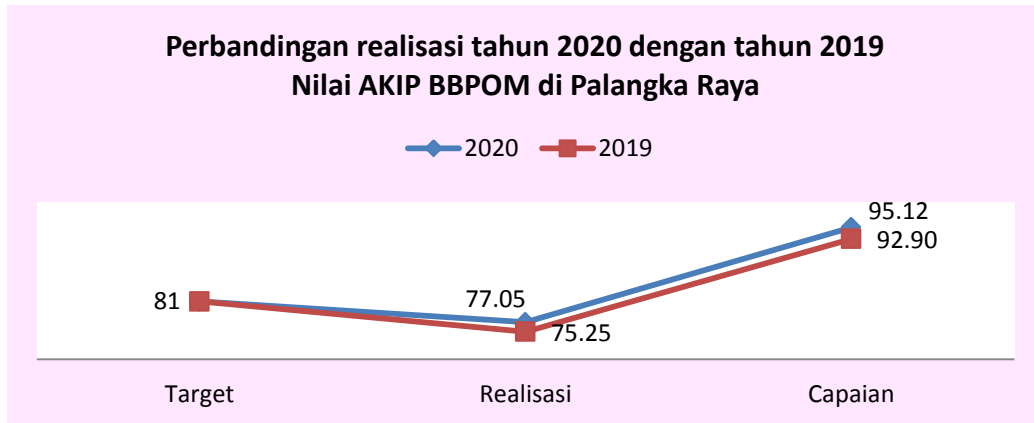
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	81	77,05	95,12	Baik

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Palangka Raya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dengan rentang sebagai berikut :

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90	AA	Sangat Memuaskan
> 80 sd 90	A	Memuaskan
> 70 sd 80	BB	Sangat Baik
> 60 sd 70	B	Baik
> 50 sd 60	CC	Cukup Baik
> 30 sd 50	C	Agak Kurang
< 30	D	Kurang

Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2020 dari hasil penilaian Inspektorat Utama adalah 77,05 (capaian **95,12%**) kriteria “**baik**” dengan kategori BB (Sangat Baik), belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 81 (kategori A/Memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Palangka Raya telah cukup akuntabel dan berkinerja baik, serta telah memiliki manajemen kinerja yang andal.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

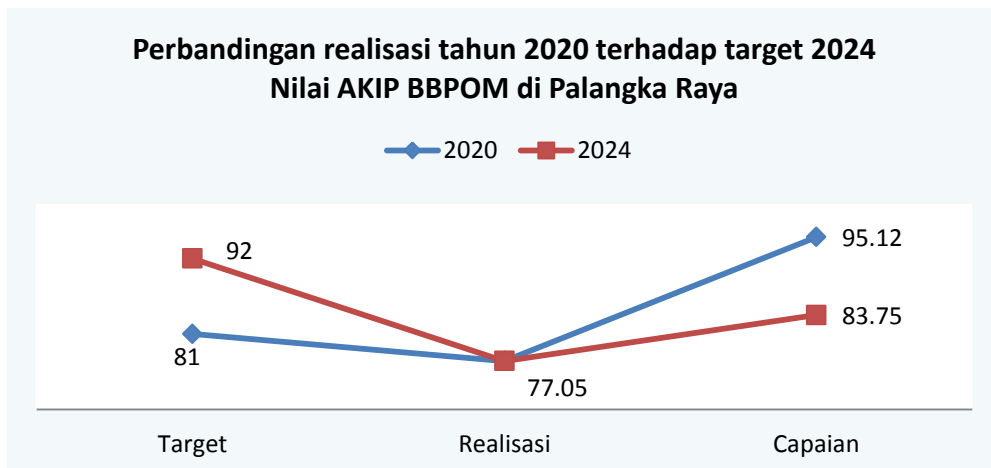


Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 2,22%. Perbandingan penilaian dalam 2 tahun berturut-turut adalah:

Komponen Penilaian AKIP	Bobot	Tahun 2020	Tahun 2019
Perencanaan Kinerja	30	25,61	26,59
Pengukuran Kinerja	25	18,13	16,88
Pelaporan Kinerja	15	11,32	11,20
Evaluasi Internal	10	7,64	6,99
Capaian Kinerja	20	14,35	13,59
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,05	75,25

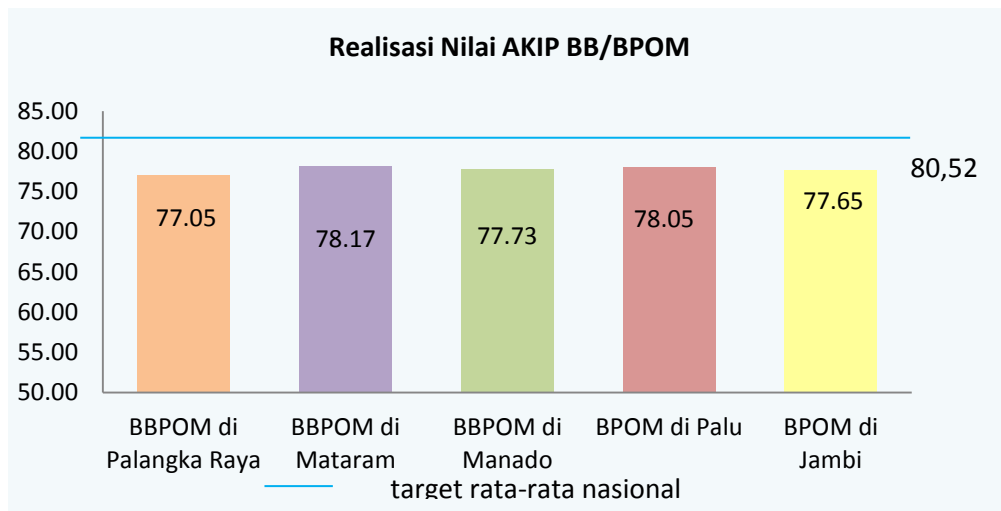
Capaian Tahun 2020 secara umum terlihat peningkatan pada nilai hasil evaluasi. Hal ini mencerminkan adanya upaya Balai Besar POM di Palangka Raya yang berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, namun masih perlu perbaikan dalam hal perencanaan kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Realisasi kinerja Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020 sebesar 77,05 dengan capaian 95,12% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 81, masih terdapat selisih capaian sebesar 14,95 poin dari target Tahun 2024 sebesar 92 dan saat ini Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya berada pada persentase capaian 83,75 bila dihitung terhadap target Tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya (77,05), BBPOM di Mataram (78,17), BBPOM di Manado (77,73), BPOM di Palu (78,05) dan BPOM di Jambi (77,65) setara namun seluruhnya masih dibawah rata-rata nasional 80,52. Capaian tertinggi dalam 1 klaster adalah BBPOM di Mataram dan Capaian terendah BBPOM di Palangka Raya dengan selisih nilai 1,12 dari nilai tertinggi (BBPOM di Mataram).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penilaian AKIP BBPOM di Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 dikategorikan BB atau Sangat Baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun masih memerlukan perbaikan. Aspek yang mengalami peningkatan adalah pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan capaian, sedangkan aspek perencanaan mengalami penurunan.

- Aspek Perencanaan: pada dokumen Renstra telah memuat penjabaran masing-masing tujuan terhadap sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator keberhasilan. Rumusan sasaran strategis telah berorientasi pada hasil dan

dipetakan melalui indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja tahunan dan rencana aksi.

- Aspek Pengukuran: Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dituangkan dalam SOP serta SK Kepala Balai terkait Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja, telah ditetapkan target kinerja atas perjanjian kinerja eselon III dan IV sampai ke tingkat individu.
- Aspek Pelaporan: Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.
- Aspek Evaluasi Internal: Pemanfaatan informasi kinerja disajikan berupa rekomendasi pada LAKIP periode sebelumnya.
- Aspek Capaian: Komparansi secara umum capaian kinerja pada Balai Besar POM di Palangka Raya pada prinsipnya lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Hal-hal yang masih perlu dilakukan perbaikan adalah:

- Aspek Perencanaan: rumusan sasaran strategis telah berorientasi pada hasil dan dipetakan melalui indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja tahunan dan rencana aksi, namun pada rencana aksi yang mencantumkan sub kegiatan/komponen secara rinci yang akan dilakukan belum diformalkan. Selain itu, belum terdapat dokumen penentuan target kinerja berdasarkan data yang memadai serta kajian analisis yang logis. Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Palangka Raya juga belum dipublikasikan.
- Aspek Pengukuran: belum terdapat tugas dan fungsi secara jelas peran Tim Monev dalam pengumpulan data kinerja serta belum tergambar pada SOP. Cascading indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai belum sepenuhnya selaras. Hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment
- Aspek Pelaporan: penyusunan Laporan Kinerja interim per triwulan belum tepat waktu dan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja belum maksimal digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.
- Aspek Evaluasi Internal: pemanfaatan informasi kinerja yang disajikan berupa rekomendasi pada LAKIP periode sebelumnya belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.
- Aspek Capaian: masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan dan capaian yang tidak dapat disimpulkan.

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM di Palangka Raya telah menyusun Renstra 2020-2024 yang memuat penjabaran tujuan terhadap sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator keberhasilan. Rumusan sasaran strategis telah berorientasi pada hasil dan dipetakan melalui indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja tahunan dan rencana aksi namun pada rencana aksi yang mencantumkan sub kegiatan/komponen secara rinci yang akan dilakukan belum diformalkan, indikator kinerja utama (IKU) telah diformalkan dan dipublikasikan melalui subsite pom.go.id namun belum dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat disebabkan terbatasnya kapasitas dan kurang optimalnya pengelolaan subsite.

Pengumpulan data kinerja yang dituangkan dalam SOP serta SK Kepala Balai terkait Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja, telah ditetapkan target kinerja atas perjanjian kinerja eselon III dan IV sampai ke tingkat individu masih perlu penjelasan tugas dan fungsi masing-masing anggota Tim dan tergambar dalam SOP. *Cascading indikator* kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai belum sepenuhnya selaras. Reward and punishment belum diberlakukan sebagai tindak lanjut hasil pengukuran dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja namun penyusunan Laporan Kinerja interim per triwulan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan reuiu target kinerja belum tepat waktu sehingga berpengaruh pada proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sebagai akibat berikutnya adalah beberapa capaian kinerja tidak optimal dan tidak dapat disimpulkan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian, BBPOM di Palangka Raya akan melakukan langkah sebagai berikut:

- Aspek Perencanaan: menetapkan rencana aksi yang mencantumkan subkegiatan /komponen secara rinci. Melakukan kajian analisis logis sebagai dasar penentuan target kinerja. Mempublikasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Palangka Raya agar dapat diakses oleh semua pegawai, lintas sektor dan masyarakat.

- Aspek Pengukuran: Menetapkan tugas dan fungsi Tim Money secara jelas dalam pengumpulan data kinerja dan mencantumkan dalam SOP. Memperbaiki cascading indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai agar selaras. Hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja akan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment. Menetapkan jenis reward and punishment yang akan diberlakukan berdasarkan kesepakatan dan komitmen seluruh pegawai.
- Aspek Pelaporan: penyusunan Laporan Kinerja interim per triwulan dilakukan tepat waktu dan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja digunakan secara maksimal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.
- Aspek Evaluasi Internal: pemanfaatan informasi kinerja yang disajikan berupa rekomendasi pada LAKIP periode sebelumnya akan dilakukan monitoring untuk memberikan hasil yang maksimal dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.
- Aspek Capaian: menetapkan strategi dan reviu serta monitoring untuk mencapai target indikator dengan optimal dan dapat disimpulkan.

9

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	75	82,50	110	Sangat Baik

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil survey menggunakan form survey sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks

Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30%; dan disiplin memiliki bobot 5%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

Nilai Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN	Kategori
91 – 100	Sangat Tinggi
81 – 90	Tinggi
71 – 80	Sedang
61 – 70	Rendah
0 – 60	Sangat Rendah

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020 berdasar desk hasil survei Badan POM adalah 82,50 dari target yang ditetapkan sebesar 75 dengan capaian 110% yang diperoleh dari jumlah indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi total jumlah pegawai BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya telah mencapai target yang ditetapkan sebesar **110%** dengan kriteria **“sangat baik”**.

- a. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024**

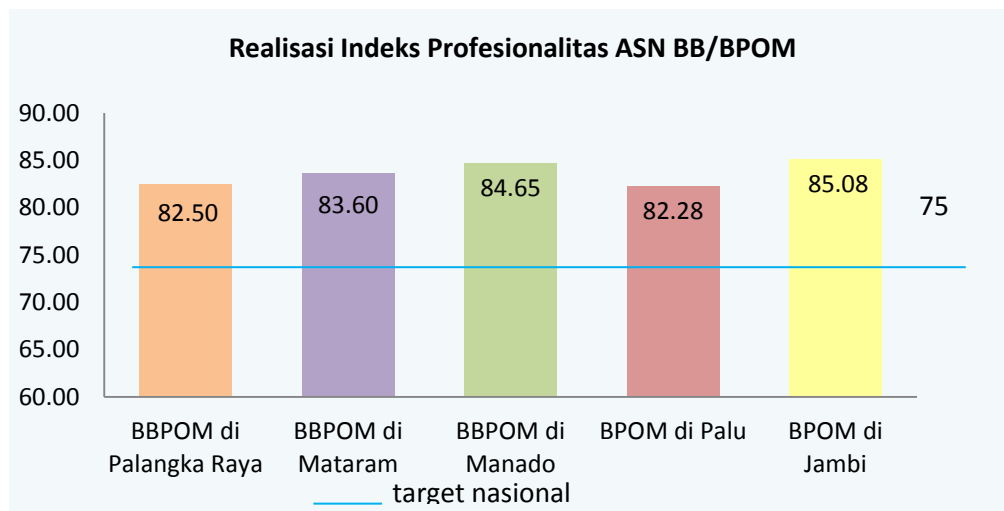


Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020 sebesar 82,50 (capaian 110%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 sebesar 85 menghasilkan capaian 97,06% dengan kriteria baik. Target yang ditetapkan sampai

dengan periode akhir Renstra masih dapat dipertahankan dengan penetapan strategi pencapaian yang optimal.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator baru pada Renstra 2020-2024 namun pada tahun 2019 telah dilakukan pula perhitungan indeks profesionalitas ASN, BBPOM mengalami peningkatan capaian Tahun 2020 sebesar 10% dibanding Tahun 2019.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN pada BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, dan BPOM di Palu berada diatas target nasional 75. BBPOM di Jambi berada pada urutan pertama, BBOM di Palangka Raya pada urutan ke-4 dan BPOM di Palu berada pada urutan terakhir pada klaster yang sama.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks profesionalitas ASN dapat digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai/ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Selama tahun 2020 telah ditetapkan setiap pegawai mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran yang meliputi pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial, pengembangan diri (*softskill*), workshop dan sosialisasi yang menunjang butir uraian kegiatan. Telah dilakukan pula pengembangan kompetensi melalui tugas belajar bagi pegawai yang potensial dan mempunyai motivasi untuk mengembangkan

diri untuk meraih jenjang yang lebih tinggi. Tercatat 5 dari 7 pegawai dengan kualifikasi pendidikan D3 telah dan sedang menjalani tugas belajar. Dalam waktu 1 tahun, pegawai BBPOM di Palangka Raya rata-rata mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 101 jam pelajaran. Hal ini menunjukkan komitmen unit kerja dan pegawai dalam hal peningkatan kompetensi dan peningkatan indeks profesionalitas ASN untuk mewujudkan SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal. BBPOM di Palangka Raya juga melakukan rencana aksi lain untuk mendukung pencapaian target indikator indeks profesionalitas ASN Tahun 2020 yaitu pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara,

Beberapa hal yang masih memerlukan peningkatan untuk mencapai nilai indeks profesionalitas ASN yang lebih optimal adalah kurangnya keikutsertaan pejabat struktural mengikuti diklat kepemimpinan, sebelum dilakukan penyetaraan pejabat struktural ke fungsional, hanya 2 orang dari 12 orang pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jabatan/eselon yang diduduki. Dengan berlakunya SOTK baru dan dengan penyetaraan sebagian besar jabatan struktural ke jabatan fungsional, nilai indeks profesionalitas ASN diharapkan akan mengalami peningkatan. Selain itu, masih terdapat pegawai dengan kualifikasi pendidikan SMA sederajat sebanyak 22% dari total pegawai sehingga turut berkontribusi terhadap pencapaian indeks profesionalitas yang belum optimal.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Motivasi pegawai untuk mendapatkan pengembangan kompetensi berasal dari kebutuhan atas pemenuhan standar kompetensi dan target yang telah ditetapkan pada setiap pegawai yang tercantum pada SKP dimana minimal mengikuti 20 jam pelajaran pengembangan kompetensi dalam waktu 1 tahun. Tuntutan penilaian Indeks RB dan optimalisasi pengelolaan SDM mendorong untuk dilakukannya pengembangan kompetensi yang lebih variatif. BBPOM di Palangka Raya selama tahun 2020 telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi baik teknis maupun non teknis (manajerial/softskill) diantaranya pelatihan terkait laboratorium, pelayanan publik, peningkatan kemampuan intelijen dan pengawasan, serta ketatausahaan.

Peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai BBPOM di Palangka Raya telah dilakukan baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar. Beberapa pegawai melakukan peningkatan kompetensi meningkatkan kualifikasi pendidikan sebelum mendapatkan ijin belajar resmi dari Badan POM (PPSDM) sehingga meskipun telah memiliki ijazah

Sarjana namun belum dapat diakui peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai tersebut.

Pada kriteria Penilaian Kinerja, BBPOM di Palangka Raya mendapatkan kontribusi nilai sebesar 83,33% (nilai 25 dari maksimal bobot 30) yaitu seluruh pegawai mendapatkan penilai SKP dengan predikat Baik. Penilaian “sangat baik” belum pernah diberikan kepada pegawai BBPOM di Palangka Raya. Berkaitan dengan hal ini perlu dilakukan dorongan motivasi kepada seluruh pegawai agar dapat memberikan kinerja yang luar biasa sehingga mendapatkan penilaian kinerja melalui penilaian SKP dengan nilai diatas 91 (sangat baik). Pejabat penilai juga diharapkan dapat menilai secara lebih obyektif dan benar-benar dapat melihat dan mengamati kinerja semua pegawai yang dinilai.

Kehadiran apel disiplin pada hari peringatan yang telah ditetapkan dilakukan dengan tertib oleh pegawai dan pelaporan dilakukan tepat waktu sehingga tidak mengakibatkan jatuhnya hukuman disiplin yang dapat menurunkan nilai indeks profesionalitas ASN. Demikian juga hukuman disiplin ringan, sedang dan berat belum pernah dijatuhkan kepada pegawai BBPOM di Palangka Raya selama tahun 2020 sehingga 100% pegawai mendapat penilaian maksimal dalam hal kedisiplinan sebagai salah satu kriteria penilaian indeks profesionalitas ASN.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan pembahasan diatas, maka rekomendasi perbaikan pada tahun berikutnya akan diprioritaskan terhadap peningkatan kualifikasi pendidikan, peningkatan kompetensi pejabat struktural dan fungsional serta mendorong pegawai untuk berkinerja lebih baik lagi dengan output lebih yang secara nyata diberikan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan dirasakan manfaatnya secara langsung baik terhadap individu pegawai, maupun terhadap capaian indikator yang didukungnya. Kualifikasi pendidikan yang diakui dalam perhitungan indeks profesionalitas ASN oleh Badan POM hendaknya mempertimbangkan jenjang pendidikan yang telah diraih oleh pegawai dengan dibuktikan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Peningkatan kedisiplinan pegawai melalui inovasi pengelolaan manajemen SDM yang dapat mendukung pembangunan Zona Integritas BBPOM di Palangka Raya.

10

Sasaran Kegiatan

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	70,80	84,29	Cukup

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh nilai assessment Pusat Pengembangan Obat dan Makanan Nasional.

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium BPOM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di BPOM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium BPOM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP), hasil uji profisiensi yang inlier, hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan

dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%. Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Ruang Lingkup apabila hasil penilaiannya lebih dari 65%.

2) Penilaian Standar Kompetensi

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervise tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

- a. Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat dalam Formulir Informasi Kompetensi. Hasil dinyatakan dalam bentuk persen (%).
- b. Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
- c. Hasil rekapitulasi masing-masing laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Kompetensi apabila hasil penilaiannya lebih dari 75%.

3) Penilaian Standar Peralatan

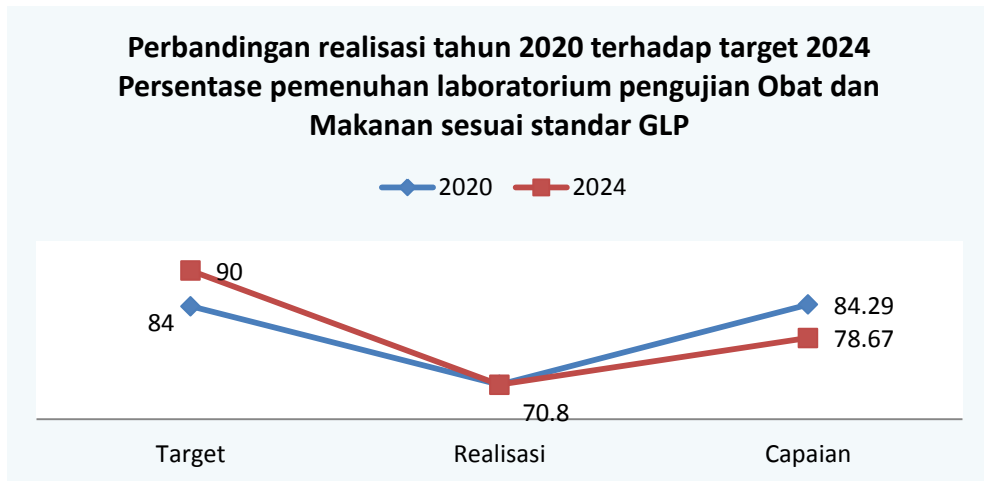
- a. Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
- b. Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
- c. Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Peralatan apabila hasil penilaiannya lebih dari 70%.

Hasil penilaian ketiga parameter tersebut diatas kemudian dirata-ratakan, dan menjadi nilai capaian indikator. Pada tahun 2020 penilaian terhadap pemenuhan standar SKL dilaksanakan pada bulan November oleh PPPOMN secara daring. Hasil penilaian tersebut diperoleh persentase pemenuhan laboratorium obat dan makanan

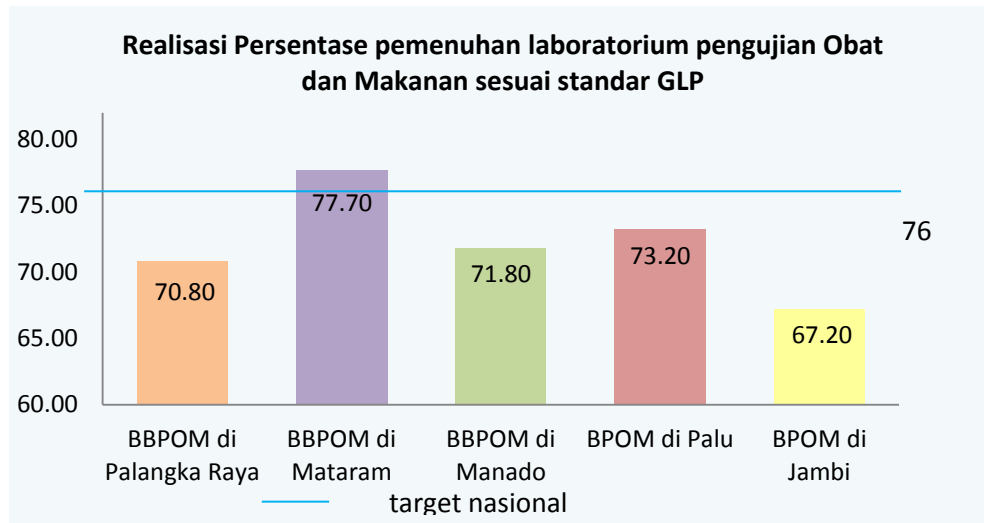
sesuai standar GLP sebesar 70,80% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 84%, dengan capaian sebesar **94,37%** dengan kriteria “cukup”.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target yang ditetapkan pada tahun 2024 berdasarkan perubahan target pada penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, indikator sasaran kegiatan ini ditetapkan sebesar 90%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 78,67% dengan kriteria kurang. Realisasi indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2020 (70,8) masih jauh berada dibawah target jangka menengah tahun 2024 (90) sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap target yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung penilaian pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium. Pada tahun 2024 diharapkan capaian indikator kegiatan ini diatas 100% dengan kriteria baik, untuk itu selain dilakukan penyesuaian target juga perlu dilakukan penyusunan strategi baru untuk meningkatkan capaian kinerja terhadap target baru yang ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan Grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Palangka Raya belum mencapai target Nasional yaitu sebesar 76% bersama dengan UPT BPOM lain yang setara yaitu BBPOM di Manado, BPOM di Palu dan BPOM di Jambi. BBPOM di Mataram berhasil mencapai target nasional dengan realisasi tertinggi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2020 terjadi penurunan terhadap persentase pemenuhan standar GLP sebesar 12% jika dibandingkan dengan persentase pemenuhan tahun 2019 (82,8%), hal ini disebabkan adanya perubahan *tools* standar penilaian yang baru disosialisasikan di bulan November 2020, yaitu Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium maupun standar Kompetensi Personel Laboratorium yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor. HK.02.01.1.2.11.20.114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan *tools* ini merupakan salah satu penyebab ketidakberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan pada saat penetapan target pemenuhan standar ruang lingkup menggunakan *tools* yang lama, sedangkan pengukuran menggunakan *tools* yang baru. Perbedaan standar penilaian ini antara lain :

- Standar Ruang lingkup
 - ✓ SRL Komoditi Obat Napza

Perbedaan penilaian pada tahun 2020 yaitu pengujian dengan Ruang lingkup yang spesifik berdasarkan pelaksanaan sampling di masing-masing UPT BPOM. Ruang Lingkup pengujian dihitung sesuai dengan jumlah sampel yang diuji pertahun serta mempertimbangkan profil obat beredar di wilayah masing-masing UPT BPOM.

✓ SRL Komoditi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Perbedaan penilaian pada tahun 2020 antara lain adanya penambahan Metode Analisa (MA) PPPOMN dalam standar penilaian, serta penghapusan bahan kimia yang tidak lagi ditemukan di produk Obat Tradisional yang lebih dari 10 tahun tidak pernah ditemukan hasil uji TMS sehingga tidak tercantum dalam Pedoman Sampling.

✓ SRL Komoditi Pangan

Perbedaan penilaian pada tahun 2020 antara lain adanya penambahan MA PPPOMN dalam standar penilaian.

✓ SRL Pengujian Mikrobiologi

Perbedaan penilaian pada tahun 2020 antara lain adanya penambahan Uji Molekuler pada standar penilaian, dan penambahan parameter baru sesuai standar yang terbit tahun 2019.

• Standar Alat Laboratorium

Pada tahun 2020 standar peralatan dibagi atas 4 kelompok UPT BPOM berdasarkan total jumlah sampel Obat dan Makanan antara lain Kelompok 1: Balai Besar POM dengan jumlah sampel > 3000; Kelompok 2: Balai Besar/ Balai POM dengan jumlah sampel 2000-3000; Kelompok 3: Balai POM dengan jumlah sampel 1000-2000; Kelompok 4: Balai POM dengan jumlah sampel < 1000. Penilaian juga memperhitungkan rencana regionalisasi laboratorium serta penambahan peralatan dengan teknologi yang lebih mutakhir.

• Standar Kompetensi Personel Laboratorium

Adanya perubahan terhadap penyusunan standar kompetensi yaitu penambahan kompetensi terkait kalibrasi dan verifikasi peralatan, kompetensi dalam hal pelaksanaan uji profisiensi, keterampilan sebagai provider uji banding antar laboratorium atau provider Uji Profisiensi untuk pengujian Kimia. Pengetahuan dan keterampilan pengujian biologi molekuler, pengetahuan terkait validasi dan verifikasi metode, pengetahuan pengujian berbasis antigen-antibodi, pengujian sterilitas dan potensi antibiotik, pengetahuan terkait provider uji banding dan uji kolaborasi.

Selain terjadinya perubahan *tools* pengukuran yang baru disosialisasikan pada bulan November 2020, ketidakberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan juga oleh beberapa hal, antara lain :

- Keterbatasan anggaran dalam pengadaan sampel, baku pembanding, reagen untuk penambahan ruang lingkup pengujian. Ketersediaan baku pembanding di PPPOMN yang terbatas menyebabkan pengadaan baku pembanding dilakukan secara mandiri dan memerlukan anggaran yang cukup besar terutama untuk baku pembanding turunan Sildenafil.
- Kurang bervariasinya jenis produk yang disampling tiap tahun serta beberapa parameter uji yang masuk dalam standar ruang lingkup namun tidak tercantum dalam prioritas sampling sehingga pengujian terhadap parameter tersebut tidak lagi dilakukan.
- kompetensi personil laboratorium masih kurang dalam melakukan pengujian parameter uji baru serta melakukan verifikasi metode. Beberapa kegiatan pengembangan kompetensi seperti pelatihan internal tidak dapat terlaksana akibat adanya pandemi covid-19 sehingga pemenuhan pengembangan kompetensi personil tidak dapat tercapai dengan maksimal.
- Adanya *refocusing* anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi covid-19 serta dibatalkannya beberapa kegiatan bimbingan teknis. Kompetensi personel hanya terbatas pada peralatan yang dimiliki oleh laboratorium. Beberapa personil penguji belum pernah mengikuti pelatihan keterampilan pengujian dasar secara resmi sehingga belum dapat diakui kompetensinya meskipun telah memiliki kompetensi dalam pengujian tingkat yang lebih tinggi.

Beberapa alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain :

- Mengkaji kembali penetapan target indikator untuk tahun mendatang disesuaikan dengan tools penilaian yang baru
- Untuk meningkatkan persentase pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) dilakukan rencana tindak lanjut : 1) membuat *roadmap* pemenuhan SRL selama 5 tahun (tahun 2020-2024); 2) membuat perencanaan sampling (sampel targeted) sesuai dengan *roadmap* yang telah dibuat dan mengkomunikasikannya dengan fungsi pemeriksaan; 3) membuat perencanaan kebutuhan reagen dan baku pembanding untuk pemenuhan perencanaan sampling diatas; 4) melakukan pemutakhiran metode pengujian; dan 5) melakukan monitoring pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat.

- Untuk meningkatkan persentase pemenuhan standar kompetensi dilakukan rencana tindak lanjut : 1) membuat *roadmap* pemenuhan standar kompetensi selama 5 tahun (tahun 2020-2024); 2) membuat perencanaan peningkatan kompetensi sesuai dengan *roadmap* yang telah dibuat (Bimtek internal dan eksternal, pendampingan personil); dan 3) melakukan monitoring pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat.
- Untuk meningkatkan persentase pemenuhan standar peralatan dilakukan rencana tindak lanjut : 1) perencanaan pembangunan (renovasi) fasilitas laboratorium pengujian kimia dan pengujian mikrobiologi dan pengadaan peralatan pendukung untuk pengujian DNA/RNA; 2) membuat *roadmap* pemenuhan peralatan sesuai standar selama 5 tahun (tahun 2020-2024); 3) membuat perencanaan peralatan sesuai dengan *roadmap* yang telah dibuat dan mengkomunikasikannya dengan P3OMN; 4) melakukan monitoring pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat; dan 5) perencanaan pengembangan laboratorium yang dimulai dengan pembuatan master plan laboratorium pengujian BBPOM di Palangka Raya.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pemenuhan persentase Pemenuhan standar GLP di tahun 2020 yang dapat dilaksanakan antara lain :

- Kegiatan verifikasi Metode Analisa sebanyak 19 metode yang bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil uji yang dilaporkan valid dan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Uji Profisiensi sebanyak 12 kegiatan dan Uji Kolaborasi sebanyak 2 kegiatan serta Uji Banding antar UPT BPOM sebanyak 1 kegiatan.
- Penerapan sistem Manajemen Mutu terintegrasi ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 secara konsisten.
- Pelaksanaan kegiatan Kalibrasi oleh Balai Kalibrasi PPPOMN dan Kalibrasi eksternal alat ukur ke Balai Kalibrasi eksternal.
- Kegiatan bimbingan teknis internal Laboratorium sebanyak 6 kegiatan antara lain validasi dan verifikasi metode dan Integrasi Dokumen ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017, Kegiatan Bimbingan teknis DNA Spesifik Spesies yang dilakukan secara daring, Pelatihan Pengembangan Kemampuan Laboratorium Pengujian Pangan yang dilaksanakan di PPPOMN pada bulan Maret 2020, dan Pelatihan

Pengembangan kemampuan Laboratorium Pengujian Obat yang dilaksanakan secara daring pada bulan September 2020.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan maka hal-hal yang akan menjadi prioritas dalam rangka perbaikan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah :

- Melakukan pemetaan terhadap alat laboratorium yang dimiliki dan kebutuhannya berdasarkan kajian efektivitas bukan hanya berfokus pada kebutuhan peralatan yang belum dimiliki.
- Perencanaan pengadaan peralatan laboratorium secara spesifik disesuaikan dengan penetapan regionalisasi laboratorium.
- Membuat program pengembangan kompetensi yaitu pelatihan terstruktur dengan melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan yang spesifik.
- Melakukan pemetaan terhadap alat laboratorium agar sesuai dengan kajian efektivitas tidak berfokus pada kebutuhan peralatan yang belum dimiliki.
- Menambah anggaran pengadaan suku cadang alat laboratorium seiring dengan penambahan alat setiap tahunnya.
- Penerapan sistem Manajemen Mutu terintegrasi ISO 9001 : 2015 dan ISO/IEC 17025 :2017 secara konsisten.
- Melakukan pemetaan terhadap resiko yang dapat menghambat pemenuhan standar GLP sehingga resiko yang ada dapat dimitigasi dan dikendalikan.

2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	1,51	1,425	94,37	Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal diperoleh nilai asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

Indeks pengelolaan data dan informasi	Kategori
2.26-3	Optimal
1,51-2.25	Cukup
0.76-1.5	Kurang Optimal
0-0.75	Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

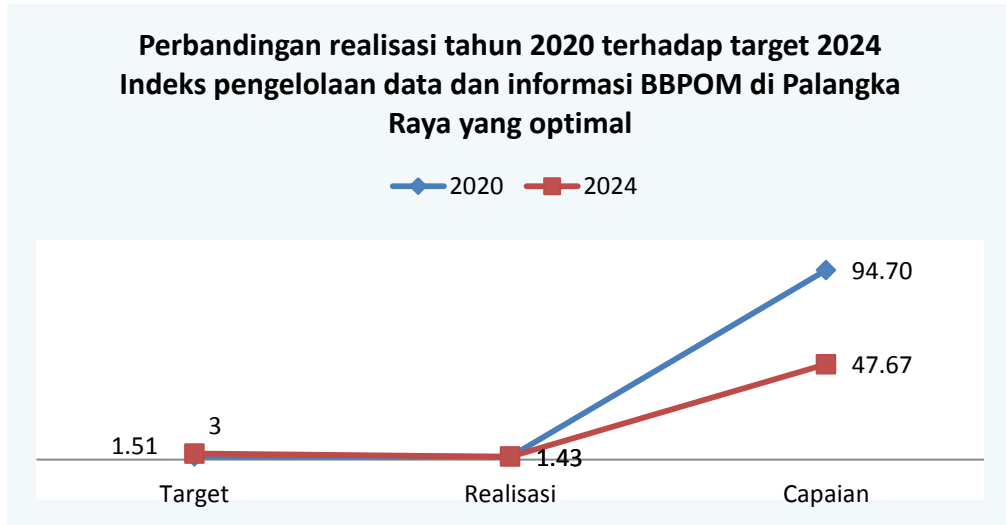
Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan Obat dan Makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Sistem informasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja terdiri dari pemanfaatan email, pemanfaatan *sharing folder*, pemanfaatan *dashboard* BCC, dan pemberitaan kegiatan melalui berita aktual pada subsite balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian maupun individu.

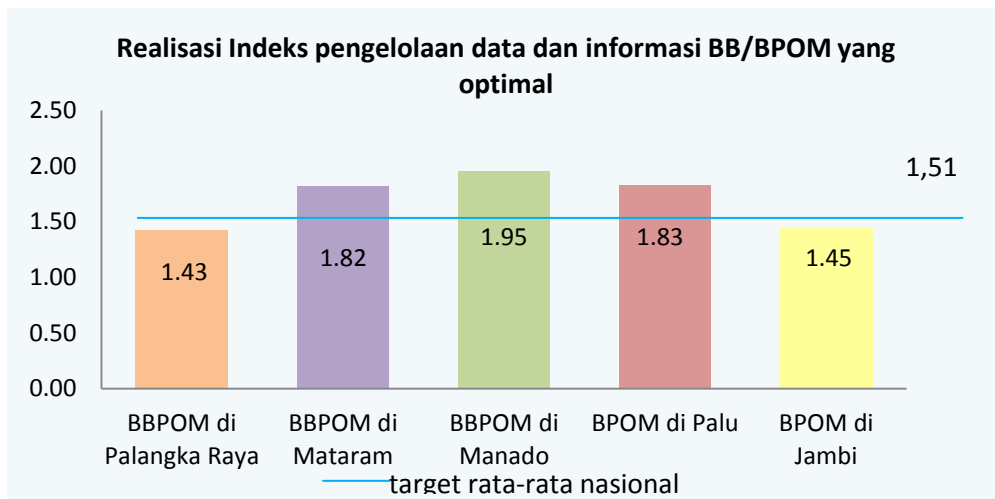
Pada tahun 2020 telah diperoleh nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Nasional sebesar 1,425, setara dengan 1,43. masuk dalam kategori “cukup optimal” dengan capaian indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu **94,37%** dengan kriteria “**baik**”.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah 3. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 47,5% dengan kriteria kurang. Realisasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya tahun 2020 (1,43) masih jauh berada di bawah target jangka menengah tahun 2024 (3) sehingga perlu disusun langkah-langka strategis dalam mengawal kegiatan pendukung capaian indikator serta dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi indikator setiap bulan untuk mengkaji strategi yang telah dilaksanakan dan menyusun strategi baru untuk mempercepat peningkatan capaian kinerja terhadap indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BB/BPOM yang optimal BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, dan BPOM di Palu berada diatas target nasional 1,51, sedangkan BBOM di Palangka Raya dan BPOM di Jambi mempunyai realisasi dibawah target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator pada tahun 2020 1,43 kurang dari target 1,5 yang telah ditetapkan dengan kriteria baik. Hal ini dipengaruhi oleh nilai data informasi yang dimutakhirkan masih rendah yang disebabkan oleh pengisian SIPT pada akhir tahun 85,7%. *Breakdown* terhadap masing-masing nilai pada kriteria pemutakhiran data dan informasi serta pemanfaatan sistem informasi sebagai berikut :

Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC		Indeks pemanfaatan system informasi BPOM			
Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKer	Pemanfaatan email	Pemanfaatan sharing folder	Dashboard BCC	Berita aktual
1.6	0	2	1	0	2
Nilai tertinggi 2.4	Nilai tertinggi 0.6	Nilai tertinggi 3	Nilai tertinggi 3	Nilai tertinggi 2	Nilai tertinggi 3

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya nilai indeks ini, antara lain :

- Pemutakhiran SIPT

Pemutakhiran SIPT didukung oleh pelaporan pengujian sampel dan pemeriksaan sarana melalui SIPT, sampai batas waktu penarikan data, pelaporan SIPT yang telah dilaporkan sebanyak 2068 laporan dari 2413 laporan yang ditargetkan yaitu sebesar 85,7% yang masuk kategori kurang dimanfaatkan hal ini disebabkan antara lain oleh monitoring dan evaluasi pemutakhiran data SIPT belum berjalan dengan baik; kegiatan pemeriksaan sarana dan sampling sampel dan pengujian sampel baru mulai berjalan intensif di triwulan III dan IV; penumpukan jumlah sampel yang diuji terjadi di triwulan IV dan jumlah SDM pemeriksaan dan pengujian yang terbatas mempengaruhi keterlambatan pemutakhiran laporan SIPT.

- Pemutakhiran SPIMKer

Pemutakhiran SPIMKer merupakan pemutakhiran informasi kasus keracunan/kejadian luar biasa keamanan pangan yang terjadi di wilayah kerja

BBPOM di Palangka Raya, bekerjasama dengan rumah sakit untuk mengisi data kasus keracunan dan UPT BPOM melakukan verifikasi data tersebut. Nilai pemutakhiran SPIMKer BBPOM di Palangka Raya 0 hal ini disebabkan oleh data yang terverifikasi sepanjang tahun 2020 sebanyak 45 atau sebesar 45% masuk kategori tidak dimanfaatkan, hal ini disebabkan pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan koordinasi dengan rumah sakit untuk memutakhirkan data dikarenakan pandemic covid 19.

- Pemanfaatan email

Pemanfaatan email *corporate* individu maupun unit dalam mendukung kinerja organisasi. Dari total akun individu dan unit sebanyak 55, total akun yang aktif dan login sebanyak 31 akun atau sebesar 56% memberikan nilai pemanfaatan email BBPOM di Palangka Raya 2 yang artinya telah dimanfaatkan. Pada akhir tahun 2020, BBPOM di Palangka Raya melakukan reaktivasi pada email individu sehingga kedepan dapat dimanfaatkan oleh seluruh individu dalam menyampaikan laporan atau menindaklanjuti surat ataupun berbagi informasi.

- Pemanfaatan sharing folder

Sharing folder dimanfaatkan dalam melakukan pengawasan penandaan. Pada tahun 2020, telah dilakukan akses ke sharing folder sebanyak 5 kali memberikan nilai 1 atau kurang dimanfaatkan.

- Pemanfaatan BCC

Dashboard BCC ditujukan untuk melakukan monitoring data SIPT dan SPIMKer yang telah dimutakhirkan serta pemanfaatan penggunaan email, sharing folder dan berita aktual yang telah diwartakan. Pada tahun 2020, pemanfaatan dashboard BCC mendapat nilai 0 atau kurang dimanfaatkan.

- Pemanfaatan berita aktual

Berita aktual kegiatan yang diunggah pada subsite BPOM. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan stakeholder eksternal seperti KIE, talkshow, bimtek, workshop dan lain sebagainya. Pada tahun 2020 berita aktual yang telah diupload sebanyak 57 berita dengan rata-rata 6 berita/bulan, memberikan nilai pemanfaatan berita aktual 2 masuk kategori dimanfaatkan.

e. **Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa penyebab kegagalan pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal antara lain:

- Sosialisasi kegiatan pengungkit capaian indikator masih belum efektif dilaksanakan.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan masih lemah sehingga tidak diikuti dengan penetapan rencana aksi untuk mendukung pencapaian indikator.
- Budaya organisasi PIKKIR belum optimal terinternalisasi ke seluruh individu pendukung organisasi untuk mendukung capaian kinerja.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, maka disimpulkan bahwa rendahnya indeks pemutakhiran data dan indeks pemanfaatan disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan masing-masing kriteria penilaian oleh pegawai maka perlu peningkatan komitmen pegawai dalam memutakhirkan informasi melalui SIPT setiap bulan berdasarkan realisasi kinerja yang telah dicapai dan peningkatan hubungan dan koordinasi dengan rumah sakit pemilik data keracunan atau toksikovigilans sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi yang dimutakhirkan pada SPIMKer. Dalam hal pemanfaatan sistem informasi BPOM, perlu dilakukan peningkatan kesadaran untuk menggunakan sistem informasi yang telah tersedia dalam peningkatan kinerja seperti pemanfaatan email *corporate*, sharing folder serta pemantauan pemutakhiran informasi pada BCC. Perlu dibentuk tim media yang melibatkan seluruh bidang/bagian untuk mewartakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilaksanakan dengan penayangan berita aktual pada subsite BBPOM di Palangka Raya. Untuk kedepannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemutakhiran informasi dan pemanfaatan data dan informasi setiap bulan.

11

Sasaran Kegiatan

Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	93	91	97,85	Baik

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya diperoleh dengan rumus :

(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

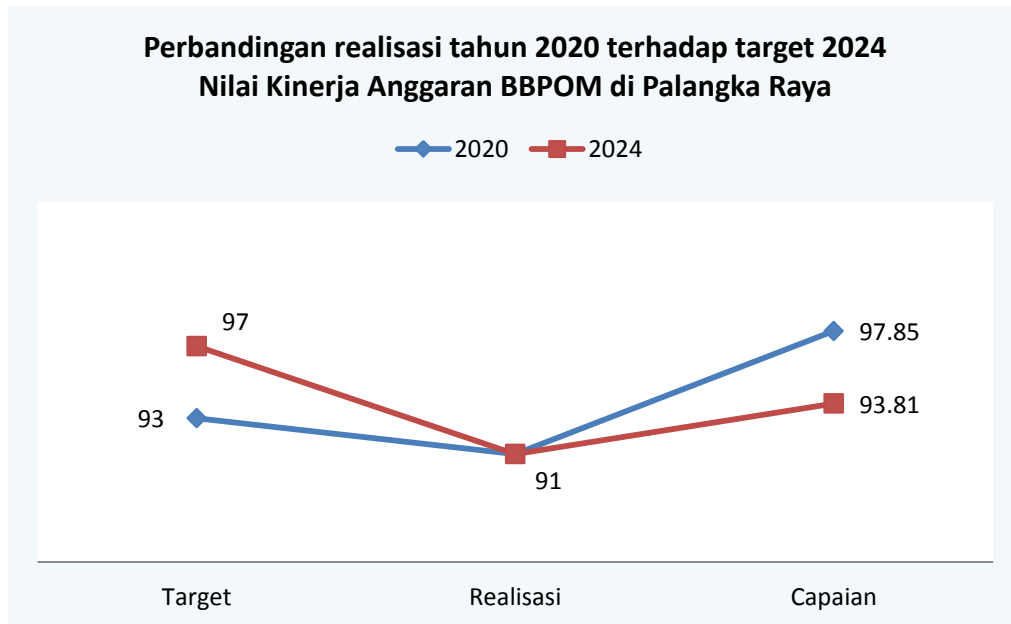
EKA = Evaluasi Kinerja Anggaran

IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) antara lain : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan Uang Persediaan, Rekon Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output.

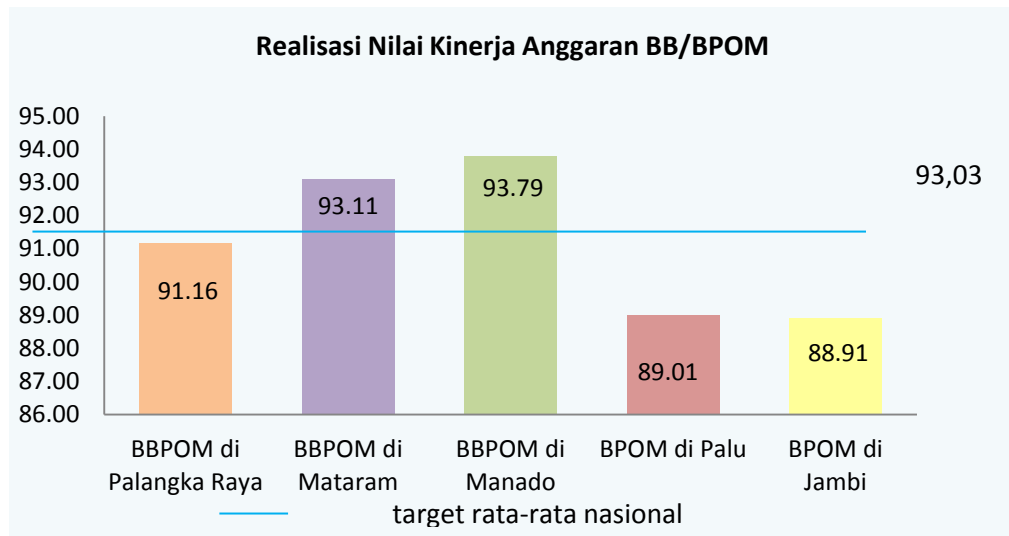
Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2020 adalah 91. Diperoleh dari nilai IKPA 98,15 dan nilai EKA sebesar 86,53. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya belum mencapai target yang ditetapkan **98,02%** dengan kriteria **"baik"**.

- a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah 97. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 93,81% dengan kriteria baik, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dengan menyusun langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja menjadi kriteria sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target nasional



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram dan BBPOM di Manado berada di atas target nasional 93, sedangkan BBOM di Palangka Raya, BPOM di Palu dan BPOM di Jambi mempunyai realisasi dibawah target nasional.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 98,02% dari target 93 yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator pada tahun 2020 dipengaruhi oleh adanya kebijakan relaksasi IKPA dari Kementerian Keuangan, sehingga indikator revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan memberi stimulus pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat pandemi covid-19 di tahun 2020.

Nilai IKPA pada tahun 2020 diperoleh 98,15. Dari 13 indikator, 9 indikator mendapat nilai 100, 1 indikator tidak dilaksanakan yaitu indikator Renkas atau perencanaan kas yaitu rasio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas (Rencana Penarikan Dana Harian) terhadap seluruh kewajiban Renkas yang diajukan ke KPPN. 3 indikator yang nilainya kurang dari 100 adalah Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 98,91, Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dengan nilai 92,86 dikarenakan tidak dilaksanakannya revolving pada bulan Desember dan Kesalahan SPM dengan nilai 80. Kesalahan SPM sebesar 5,85% atau 24 SPM dari 410 SPM yang diajukan hal ini

dipengaruhi oleh kurangnya verifikasi terhadap poin kritis dalam pengajuan SPM. Realisasi anggaran sebesar 95,63% dikarenakan terdapat anggaran belanja pegawai yang tidak terserap sebesar 3,67% dari keseluruhan pagu akibat tunjangan kinerja ke 13 dan 14 yang tidak dibayarkan. Realisasi anggaran sebesar 95,63 mempengaruhi capaian nilai EKA sebesar 86,53.

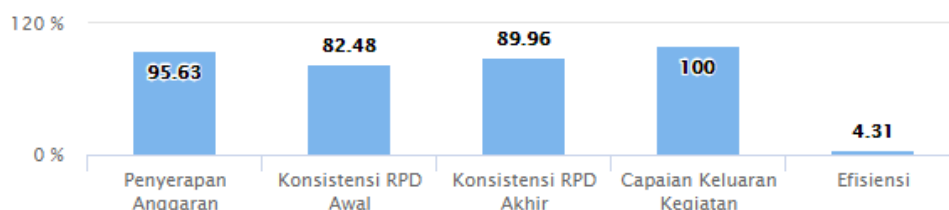
KETERANGAN	KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN			KEPATUHAN TERHADAP REGULASI				EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN					EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGLOLAAN UP DAN TUP	LPJ BENDAHARA	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	KONFIRMASI CAPAIAN OUTPUT	RETUR SP2D	RENKAS	KESALAHAN SPM				
Nilai	100.00	98.91	100.00	100.00	92.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	80.00	83.43	85%	98.15	
Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5				
Nilai Akhir	0.00	0.00	5.00	15.00	7.43	5.00	5.00	15.00	12.00	10.00	5.00	0.00	4.00				
Nilai Aspek	100.00			98.22				100.00					80.00				

Nilai EKA pada tahun 2020 sebesar 86,53 yang didukung oleh realisasi anggaran, konsisten atas Rencana Penarikan Dana, pemenuhan Capaian Keluaran Kegiatan serta Efisiensi. Dari seluruh komponen pendukung nilai efisiensi masih sangat rendah 4,31 meningkat 0,73 dari triwulan IV dari target 20, hal ini dipengaruhi oleh penetapan target yang terlalu tinggi sehingga terdapat beberapa indikator output yang capaiannya kurang dari 110% dan terdapat beberapa indikator yang pencapaian target indikator output yang baru dapat tercapai di akhir tahun.

NILAI EKA (SMART)				
PENYERAPAN ANGGARAN	KONSISTENSI	CAPAAN KELUARAN	EFISIENSI	NILAI EKA
95.63	89.96	100.00	4.31	86.53

Nilai SMART 86.53

Tahun Anggaran: 2020



* Penyerapan anggaran adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan pagu anggaran. Capaian Keluaran Kegiatan diukur dari realisasi volume keluaran (RVK) dan realisasi indikator keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata-rata geometrik.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Peningkatan pencapaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2020 disebabkan oleh :

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan yang dilakukan setiap bulan.
- Realokasi dan *refocusing* anggaran untuk kegiatan prioritas antara lain penanganan pandemi covid-19, peningkatan kemampuan laboratorium pengujian, peningkatan kompetensi petugas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, maka disimpulkan bahwa belum tercapainya nilai kinerja anggaran disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran yang dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang masih kurang baik serta capaian indikator kinerja output masih kurang tinggi (kurang dari 110%) sehingga mempengaruhi nilai efisiensi. Upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang antara lain :

- Verifikasi SPM secara lebih teliti.
- Monitoring dan evaluasi penggunaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dengan melakukan revolving setiap bulan.
- Penyusunan perencanaan yang lebih matang dalam membuat Penarikan Dana serta membangun komitmen dalam melaksanakan RPD yang telah dibuat serta monitoring dan evaluasi ketat pelaksanaan RPD dan juga verifikasi secara lebih teliti penuangan RPD pada Halaman III DIPA pada saat pengajuan revisi Halaman III DIPA setiap triwulannya sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- Monitoring dan evaluasi pencapaian target output dan indikator progresif setiap bulan sehingga dapat dilakukan perubahan target output dan kinerja untuk memperoleh capaian target dalam kriteria sangat baik atau baik pada akhir tahun.
- Meningkatkan capaian output kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap bulan
- Menyusun langkah-langkah untuk memenuhi seluruh kriteria penilaian pada EKA dan IKPA

- Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dalam mencapai kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran agar memenuhi target realisasi anggaran sebesar 99% dengan tetap memperhitungkan pencapaian sasaran kegiatan

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palangka Raya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palangka Raya	95	100	105,26	Baik

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien

Apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

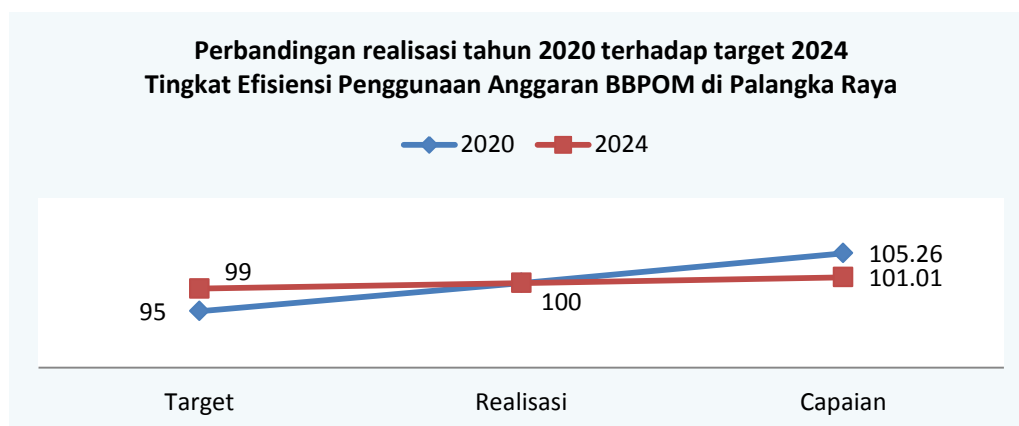
Tabel 3.4. Tingkat efisiensi anggaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TE	Kategori
<i>Stakeholder perspective</i>				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	0,17	Efisien
		2. Persentase Masyarakat yang memenuhi syarat	0,18	Efisien

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TE	Kategori
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0,08	Efisien
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	- 0,02	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	- 0,06	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0,02	Efisien
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	- 0,16	Tidak Efisien
		8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Palangka Raya	0,01	Efisien
<i>Internal process perspective</i>				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	0,65	Efisien
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	0,03	Efisien
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	0,11	Efisien
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1,75	Efisien
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-0,11	Tidak Efisien
		14. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palangka Raya	0,01	Efisien
		15. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	0,07	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0,01	Efisien
		17. Jumlah desa pangan aman	0,21	Efisien

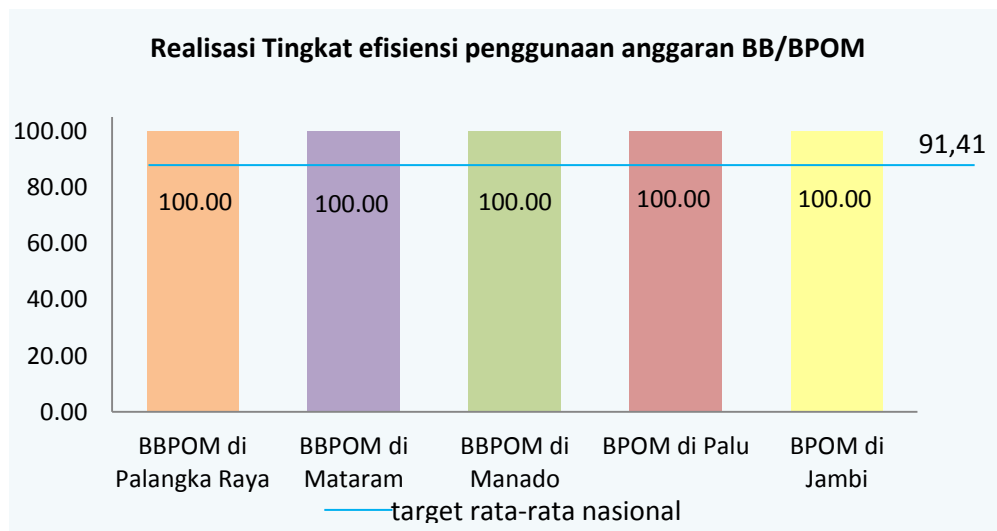
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TE	Kategori
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,21	Efisien
		20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,19	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1,03	Efisien
<i>Learning and growth perspective</i>				
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal	22. Indeks RB Balai Besar POM di Palangka Raya	- 0,07	Tidak Efisien
		23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palangka Raya	- 0,05	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	24. Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palangka Raya	0,10	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	- 0,16	Tidak Efisien
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal	- 0,06	Tidak Efisien
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya secara akuntabel	27. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Palangka Raya	- 0,01	Tidak Efisien
		28. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Palangka Raya	- 0,02	Tidak Efisien

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 99. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 101,01% dengan kriteria baik, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga dapat mempertahankan capaian kinerja dalam kriteria baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan UPT BPOM lain yang sejenis/setara dan target rata-rata nasional



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran BBOM di Palangka Raya, BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, BPOM di Palu dan BPOM di Jambi mempunyai realisasi berada diatas target nasional 91.41.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Indikator tingkat efisiensi penggunaan Anggaran berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 105,26% dari target 95 yang telah ditetapkan atau diatas target nasional yaitu 91,41 dengan **kategori baik**, hal ini disebabkan dari 28 indikator hanya 4 indikator yang memiliki realisasi output dibawah 90%, sisanya 24 indikator memiliki realisasi anggaran diatas 90%. Sedangkan realisasi anggaran dari 28 indikator hanya 1 indikator yang memiliki realisasi dibawah 90%, 27 indikator lainnya diatas 92%, sehingga menghasilkan efisiensi karena dengan anggaran yang terbatas bisa menghasilkan output yang melebihi target. Hal-hal yang telah dilakukan untuk

memastikan target 28 indikator tercapai adalah melalui rapat evaluasi dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Peningkatan pencapaian kinerja indicator Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya disebabkan oleh :

- Telah dilakukan realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, peningkatan kemampuan laboratorium pengujian, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kompetensi pegawai.
- Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan untuk mengetahui progress pelaksanaan kegiatan, mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi serta untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada periode selanjutnya.
- Optimalisasi anggaran dari sisa dana kegiatan atau kontrak yang telah selesai

Beberapa alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain :

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan secara berkala
- Optimalisasi anggaran dari sisa dana kegiatan atau kontrak karena target telah tercapai untuk kegiatan lain
- Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
- Menelaah setiap usulan kegiatan dan anggarannya dalam penyusunan anggaran ataupun revisi anggaran untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan ketidakefisienan penggunaan anggaran dalam pencapaian outcome sasaran kegiatan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, maka rencana aksi yang telah dilakukan antara lain :

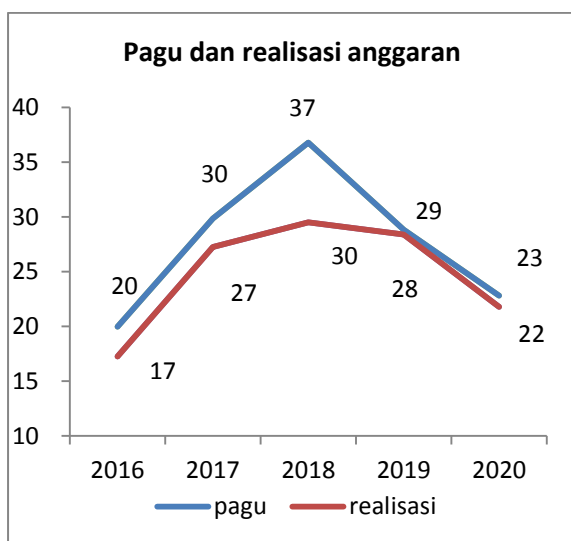
- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan secara berkala
- Optimalisasi anggaran dari sisa dana kegiatan atau kontrak karena target telah tercapai untuk kegiatan lain
- Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran

- Menelaah setiap usulan kegiatan dan anggarannya dalam penyusunan anggaran ataupun revisi anggaran untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan ketidakefisienan penggunaan anggaran dalam pencapaian outcome sasaran kegiatan

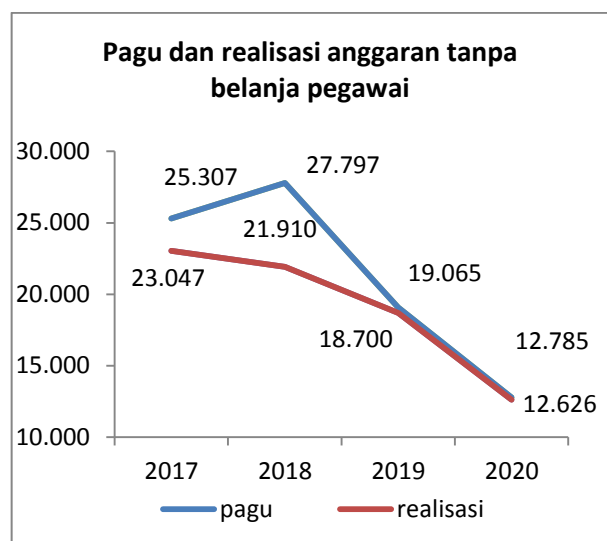
3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan pada tanggal 12 Nopember 2019 sebesar Rp 27.417.031.000,- anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan anggaran tahun 2019. Pada tanggal 02 Maret 2020 terdapat pengurangan pagu DIPA menjadi Rp 26.792.031.000,- karena kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat tidak dapat dilaksanakan. Pada tanggal 30 April 2020 terdapat pengurangan pagu DIPA dalam rangka *refocusing* penanggulangan covid-19 menjadi Rp 23.688.803.000,- Pada tanggal 13 Oktober 2020 terdapat pengurangan pagu DIPA menjadi Rp 22.800.803.000,- dalam rangka realokasi anggaran pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama tokoh masyarakat. Anggaran tersebut menurun 19,78% jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2019, penurunan anggaran tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya anggaran belanja modal, tidak dilaksanakannya kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat serta *refocusing* penanggulangan pandemi covid-19.

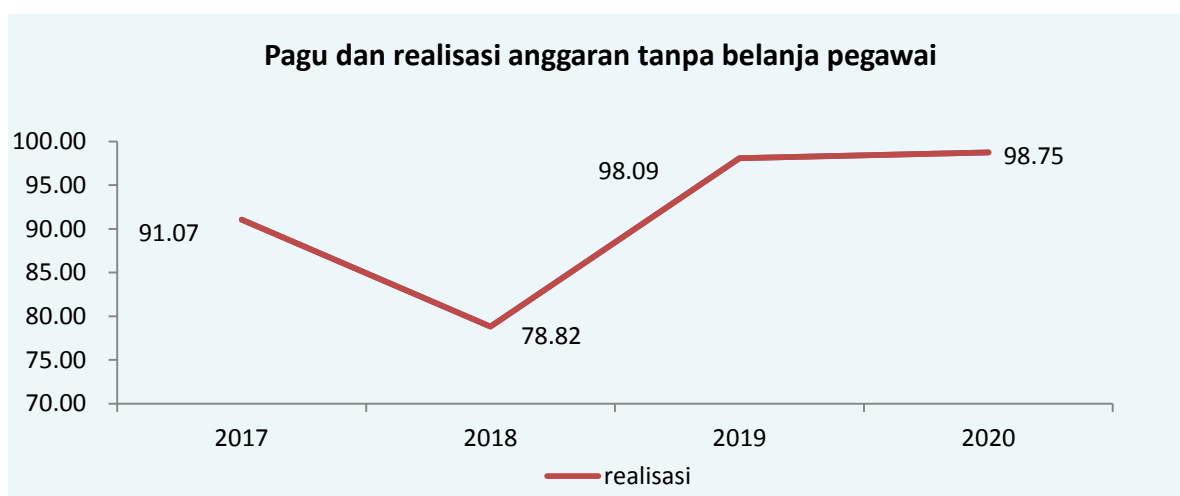
Realisasi anggaran tahun 2020 adalah Rp 21.803.273.783,- atau 95,63% atau sebesar 98,75% jika tanpa belanja pegawai. Realisasi anggaran tanpa belanja pegawai ini meningkat 0,18% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dikelola tahun 2019.



Grafik pagu dan realisasi anggaran tahun 2016-2020



Grafik pagu dan realisasi anggaran tanpa belanja pegawai tahun 2017-2020



Gambar 3.1. Grafik persentase realisasi anggaran tanpa belanja pegawai tahun 2017-2020

Berdasarkan grafik tersebut diketahui besaran pagu yang dikelola dan realisasi anggaran BBPOM di Palangka Raya tahun 2016-2020, dan persentase realisasi anggaran tanpa belanja pegawai dari tahun 2017-2020, bahwa pengelolaan anggaran tanpa belanja pegawai semakin meningkat sejak tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 98,75%, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Palangka Raya semakin lebih baik dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Palangka Raya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
<i>Stakeholder perspective</i>		831.807.820	830.680.185	99,86
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di	730.427.020	729.494.545	99,87

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	Palangka Raya			
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	12.091.550	12.088.621	99,98
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	89.289.250	89.097.019	99,78
<i>Internal process perspective</i>		4.056.096.130	3.906.166.045	96,30
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1.046.963.560	1.044.366.420	99,75
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1.756.446.750	1.612.179.900	91,79
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1.078.327.820	1.075.325.907	99,72
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	174.358.000	174.293.818	99,96
<i>Learning and growth perspective</i>		17.912.899.050	17.066.427.553	95,27
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	11.824.919.300	10.995.918.625	92,99
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	1.224.134.500	1.218.826.729	99,57
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	2.870.686.050	2.866.357.490	99,85
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	1.993.159.200	1.985.324.709	99,61

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Tahun 2020

Secara umum capaian anggaran pada ketiga perspektif berada pada kriteria baik, capaian anggaran terendah terdapat pada *learning and growth perspective* sebesar 95,27%, hal ini disebabkan oleh belanja pegawai sebagai pendukung sasaran kegiatan kedelapan, Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal terealisasi sebesar 92,99% dikarenakan tunjangan kinerja pegawai ke-13 dan ke-14 tidak dibayarkan yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pengelolaan APBN di tengah pandemi covid-19.

Realisasi anggaran terendah terdapat pada sasaran kegiatan kelima, Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di

Palangka Raya hal hal ini disebabkan oleh perencanaan kegiatan dan anggaran yang belum optimal yaitu kegiatan banyak dilaksanakan di akhir tahun serta komitmen pengembalian pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu diajukan di akhir tahun terkendala dengan batas waktu pengajuan ke KPPN. Namun hal ini tidak mempengaruhi pencapaian indikator sasaran kelima dengan tercapainya seluruh indikator sasaran kegiatan dan seluruh output pendukung sasaran kegiatan kelima yaitu Tingkat efektivitas KIE, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran kegiatan antara lain dengan penelaahan usulan kegiatan dan anggarannya dalam penyusunan anggaran ataupun revisi anggaran untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan daya ungkit dalam pencapaian outcome sasaran kegiatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya serta peningkatan kompetensi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan terkait fungsi substansi untuk menghasilkan perencanaan program dan kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator sasaran kegiatan dengan tetap memperhatikan upaya efisiensi dan peningkatan nilai tambah, selain itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi capaian sasaran kegiatan dan realisasi anggarannya secara konsisten setiap bulan.

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau presentase capaian output sama/lebih tinggi daripada presentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap persentase capaian input (dalam laporan ini, yang dimaksud capaian input adalah realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Palangka Raya tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

No	Kegiatan	TE	Kategori
1	Sampel Makanan yang Diperiksa	0,01	Efisien
2	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	0,00	Efisien
3	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	0,07	Efisien
4	Laporan Dukungan Teknis Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan	0,00	Efisien
5	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang <i>sesuai Good Laboratory Practise</i>	0,00	Efisien
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah	0,40	Efisien
7	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	0,00	Efisien
8	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	Efisien
9	Sekolah yang Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	0,01	Efisien
10	Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	0,00	Efisien
11	KIE Obat dan Makanan Aman	0,01	Efisien

No	Kegiatan	TE	Kategori
12	Desa Pangan Aman	0,19	Efisien
13	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	0,00	Efisien
14	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0,00	Efisien
15	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	0,00	Efisien
16	Layanan Perkantoran	0,06	Efisien
TOTAL		0,08	Efisien

Tabel 3.6. Tingkat efisiensi anggaran kegiatan BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020

Pada tahun 2020 BBPOM di Palangka Raya melaksanakan 16 (enam belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran kegiatan yang **semua kegiatan termasuk kategori efisien**. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,0 sampai 0,4. Dalam hal ini semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah memiliki nilai TE tertinggi karena capaian outputnya paling tinggi dibandingkan kegiatan lain. Capaian output mencapai 140%, dengan input sebesar 99,7%. Tingginya efisiensi pada kegiatan tersebut dikarenakan mampu menyelesaikan seluruh perkara sampai dengan tahap SPDP. Secara keseluruhan efisiensi penggunaan anggaran efisien dengan nilai TE 0,08.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Palangka Raya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang memadai seperti penggunaan indikator kinerja output yang sudah tertuang pada DIPA yaitu penggunaan indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah digunakan dalam pengukuran efisiensi pada penilaian Efektivitas Kinerja Anggaran (EKA) pada smArt DJA.

Nilai efisiensi sasaran diperoleh dari rata-rata nilai efisiensi indikator kinerja yang telah digunakan dalam pengukuran indikator kinerja Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka pada sasaran kegiatan kesebelas yaitu Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Indikator	% Capaian Anggaran	TE	Kategori
<i>Stakeholder perspective</i>		101,27	99,87	0,01	Efisien
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	109,78	99,87	0,1	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	94,25	99,98	-0,06	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	96,16	99,78	-0,04	Tidak Efisien
<i>Internal proces perspective</i>		130,32	97,13	0,34	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	123,60	99,75	0,24	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	104,90	91,79	0,14	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	120,25	99,72	0,21	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	158,73	99,96	1,03	Tidak Efisien
<i>Learning and growth perspective</i>		96,94	95,55	0,01	Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	90,67	92,99	-0,02	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	110	99,57	0,10	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	84,46	99,85	-0,15	Tidak Efisien
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	97,85	99,61	-0,02	Tidak Efisien

Tabel 3.7. Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020

Realisasi anggaran pada 11 sasaran kegiatan cukup baik karena diatas 90%, namun realisasi anggaran pada sasaran kegiatan 2,3, 7, 8, 10 dan 11 belum selaras dengan pencapaian indikator, dimana anggaran yang terserap lebih tinggi dibandingkan pencapaian indikator sehingga terdapat ketidakefisienan. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai sasaran kegiatan belum sepenuhnya efektif dan fokus penggunaan anggaran masih seputar pada pencapaian output, pencapaian yang lebih besar dari segi sasaran kegiatan dan perspektif sasaran kegiatan yang menghasilkan *outcome* yang lebih luas dampaknya bagi masyarakat belum menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran, hal tersebut dapat dilihat pada tingkat efisiensi sasaran kegiatan pendukung *stakeholder perspective*, 2 dari 3 sasaran kegiatan penggunaannya tidak efisien. Ketidakefisienan juga terjadi pada *learning and growth perspective*, 3 dari 4 sasaran kegiatan pendukungnya menunjukkan ketidakefisienan penggunaan anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran baru terjadi pada level *internal process perspective*, hanya 1 sasaran kegiatan yang tidak efektif, namun penilaian tersebut tidak sesuai dengan pencapaian output yang jauh lebih besar dibandingkan pencapaian inputnya. Efisiensi penggunaan anggaran pada *internal process perspective* bersifat relatif, karena output yang dicapai ternyata belum berhasil mendukung capaian sasaran kegiatan yang lebih tinggi pada level *stakeholder perspective*. Ketidakefisienan penggunaan anggaran pada *learning and growth perspective*, menunjukkan masih kurangnya komitmen anggota organisasi dalam membangun organisasi mewujudkan tujuan organisasi, hal tersebut dapat dilihat pada realisasi capaian output indikatornya, bahwa anggaran yang digunakan belum berhasil/tidak tepat sasaran. Ketidakefisienan penggunaan anggaran tersebut dapat disebabkan oleh ketidaktepatan pengalokasian anggaran pada kegiatan yang ternyata mempunyai daya ungkit kecil atau sama sekali tidak memberikan daya ungkit untuk mencapai sasaran kegiatan namun menggunakan anggaran cukup besar, karena hanya berfokus pada pencapaian realisasi anggaran. Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung atau tidak mempunyai daya ungkit atau hanya sedikit memberikan daya ungkit pada pencapaian sasaran, mencegah penyusunan anggaran yang berpotensi pada ketidakefisienan dengan melakukan penelaahan terhadap setiap usulan dan memfokuskan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator sasaran kegiatan.

Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran kegiatan, dapat diketahui efisiensi paling tinggi terdapat pada sasaran kegiatan pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya” dan sasaran kegiatan kesembilan “Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal”, sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada sasaran kegiatan kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”.

Adapun tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. **Pada sasaran kegiatan pertama, yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya”**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 729.494.545,- atau sebesar 3,35% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan *sampling*, pemeriksaan sampel dan pengujian sampel Obat dan Makanan *targeted* dan *random*. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah **efisien** dengan nilai TE 0,1 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Dari 4 indikator pendukung sasaran kegiatan pertama, hanya 1 indikator yang belum berhasil yaitu indikator “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan nilai TE -0,02. Beberapa revisi anggaran telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran diantaranya adalah optimalisasi anggaran untuk pengadaan suku cadang dan perlengkapan pengujian, pembelian test kit, serta koordinasi tindak lanjut hasil *sampling* dan pengujian. Optimalisasi anggaran tersebut sebanding dengan hasil pencapaian ketiga indikator pendukung sasaran kegiatan pertama Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Palangka Raya.
2. **Pada sasaran kegiatan kedua, “Meningkatnya kesadaran masyarakat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya”**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 12.088.621,- atau sebesar 0,10% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan penyebaran informasi, pameran, sosialisasi media cetak/elektronik oleh petugas. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -0,06 karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Sasaran kegiatan kedua ini hanya didukung oleh 1 indikator yaitu “Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu” yang masih belum berhasil mencapai target. Penyebab ketidakefisienan adalah strategi penyebaran informasi/publikasi yang kurang tepat yang tidak menyentuh semua segmen masyarakat, hanya melalui media sosial yang lingkungannya masih terbatas tidak sampai pada pelosok daerah, penyebaran brosur, dan pemasangan spanduk sedangkan kegiatan penyebaran informasi melalui pameran terbatas hanya dilaksanakan pada awal tahun sebelum pandemi berlangsung. Kedepan, dimana pandemi masih berlangsung perlu diubah strategi penyebaran informasi sehingga dapat langsung dirasakan masyarakat secara

luas meski dengan anggaran yang terbatas. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung dialihkan menjadi layanan melalui telepon, optimalisasi penggunaan media sosial seperti whatsapp, e-mail, *google review* dan media sosial yang sudah ada; pemasangan video tron, baliho dan spandung di tempat strategis dengan informasi Obat dan Makanan yang lebih variatif dan komunikatif, publikasi melalui media cetak dan elektronik di media yang familiar di masyarakat, pemanfaatan komunitas yang telah dibentuk seperti *agent of change* dari koordinator lapangan, komunitas pramuka, PKK dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyebarkan infografis lebih luas ke seluruh segmen masyarakat.

3. **Pada sasaran kegiatan ketiga, “ Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya”,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 89.097.019,- atau sebesar 0,41% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemeriksaan dan pengujian sampel Obat dan Makanan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya keagamaan, pengawasan label halal, penandaan rokok, pengawasan periklanan Obat dan Makanan, pendampingan registrasi produk dalam rangka sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga, serta penyebaran informasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -0,04 karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Dari 3 indikator pendukung sasaran kegiatan ketiga, hanya 1 indikator yang belum berhasil yaitu indikator “Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan” dengan nilai TE -0,16. Ketidakefisienan disebabkan oleh penggunaan anggaran atau revisi yang telah dilakukan masih berfokus untuk peningkatan sasaran kegiatan pada perspektif internal proses, belum berfokus untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan pada perspektif stakeholder. Strategi penyebaran informasi kepada masyarakat masih belum menyentuh seluruh segmen masyarakat di seluruh pelosok daerah. Media dan materi penyebaran informasi yang masih belum bervariasi, materi apa saja yang masih harus sering disebar, termasuk juga capaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Palangka Raya yang belum disebar sehingga perlu dikaji kembali strategi dan materi penyebaran informasi yang digunakan yang efisien dari segi anggaran namun efektif dapat diterima seluruh segmen masyarakat luar sampai ke pelosok daerah untuk memberikan gambaran kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

4. **Pada sasaran kegiatan keempat, "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya"**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.044.366.420,- atau sebesar 4,79% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya keagamaan, pengawasan label halal, penandaan rokok, pengawasan periklanan Obat dan Makanan, pendampingan registrasi produk dalam rangka sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga serta kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keempat adalah **efisien** dengan nilai TE 0,24 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Dari 6 indikator pendukung sasaran kegiatan keempat, hanya 1 indikator yang belum berhasil yaitu "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" dengan nilai TE -0,11. Beberapa revisi anggaran telah dilakukan untuk efisiensi anggaran diantaranya adalah koordinasi tindak lanjut hasil sampling dan hasil pemeriksaan sarana kepada pemangku kepentingan sehingga meningkatkan jumlah tindak lanjut dilaksanakan oleh pemangku kepentingan, peningkatan jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu didukung oleh aplikasi UMKM Harati sehingga pelayanan kepada pelaku usaha menjadi lebih cepat dan mudah, dan peningkatan pelayanan publik. Kebijakan pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan layanan publik, pengembangan beberapa inovasi dengan mempertimbangkan kondisi pandemi sekarang ini seperti penyampaian informasi hasil pengujian pihak ketiga yang dapat diakses oleh pemilik sampel mengingat jarak tempuh yang cukup jauh, penyelesaian lebih cepat pengujian pihak ketiga khususnya barang bukti serta pengelolaan arsip pengaduan dan layanan dengan memanfaatkan sistem informasi.
5. **Pada sasaran kegiatan kelima, "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya"**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.612.179.900,- atau sebesar 7,39% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan KIE Obat dan Makanan, sekolah yang diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), desa pangan Aman, pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, dan pengadaan sarana prasarana. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kelima adalah **efisien** dengan nilai TE 0,14 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Beberapa revisi anggaran telah dilakukan untuk efisiensi anggaran untuk mendukung pencapaian

indikator kinerja sasaran kegiatan kelima antara lain penyelenggaraan Forum komunikasi bersama lintas sektor, optimalisasi peningkatan pelayanan publik, namun masih belum efektif pelaksanaannya untuk mendukung sasaran kegiatan dan pelaksanaan kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada akhir tahun. Meski kegiatan KIE Obat dan Makanan berhasil mencapai target indikator “Tingkat efektivitas KIE” sebesar 106,20%, kegiatan KIE Obat dan Makanan juga mendukung 2 sasaran kegiatan pada perspektif stakeholder yang capaian tingkat efisiensinya adalah tidak efisien. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien pada sasaran kegiatan yang lain dikarenakan ukuran indikator yang berbeda, begitu pula sebaliknya. Tiga kegiatan pendukung pada sasaran kegiatan ini, capaiannya didasarkan pada jumlah lembaga yang telah memenuhi beberapa tahapan belum diikuti dengan pengukuran terhadap pemenuhan kriteria sebagai ukuran keberhasilan lembaga yang diintervensi sehingga belum menggambarkan efisiensi penggunaan anggaran yang sesungguhnya. Kedepan perlu dilakukan *refocusing* untuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar menunjang capaian sasaran kegiatan.

6. **Pada sasaran kegiatan keenam, “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya”**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.075.325.907,- atau sebesar 4,93% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan *sampling*, pemeriksaan sampel dan pengujian sampel Obat dan Makanan, serta pengadaan sarana prasarana pendukung pengujian sampel. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keenam adalah **efisien** dengan nilai TE 0,21 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Beberapa revisi anggaran telah dilakukan untuk efisiensi anggaran diantaranya adalah optimalisasi sisa anggaran pengadaan sarana prasarana pendukung pengujian seperti pengadaan reagensia dan media mikrobiologi, pengadaan suku cadang untuk pengadaan perlengkapan pengujian (optimalisasi) yang masih diperlukan serta untuk pengembangan kompetensi personel penguji dalam upaya pemenuhan parameter uji kritis.
7. **Pada sasaran kegiatan ketujuh, “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya”**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 174.293.818,- atau sebesar 0,80% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan investigasi dan penyidikan perkara obat dan makanan beserta pendukungnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka

penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketujuh adalah **tidak efisien** dengan nilai TE tertinggi yaitu 1,03 karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan dikarenakan target yang ditetapkan terlalu rendah. Beberapa revisi anggaran telah dilakukan untuk efisiensi anggaran diantaranya adalah berkontribusi dalam *refocusing* penanggulangan covid-19 sehingga terjadi pengurangan anggaran, meskipun anggaran berkurang capaian indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” meningkat sebesar 204,08% dengan mampu menyelesaikan seluruh target perkara sampai tahap II serta mampu menyelesaikan tambahan 2 perkara sampai tahap II dengan capaian output sebesar 140%, hal tersebut menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam menyelesaikan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan anggaran yang terbatas. Hal tersebut dapat dicapai berkat hubungan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan kepolisian dan kejaksaan serta kompetensi penyidik yang mumpuni.

8. Pada sasaran kegiatan kedelapan, “Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.818.234.620,- atau sebesar 8,34% dari keseluruhan realisasi anggaran. Perhitungan realisasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai meskipun anggaran tersebut mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan, pelaporan, pembangunan zona integritas melalui program RB, penjaminan mutu ISO 9001:2015, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB, *capacity building*, serta pemenuhan kebutuhan internal organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedelapan adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -0,02 karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Dari 2 indikator kinerja pendukung sasaran kegiatan kedelapan “Indeks RB BBPOM di Palangka Raya” dan “Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya” keduanya belum berhasil mencapai target, masing-masing dengan capaian 86,58% dan 95,12%. Beberapa revisi anggaran telah dilakukan untuk mendukung capaian sasaran kegiatan kedelapan namun masih belum efisien. Beberapa hal yang menyebabkan antara lain kegiatan peningkatan kinerja dalam rangka Reformasi Birokrasi yang dibiayai oleh anggaran ini belum menunjukkan outcome yang dapat meningkatkan internalisasi Reformasi Birokrasi. Kegiatan yang dilakukan masih diukur berdasarkan jumlah dan tingkat kelulusan. Outcome kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi/workshop/studi banding adalah berupa peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dapat dicontohkan pegawai pada fungsi pelayanan, dengan mengikuti peningkatan kompetensi pelayanan publik akan

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dapat terlihat dari peningkatan kecepatan, ketepatan, inovasi dan meningkatnya kepuasan. Berlaku demikian juga untuk pegawai pada fungsi lainnya. Outcome yang dihasilkan akan mendorong internalisasi Reformasi Birokrasi sehingga Reformasi Birokrasi akan terwujud sebagai cerminan dari setiap individu pegawai BBPOM di Palangka Raya. Selanjutnya penggunaan anggaran akan difokuskan pada peningkatan kinerja dalam rangka Reformasi Birokrasi secara bertahap dengan meletakkan landasan yaitu penguatan Budaya Organisasi sebagai dasar penyiapan perubahan sikap mental menuju implementasi program-program Reformasi Birokrasi berikutnya.

Dalam hal penggunaan anggaran untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja, kegiatan yang dilakukan seringkali bersifat insidental dalam waktu terbatas dan hanya melibatkan beberapa pegawai sehingga pegawai yang memahami strategi pencapaian akuntabilitas kinerja masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh beban pekerjaan yang tinggi pada setiap pegawai sebagai dampak dari terbatasnya jumlah SDM. *Cascading indicator* yang telah ditetapkan dilakukan untuk mendukung capaian indikator sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun demikian belum dilakukan pembebanan *cascading* tugas tambahan secara jelas untuk mendukung capaian indikator dalam perspektif *Learning and Growth* yang memerlukan dukungan dari setiap fungsi seperti pada indikator Nilai AKIP sehingga selain *cascading* (penjenjangan) terdapat pula *alignment* (penyelarasan) antar fungsi yang mendukung. Hal ini perlu kepemimpinan dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi internal kinerja pada tahun 2020 sudah dilakukan namun kerjasama tim belum terbangun secara optimal. Untuk tahun selanjutnya, pengelolaan anggaran untuk kegiatan akuntabilitas kinerja akan dilakukan secara selektif dan efisien pada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dan pelaksanaan serta outputnya sebanding.

9. **Pada sasaran kegiatan kesembilan, “Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal”**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.218.826.729,- atau sebesar 5,59% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai, bimbingan teknis, *workshop*, *benchmarking*, peningkatan jasmani dan rohani pegawai, penanganan pandemi covid-19 berupa pengadaan sarana perlindungan dan peningkatan imunitas pegawai, dan pemeriksaan risiko kesehatan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesembilan adalah **efisien** dengan nilai TE 0,10 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

Pandemi covid 19 menyebabkan banyak kegiatan terpadu yang tidak terlaksana, begitu juga dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan tahapan pelaksanaan kegiatan pendukung sekolah yang diintervensi keamanan PJAS dan desa pangan aman, serta tercapainya target output pasca retargeting APBNP menyisakan banyak anggaran yang kemudian dilakukan revisi anggaran untuk peningkatan kompetensi petugas.

10. Pada sasaran kegiatan kesepuluh, "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 2.866.357.490,- atau sebesar 13,15% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengadaan dan pemeliharaan alat laboratorium, operasional pengelolaan laboratorium, bimtek pengujian dalam rangka pemenuhan standard GLP, dan jaminan mutu ISO 17025:2017, verifikasi metode dan ikut serta dalam uji profisiensi, serta reakreditasi oleh KAN BSN, evaluasi pemeriksaan dan pengujian, evaluasi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, evaluasi pengawasan iklan, pemantauan toksikovigilance, langganan daya dan jasa. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesepuluh adalah **tidak efisien** dengan nilai TE yang paling rendah yaitu -0,15 karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Dari 2 indikator pendukung sasaran kegiatan kesepuluh "Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standard GLP' dan "Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal" dengan capaian masing-masing sebesar 84,29% dan 94,37% belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Beberapa revisi anggaran telah dilakukan untuk mendukung capaian sasaran kegiatan kedelapan namun masih belum efisien, ketidakefisienan ini disebabkan salah satunya oleh penetapan target indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP yang terlalu tinggi, penetapan target berdasarkan penilaian asesmen pemenuhan standard GLP yang menggunakan standar yang lama, sedangkan dalam penilaian capaian indikator tahun 2020 menggunakan standard penilaian yang baru sehingga target tidak terpenuhi untuk itu perlu dikaji kembali mengenai penetapan target indikator pada tahun mendatang menggunakan standard penilaian yang baru. Ketidakefisienan yang lain disebabkan oleh indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang belum berhasil mencapai target dikarenakan keterlambatan pematkhiran data pada SIPT dan SPIMKer serta belum dimanfaatkannya secara optimal penggunaan email *corporate, sharing folder*, berita aktual dan monitoring pada *dashboard* BCC. Untuk pencapaian kinerja yang lebih baik selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pematkhiran informasi dan pemanfaatan

data dan informasi secara konsisten setiap bulan serta internalisasi budaya organisasi PIKKIR secara optimal ke seluruh individu pendukung organisasi untuk mendukung capaian kinerja di tahun mendatang.

11. **Pada sasaran kegiatan kesebelas, "Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel"**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.985.324.709,- atau sebesar 9,11% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan implementasi sistem akuntansi pemerintah, penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan, pelaporan serta operasional perkantoran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesebelas adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -0,02 karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Satu dari 2 indikator pendukung sasaran kegiatan kesebelas belum berhasil mencapai target yaitu "Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya" dengan capaian indikator sebesar 98,02%. Beberapa revisi anggaran telah dilakukan untuk mendukung capaian sasaran kegiatan namun belum efisien, ketidakefisienan disebabkan oleh pengukuran nilai kinerja anggaran mengambil nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) dan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan proporsi masing-masing 60% dan 40%. Nilai EKA dan IKPA ditentukan oleh komitmen dalam pelaksanaan anggaran, revolving UP/TUP, pembayaran tepat waktu, penyampaian data kontrak, tidak terdapat kesalahan penerima pembayaran, konfirmasi capaian output tepat waktu, kesesuaian realisasi dengan halaman III DIPA, dan tidak ada kesalahan pengajuan SPM yang semuanya merujuk pada realisasi anggaran. Dalam EKA, realisasi anggaran bertemu dengan konsistensi RPD (Rencana Penarikan Dana) yang telah dibuat, capaian indikator kinerja serta efisiensi. Setiap realisasi anggaran harus diikuti dengan capaian output dan capaian indikator kinerja. Capaian indikator kinerja sangat dipengaruhi oleh komitmen pelaksanaan kegiatan terhadap POA yang telah dibuat dengan tetap memperhatikan perhitungan capaian indikator. Semakin tinggi capaian indikator lebih dari 110% akan memberikan nilai efisiensi anggaran yang tinggi. Untuk pencapaian kinerja yang lebih baik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan terhadap POA dan RPD yang telah dibuat serta monitoring dan evaluasi capaian indikator. Selain itu perlu dilakukan pengkajian kembali target yang ditetapkan untuk indikator Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya, meskipun capaian indikator ini 105,26% berhasil mencapai target, namun target yang ditetapkan terlalu tinggi 95, sedangkan target nasional untuk indikator ini berada dalam rentang 88-100, sehingga dapat mendongkrak capaian kinerja

indikator Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya untuk meningkatkan efisiensi sasaran kegiatan kesebelas.



BAB. IV

Penutup

Kesimpulan umum atas capaian kinerja
Rencana perbaikan kinerja

BALAI BESAR POM
di Palangka Raya

@bbpompalangkaraya | palangkaraya.pom.go.id

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2020 sebagai awal periode Rencana Strategis 2020-2024, Balai Besar POM di Palangka Raya telah melaksanakan 16 (enam belas) kegiatan untuk mencapai 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar **103,36%**. Pencapaian kinerja 11 sasaran kegiatan Balai Besar POM di Palangka Raya dengan uraian sebagai berikut :

1. **Kriteria Sangat Baik** untuk 3 sasaran kegiatan karena pencapaian indikator masing-masing mencapai lebih dari 110% dari target, yaitu :
 - Capaian sasaran kegiatan ketujuh sebesar 120%, Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan 1 (satu) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan dengan berhasil menyelesaikan semua tahapan penindakan sampai dengan tahap II melebihi target perkara yang telah ditetapkan.
 - Capaian sasaran kegiatan keenam sebesar 119,60%, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan 2 (dua) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pemenuhan pengujian Obat dan Makanan terhadap standar.
 - Capaian sasaran kegiatan kesembilan sebesar 110,00%, Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal dengan 1 (satu) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam mewujudkan SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal.
2. **Kriteria Baik** untuk 7 sasaran kegiatan karena pencapaian indikator masing-masing mencapai lebih dari 90% dari target, yaitu :
 - Capaian sasaran kegiatan pertama sebesar 109,96%, Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan 4 (empat) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.
 - Capaian sasaran kegiatan keempat sebesar 107,15%, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja

BBPOM di Palangka Raya dengan 6 (enam) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik.

- Capaian sasaran kegiatan kesebelas sebesar 101,64%, Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palangka Raya secara Akuntabel dengan 2 (dua) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam mengelola keuangan secara akuntabel.
 - Capaian sasaran kegiatan kelima sebesar 101,55%, Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan 4 (empat) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.
 - Capaian sasaran kegiatan ketiga sebesar 95,48%, Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan 3 (tiga) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.
 - Capaian sasaran kegiatan kedua sebesar 94,57%, Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBOM di Palangka Raya dengan 1 (satu) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.
 - Capaian sasaran kegiatan kedelapan sebesar 90,85%, Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal dengan 2 (dua) indikator, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal.
- 3. Kriteria Cukup** untuk 1 sasaran kegiatan karena pencapaian indikator masing-masing mencapai kurang dari 90% dari target, yaitu :
- Capaian sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 89,49%, Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan 2 (dua) indikator, hal ini menunjukkan BBPOM di Palangka Raya masih belum berhasil mewujudkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan yang optimal.

Pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 28 indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*). Dari 28 indikator (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **5 indikator** dengan kriteria “sangat baik”, **15 indikator** dengan kriteria “baik”, **4 indikator** dengan kriteria “cukup”, dan **4 indikator** mempunyai capaian lebih dari 120% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”.

Dua puluh (20) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kriteria sangat baik dan baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Kalimantan Tengah tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara empat (4) Indikator Kinerja Utama yang memiliki nilai kategori cukup perlu penguatan dan pengawalan secara serius agar tahun mendatang memiliki capaian yang lebih baik. Keempat indikator kinerja utama yang perlu diperhatikan tersebut ialah :

1. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
2. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
3. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BBPOM di Palangka Raya
4. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (*Good Laboratory Practice*).

Empat (4) Indikator Kinerja Utama yang berkriteria tidak dapat disimpulkan yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap target yang ditetapkan pada tahun mendatang sampai dengan akhir periode Rencana Strategis 2020-2024.

Untuk mendukung pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut BBPOM di Palangka Raya memperoleh alokasi anggaran pada TA 2020 sebesar Rp 27.417.031.000,-. Pada tanggal 02 Maret 2020 terdapat pengurangan pagu DIPA menjadi Rp 26.792.031.000,- karena kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat tidak dapat dilaksanakan. Pada tanggal 30 April 2020 terdapat pengurangan pagu DIPA dalam rangka *refocusing* penanggulangan covid 19 menjadi Rp 23.688.803.000,-. Pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam rangka realokasi anggaran pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama tokoh masyarakat menjadi Rp 22.800.803.000,-. Realisasi anggaran tahun 2020 adalah Rp 21.803.273.783,- atau 95,63% atau

sebesar 98,75% jika tanpa belanja pegawai. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dari besarnya penyerapan pagu anggaran, tetapi mempertimbangkan pula ketercapaian *output*, upaya efisiensi (*reducing cost*), peningkatan nilai tambah (*value added*), serta memberikan dampak signifikan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. BBPOM di Palangka Raya melaksanakan 16 kegiatan utama dengan hasil efisien, dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0,0 hingga 0,4.

4.2. Rencana Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan capaian kinerja di tahun mendatang antara lain:

1. Mengkaji kembali penetapan target indikator dengan capaian mendekati atau diatas 120% atau tidak dapat disimpulkan yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (165,32%), Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (275,36%), Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (121,21%), Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (119,20%), dan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (204,08%).
2. Mengkaji kembali penetapan target indikator kinerja yang terlalu tinggi sehingga mempengaruhi penilaian efisiensi sasaran kegiatan yang didukungnya yaitu, Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya (105,26%).
3. Menyusun langkah-langkah strategis pencapaian indikator kinerja yang menggunakan target nasional yang capaiannya kurang dari 100% dan mengawal pelaksanaan kegiatan pendukung indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu (94,57%), Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan (83,56%), Indeks RB BBPOM di Palangka Raya (86,58%), Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya (95,12%), Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya (94,70%), dan Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya (98,02%).
4. Menyusun langkah-langkah strategis pencapaian indikator kinerja yang capaiannya kurang dari 90% yaitu Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (88,74%).

5. Mengkaji kembali penetapan target indikator dengan capaian cukup kurang dari 90% yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (84,29%) untuk disesuaikan dengan standar penilaian yang baru.
6. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang yang berdaya ungkit dalam pencapaian *outcome* sasaran kegiatan, membangun komitmen dalam melaksanakan perencanaan yang telah dibuat serta monitoring dan evaluasi ketat pelaksanaan kegiatan pendukung capaian indikator dan realisasi anggaran setiap bulan dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
7. Internalisasi budaya organisasi PIKKIR secara optimal ke seluruh individu pendukung organisasi untuk mendukung capaian kinerja.
8. Penyempurnaan penjenjangan kinerja (*cascading indicator dan non-indicator*) berdasarkan beban kerja maupun proses bisnis untuk mendukung capaian kinerja.
9. Peningkatan Pengelolaan Kinerja yang bertujuan menumbuhkan budaya organisasi, meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap tata kelola pencapaian kinerja yang baik dan mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja.
10. Peningkatan pelayanan publik untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan layanan publik dengan pengembangan inovasi dalam kondisi pandemi.
11. Merumuskan strategi, kerjasama lintas sektor dan implementasi penyebaran informasi/publikasi berspektrum luas secara masif dan terstruktur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
12. Penelaahan setiap usulan kegiatan dan anggarannya dalam penyusunan anggaran ataupun revisi anggaran untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan ketidakefisienan penggunaan anggaran dalam pencapaian *outcome* sasaran kegiatan.





Lampiran Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BALAI BESAR POM
di Palangka Raya

@bbpompalangkaraya | palangkaraya.pom.go.id

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I.

RENSTRA BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA 2020-2024

1. a. Rencana Kinerja Tahun 2020
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Rencana Aksi Penetapan Kinerja 2020
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2020
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020
4. a. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Kegiatan Tahun 2020
b. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja Tahun 2020
5. Pengukuran Kinerja BBPOM di Palangka Raya dan UPT BPOM lain yang setara Tahun 2020

LAMPIRAN II.

REKAPITULASI AKSI PELAKSANAAN KEGIATAN (RAPK)

1. RAPK Balai Besar POM Di Palangka Raya 2020
2. RHPK Pengujian Sampel
3. RHPK Pengawasan Sarana Produksi
4. RHPK Pengawasan Sarana Distribusi
5. RHPK Pengawasan Iklan dan Penandaan Labe
6. RHPK Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
7. RHPK Matriks Tindak Lanjut oleh Pelaku Usaha dan Instansi Terkait

Lampiran I. Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya 2020-2024

Lampiran 1.1

Rencana Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	72
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	73
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	50



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya
Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096

email: balaiplomk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

-6-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	produksi dan distribusi yang dilaksanakan	
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15
		5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	60
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	72
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20
		3. Jumlah desa pangan aman	6
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Palangka Raya	88
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palangka Raya	81
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palangka Raya	75



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya
 Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096
 email: balaipomplk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

-7-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang berkinerja optimal		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal	84 1,51
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya secara akuntabel	1. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Palangka Raya 2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Palangka Raya	93 Efisien (95%)

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya

Dra. Trikoranti Mustikawati., Apt.

Lampiran 1.2.a

Perjanjian Kinerja Tahun 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya
 Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096
 email: balaipomgk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Trikoranti Mustikawati., Apt.
 Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya
 selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K Lukito, MCP
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 20 Mei 2020

Pihak Kedua


 Dr. Penny K Lukito, MCP

Pihak Pertama


 Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 3.5 No. 13, Palangka Raya
 Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096
 email: balaipomplk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Palangka Raya	88,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	50



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya

Telp. (0536) 3228359, 3230776 Fax. (0536) 3221096

email: balaipomplk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	yang dilaksanakan	
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palangka Raya	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86,62
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20
		3. Jumlah desa pangan aman	6
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya

Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax, (0536) 3221096

email: balaipompik@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	kerja Balai Besar POM di Palangka Raya		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Palangka Raya	88
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palangka Raya	81
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palangka Raya	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal	1,51
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya secara akuntabel	1. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Palangka Raya	93
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Palangka Raya	Efisien (95%)

Kegiatan
Anggaran

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp 23.688.803.000,-

Palangka Raya, 20 Mei 2020

Pihak Kedua


Pihak Pertama


 Dr. Penny K Lukito, MCP


 Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.

Lampiran 1.2b

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096 email: balaipomplk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id							
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020							
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA							
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B05	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,8	80,8	80,8	Rp 402.895.500,-
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	Rp 227.909.860,-
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85	Rp 122.338.000,-
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	83	83	Rp 84.307.550,-
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	72	Rp 16.075.000,-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	86	Rp 21.209.000,-
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas	0	0	0	73	Rp 41.874.630,-



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya

Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096

email: balaipomplk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	POM di Palangka Raya	kinerja pengawasan Obat dan Makanan					
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Palangka Raya	0	0	0	88,5	Rp 63.662.350,-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50	50	50	50	Rp 98.831.190,-
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7	50,7	50,7	50,7	Rp 13.932.650,-
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	Rp 279.526.300,-
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15	15	15	15	Rp 34.201.200,-
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	Rp 243.365.270,-
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palangka	0	0	0	3,51	Rp 408.476.350,-



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya

Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096

email: balaipomplk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Raya					
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	0	86,62	86,62	86,62	Rp 470.756.000,-
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20%	40%	60%	20	Rp 502.148.000,-
		3. Jumlah desa pangan aman	20%	40%	60%	6	Rp 850.000.000,-
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20%	40%	60%	2	Rp 170.000.000,-
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	40	60	82	Rp 526.723.550,-
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	40	60	75	Rp 630.376.760,-
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	30	45	63	Rp 205.857.000,-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Palangka Raya	0	0	0	88	Rp 11.797.585.500,-
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palangka Raya	0	0	0	81	Rp 139.005.000,-
9	Terwujudnya	Indeks profesionalitas	0	0	0	75	Rp 1.247.956.500,-



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya

Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096

email: balaipomplk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
	SDM Balai Besar POM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	ASN Balai Besar POM di Palangka Raya					
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	84	Rp 2.152.748.700,-
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal	0	1,51	1,51	1,51	Rp 952.924.140,-
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya secara akuntabel	1. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Palangka Raya	50	65	80	93	Rp 1.022.754.500,-
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Palangka Raya	Efisien (99%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Rp 961.362.500,-

Palangka Raya, 20 Mei 2020

Kepala Balai Besar POM Di
Palangka Raya

Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.

Lampiran 1.3

Pengukuran Kinerja Tahun 2020

**PENGUKURAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA TAHUN 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
<i>Stakeholder perspective</i>						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	94,36	116,78	Sangat Baik
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	91,86	117,77	Sangat Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	91,67	107,84	Baik
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	80,88	97,45	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	68,09	94,57	Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,60	101,86	Baik
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73	61	83,56	Cukup
		8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	88,5	89,40	101,02	Baik
<i>Internal process perspective</i>						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50	82,66	165,32	Tidak Dapat Disimpulkan
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	50,7	52,24	103,43	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
		ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan				
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	99,77	110,86	Sangat Baik
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15	41,30	275,33	Tidak Dapat Disimpulkan
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	53,24	88,73	Cukup
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	3,51	3,52	100,28	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	15. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86,62	91,99	106,20	Baik
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100	Baik
		17. Jumlah desa pangan aman	5	5	100	Baik
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	99,39	121,21	Tidak Dapat Disimpulkan
		20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	89,40	119,20	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63	128,57	204,08	Tidak Dapat Disimpulkan
<i>Learning and growth persepective</i>						
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	88	76,19	86,58	Cukup
		23. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	81	77,05	95,12	Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	24. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	75	82,50	110,00	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai	84	70,80	84,29	Cukup

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
	informasi pengawasan Obat dan Makanan	standar GLP				
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	1,51	1,43	94,70	Baik
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	27. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	93	91,16	98,02	Baik
		28. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya	Efisien (95%)	Efisien (100%)	105,26	Baik

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Palangka Raya
Rp.22.800.803.000,-

Lampiran 1.4.a

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

No	Program/Kegiatan	Input/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Sampel Makanan yang Diperiksa sesuai standar	Input : Dana	Rp	366.097.000	365.321.677	99.79
		Output : Jumlah sampel yang diperiksa	sampel	564	566	100,35
2	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	39.260.000	39.254.333	99.99
		Output : Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	46	46	100
3	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	421.943.000	420.663.458	99.70
		Output : Jumlah sarana sarana obat dan makanan yang diperiksa	sarana	418	447	100
4	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	35.522.000	35.521.100	100
		Output : Jumlah laporan	laporan	2	2	100
5	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	Input : Dana	Rp	3.181.910.000	3.179.912.636	99.94
		Output : Jumlah laboratorium	laboratorium	1	1	100
6	Perkara dibidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah	Input : Dana	Rp	195.730.000	195.665.118	99.97
		Output : Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	perkara	5	7	140
7	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar	Input : Dana	Rp	593.473.000	592.947.738	99.91
		Output : Jumlah sampel yang diperiksa	sampel	1221	1222	100,08
8	Penguatan Kelembagaan	Input : Dana	Rp	117.497.000	117.478.265	99.98

No	Program/Kegiatan	Input/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Pengawasan Obat dan Makanan di kabupaten/kota	Output : Jumlah kabupaten/kota	Kab/kota	1	1	100
9	Sekolah yang Diintervensi keamanan pangan Jajanan Anak Sekolah	Input : Dana	Rp	435.008.000	431.811.402	99.27
		Output : Jumlah sekolah yang diintervensi	sekolah	16	16	100
10	Keputusan/ sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	Input : Dana	Rp	92.963.000	92.906.350	99.94
		Output : Jumlah sertifikat yang diselesaikan	sertifikat	5	5	100
11	KIE Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	530.325.000	526.319.770	99.24
		Output : Jumlah KIE	KIE	39	39	100
12	Desa Pangan Aman	Input : Dana	Rp	850.000.000	712.174.582	83.79
		Output : Jumlah desa yang diintervensi	desa	5	5	100
13	Pasaryang Diintervensi menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	170.000.000	169.907.799	99.95
		Output : Jumlah pasar yang diintervensi	pasar	2	2	100
14	Layanan sarana dan prasarana internal	Input : Dana	Rp	330.226.000	330.062.000	99.95
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	1	100
15	Layanan dukungan manajemen Satker	Input : Dana	Rp	1.379.045.000	1.373.104.545	99.57
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	1	100
16	Layanan perkantoran	Input : Dana	Rp	14.061.804.000	13.220.223.010	94.02
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	1	100

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

No	Program/Kegiatan	Rata-rata % Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
		Input	Output				
1	Sampel Makanan yang Diperiksa sesuai standar	99.79	100.35	1.01	1	0.01	Efisien
2	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	99.99	100	1	1	0	Efisien
3	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang Diperiksa	99.70	100	1.07	1	0.07	Efisien
4	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	100	100	1	1	0	Efisien
5	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	99.94	100	1	1	0	Efisien
6	Perkara dibidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah	99.97	100	1.4	1	0.40	Efisien
7	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar	99.91	100.08	1	1	0	Efisien
8	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di kabupaten/kota	99.98	100	1	1	0	Efisien
9	Sekolah yang Diintervensi keamanan pangan Jajanan Anak Sekolah	99.27	100	1.01	1	0.01	Efisien
10	Keputusan/sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	99.94	100	1	1	0	Efisien
11	KIE Obat dan Makanan	99.24	100	1.01	1	0.01	Efisien
12	Desa Pangan Aman	83.79	100	1.19	1	0.19	Efisien
13	Pasaryang Diintervensi menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	99.95	100	1	1	0	Efisien
14	Layanan sarana dan prasarana internal	99.95	100	1	1	0	Efisien
15	Layanan dukungan manajemen Satker	99.57	100	1	1	0	Efisien
16	Layanan perkantoran	94.02	100	1.06	1	0.06	Efisien
				1.08	1	0.08	Efisien

Lampiran 1.4.b

PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR SASARAN KEGIATAN TAHUN 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Input/Output	Target	Realisasi	Capaian		
			Input : Dana	22.800.803.000	21.803.273.783	95.63		
			Output :	81.79	91.63	113.82		
<i>Stakeholder perspective</i>			Input : Dana	831.807.820	830.680.185	99.86		
			Output :	87.81	88.93	101.27		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	Input : Dana	336.604.680	336.348.999	99.92		
			Output : Obat random memenuhi syarat	80,8	94,36	116,78		
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Input : Dana	210.376.390	209.962.906	99.8		
			Output : Makanan random memenuhi syarat	78	91,86	117,77		
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Input : Dana	102.536.650	102.441.782	99.91		
			Output : Obat targeted aman dan bermutu	85	91,67	107,84		
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Input : Dana	80.909.300	80.740.858	99.79		
			Output : Makanan targeted aman dan bermutu	83	80,88	97,45		
					Input : Dana	730.427.020	729.494.545	99.87

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Input/Output	Target	Realisasi	Capaian
			Output : Obat dan Makanan memenuhi syarat	108.93	119.59	109.78
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	5. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Input : Dana	12.091.550	12.088.621	99.98
			Output : Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan	72	68,09	94,57
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	16.288.750	16.285.651	99.98
			Output : Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	86	87,60	101,86
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	16.957.350	16.915.110	99.75
			Output : Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73	61	83,56
		8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	Input : Dana	56.043.150	55.896.258	99.74
			Output : Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	88,5	89,40	101,02
			Input : Dana	89.289.250	89.097.019	99.78
			Output : kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja	82.50	79.33	96.16

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Input/Output	Target	Realisasi	Capaian
			pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya			
<i>Internal process perspective</i>			Input : Dana	4.056.096.130	3.906.166.045	96.30
			Output :	53.44	76.67	143.45
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Input : Dana	80.239.340	80.155.855	99.90
			Output : Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50	82,66	165,32
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Input : Dana	11.097.570	11.081.190	99.85
			Output : Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7	52,24	103,43
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Input : Dana	229.948.800	229.227.595	99.69
			Output : Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	99,77	110,86
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Input : Dana	31.516.160	31.514.566	99.99
			Output : sarana produksi Obat dan Makanan memenuhi ketentuan	15	41,30	275,33

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Input/Output	Target	Realisasi	Capaian	
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Input : Dana	181.755.240	181.134.406	99,66	
			Output : sarana distribusi Obat dan Makanan memenuhi ketentuan	60	53,24	88,73	
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	Input : Dana	512.406.450	511.252.808	99,77	
			Output : Pelayanan prima pelayanan publik BBPOM di Palangka Raya	3,51	3,52	100,28	
				Input : Dana	1.046.963.560	1.044.366.420	99,75
				Output : pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	44,87	55,46	123,60
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	15. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Input : Dana	471.306.750	468.071.917	99,31	
			Output : KIE yang dilaksanakan efektif	86,62	91,99	106,20	
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Input : Dana	331.187.000	327.994.202	99,04	
			Output : Sekolah dengan PJAS aman	16	16	100	
		17. Jumlah desa pangan aman	Input : Dana	800.010.000	662.199.582	82,77	
			Output : Desa pangan aman	5	5	100	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Input/Output	Target	Realisasi	Capaian
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Input : Dana	1534.943.000	153.914.199	99,98
			Output : Pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100
			Input : Dana	1.756.446.750	1.612.179.900	91,79
			Output : komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	27,41	28,75	104,90
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Input : Dana	549.020.110	547.840.705	99,79
			Output : Sampel Obat diperiksa dan diuji sesuai standar	82	99,39	121,21
		20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Input : Dana	529.307.710	527.485.202	99,66
			Output : Sampel Makanan diperiksa dan diuji sesuai standar	75	89,40	119,20
			Input : Dana	1.078.327.820	1.075.325.907	99,72
			Output : pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	78,50	94,40	120,25
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Input : Dana	174.358.000	174.293.818	99,96
			Output :	63	128,57	204,08

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Input/Output	Target	Realisasi	Capaian
	Palangka Raya		Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan berhasil			
<i>Learning and growth persepective</i>			Input : Dana	17.912.899.050	17.066.427.499	95.27
			Output : RB BBPOM di Palangka Raya	73.81	71.56	96.94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	Input : Dana	11.756.347.500	10.927.502.410	92.95
			Output : RB BBPOM di Palangka Raya	88	76,19	86,58
		23. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	Input : Dana	68.571.800	68.416.215	99.77
			Output : AKIP BBPOM di Palangka Raya	81	77,05	95,12
			Input : Dana	11.824.919.300	10.995.918.625	92.99
			Output : tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	84.50	76.62	90.67
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	24. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	Input : Dana	1.224.134.500	1.218.826.729	99.57
			Output : ASN BBPOM di Palangka Raya profesional	75	82,50	110,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Input : Dana	2.045.968.950	2.041633.720	99.79
			Output : Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP	84	70,80	84,29

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Input/Output	Target	Realisasi	Capaian
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	Input : Dana	824.817.100	824.723.770	99.99
			Output : Pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya optimal	1,51	1,43	94,70
			Input : Dana	2.870.686.050	2.866.357.490	99.85
			Output : laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	42.76	36.11	84.46
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	27. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	Input : Dana	1.027.985.100	1.020.159.605	99.24
			Output : Nilai kinerja anggaran baik	93	91,16	98,02
		28. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya	Input : Dana	965.174.100	965.165.050	100.0
			Output : Penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya efisien	Efisien (95%)	Efisien (100%)	105,26
			Input : Dana	1.993.159.200	1.985.324.655	99.61
			Output : Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	93	91	97.85

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI INDIKATOR SASARAN KEGIATAN TAHUN 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata % Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
			Input	Output				
			95.63	113.82	1.19	1	0.19	Efisien
<i>Stakeholder perspective</i>			99.86	101.27	1.01	1	0.01	Efisien
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	99.92	116.78	1.17	1	0.17	Efisien
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	99.8	117.77	1.18	1	0.18	Efisien
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99.91	107.84	1.08	1	0.08	Efisien
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99.79	97.45	0.98	1	-0.02	Tidak Efisien
			99.87	109.78	1.10	1	0.1	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	5. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	99.98	94.57	0.94	1	-0.06	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99.98	101.86	1.02	1	0.02	Efisien
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	99.75	83.56	0.84	1	-0.16	Tidak Efisien
		8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	99.74	101.02	1.01	1	0.01	Efisien
			99.78	96.16	0.96	1	-0.04	Tidak Efisien
<i>Internal process perspective</i>			96.30	143.45	1.49	1	0.49	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	99.90	165.32	1.65	1	0.65	Efisien

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata % Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
			Input	Output				
	Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	produksi dan distribusi yang dilaksanakan						
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	99.85	103.43	1.03	1	0.03	Efisien
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.69	110.86	1.11	1	0.11	Efisien
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99.99	275.33	2.75	1	1.75	Efisien
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99.66	88.73	0.89	1	-0.11	Tidak Efisien
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	99.77	100.28	1.01	1	0.01	Efisien
			99.75	123.60	1.24	1	0.24	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	15. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	99.31	106.20	1.07	1	0.07	Efisien
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	99.04	100	1.01	1	0.01	Efisien
		17. Jumlah desa pangan aman	82.77	100	1.21	1	0.21	Efisien
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	99.98	100	1	1	0	Efisien
			91.79	104.90	1.14	1	0.14	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99.79	121.21	1.21	1	0.21	Efisien
		20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99.66	119.20	1.20	1	0.20	Efisien
			99.72	120.25	1.21	1	0.21	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99.96	204.08	2.03	1	1.03	Tidak Efisien

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata % Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
			Input	Output				
	wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya							
<i>Learning and growth persepective</i>			95.27	96.94	1.02	1	0.02	Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	92.95	86.58	0.93	1	-0.07	Tidak Efisien
		23. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	99.77	95.12	0.95	1	-0.05	Tidak Efisien
			92.99	90.67	0.98	1	-0.02	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	24. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	99.57	110.0	1.10	1	0.10	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99.79	84.29	0.84	1	-0.16	Tidak Efisien
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	99.99	94.70	0.94	1	-0.06	Tidak Efisien
			99.85	84.45	0.85	1	-0.15	Tidak Efisien
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	27. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	99.24	98.02	0.99	1	-0.01	Tidak Efisien
		28. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya	100.0	105.26	0.98	1	-0.02	Tidak Efisien
			99.61	97.85	0.98	1	-0.02	Tidak Efisien

Lampiran 1.5

Pengukuran Kinerja BBPOM di Palangka Raya dan UPT BPOM lain yang setara Tahun 2020

NO	BASARAN REGAM	INDIKATOR KINERJA	BALAI POM DI PALI					MANADO					MATARAM					BALAI POM DI PALANGKARAYA					BALAI POM DI JAMBI					BADAN POM														
			% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	%CAPAIAN DK	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	%CAPAIAN DK	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	%CAPAIAN DK	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	%CAPAIAN DK	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	%CAPAIAN DK															
Nilai Kinerja Organisasi																																										
Strategis																																										
1	Terwujudnya Ohat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM	Presentase Ohat yang memenuhi syarat	80,80	85,63	105,98	Baik	105,98	84,00	88,74	105,64	Baik	105,64	80,80	84,35	104,39	Baik	104,39	80,80	94,36	116,79	Sangat Baik	116,79	80,80	94,05	116,40	Sangat Baik	116,40	80,80	87,36	108,12	Baik	108,12										
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	72,99	93,58	Baik	93,58	84,00	91,89	109,39	Baik	109,39	78,00	77,96	99,94	Baik	99,94	78,00	91,86	117,77	Sangat Baik	117,77	78,00	72,33	92,73	Baik	92,73	78,00	81,58	104,58	Baik	104,58										
		Presentase Ohat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,28	84,30	96,58	Baik	96,58	102,87	Baik	86,00	91,53	106,43	Baik	106,43	106,12	Baik	80,00	67,90	84,88	Cukup	84,88	102,30	Baik	85,00	91,67	107,84	Baik	107,84	109,96	Baik	77,00	89,92	116,78	Sangat Baik	116,78	111,47	Sangat Baik	85,00	84,26	99,13	Baik	103,46
		Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66,00	76,13	115,35	Sangat Baik	115,35	86,00	88,59	103,01	Baik	103,01	50,00	66,10	132,20	Tidak Dapat Diunggulkan	120,00	83,00	80,88	97,45	Baik	97,45	95,48	Baik	70,00	86,73	123,89	Tidak Dapat Diunggulkan	120,00	72,00	73,43	101,99	Baik	101,99								
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Ohat dan Makanan di wilayah kerja Balai	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Ohat dan Makanan aman dan bermutu	71,00	75,78	106,73	Baik	106,73	Baik	72,00	78,22	108,64	Baik	108,64	70,00	73,91	105,59	Baik	105,59	72,00	68,09	94,57	Baik	94,57	70,00	72,25	103,21	Baik	103,21	103,21	Baik	72,00	74,29	103,18	Baik	103,18							
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Ohat dan Makanan	83,00	88,89	107,10	Baik	107,10	83,10	88,79	106,85	Baik	106,85	83,00	86,48	104,19	Baik	104,19	86,00	87,60	101,86	Baik	101,86	95,48	Baik	86,00	86,70	100,81	Baik	100,81	82,00	86,81	105,87	Baik	105,87								
3	Meningkatnya kapuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Ohat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Ohat dan Makanan	70,00	65,08	92,97	Baik	92,97	100,62	Baik	72,00	81,16	112,72	Sangat Baik	112,72	108,79	Baik	71,00	74,98	105,61	Baik	105,61	104,22	Baik	73,00	61,00	83,56	Cukup	83,56	71,00	68,83	96,94	Baik	96,94	101,76	Baik	101,76						
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM	87,50	89,08	101,81	Baik	101,81	82,50	88,12	106,81	Baik	106,81	88,00	90,51	102,85	Baik	102,85	88,50	89,40	101,02	Baik	101,02	100,00	Baik	80,00	86,02	107,53	Baik	107,53	86,00	87,00	101,16	Baik	101,16								
Internal Process Perspective																																										
4	Meningkatnya efektivitas pemantauan sarana Ohat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	90,88	103,53	Baik	103,53	87,00	82,74	95,10	Baik	95,10	85,00	86,54	101,81	Baik	101,81	50,00	82,66	165,32	Tidak dapat diunggulkan	120,00	55,00	78,67	143,04	Tidak dapat diunggulkan	120,00	87,00	84,65	97,29	Baik	97,29										
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,60	64,47	96,81	Baik	96,81	63,70	56,09	88,05	Cukup	88,05	49,50	52,00	105,05	Baik	105,05	50,70	52,24	103,04	Baik	103,04	42,60	46,34	108,78	Baik	108,78	55,00	53,57	97,40	Baik	97,40										
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	100,00	117,65	Sangat Baik	117,65	106,46	Baik	95,00	98,34	103,52	Baik	103,52	102,20	Baik	85,00	99,59	117,17	Sangat Baik	117,17	110,28	Sangat Baik	90,00	99,77	110,86	Sangat Baik	110,86	107,15	85,00	86,83	102,15	Baik	102,15	102,00	Tidak Dapat Diunggulkan	85,00	97,16	114,31	Sangat Baik	106,44	
		Persentase sarana produksi Ohat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	40,35	87,72	Cukup	87,72	67,00	71,23	106,31	Baik	106,31	50,00	53,72	107,44	Baik	107,44	15,00	41,30	275,33	Tidak dapat diunggulkan	120,00	60,00	53,24	88,73	Cukup	88,73	55,00	69,28	125,96	Tidak dapat diunggulkan	120,00	60,00	66,46	110,77	Sangat Baik	110,77					
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Ohat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	Persentase sarana produksi Ohat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	79,12	113,03	Sangat Baik	113,03	60,00	67,76	112,93	Sangat Baik	112,93	55,00	60,61	110,20	Sangat Baik	110,20	60,00	53,24	88,73	Cukup	88,73	55,00	69,28	125,96	Tidak dapat diunggulkan	120,00	60,00	66,46	110,77	Sangat Baik	110,77										
		Indeks pelayanan publik	3,11	4,82	129,26	Tidak Dapat Diunggulkan	120,00	3,51	3,91	111,40	Sangat Baik	111,40	3,51	4,31	122,79	Tidak Dapat Diunggulkan	120,00	3,51	3,52	100,20	Baik	100,20	3,51	3,51	100,00	Baik	100,00	3,53	4,04	114,45	Sangat Baik	114,45										
		Tingkat efektivitas KIE Ohat dan Makanan melalui website dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	86,99	91,75	105,47	Baik	105,47	89,47	90,22	100,84	Baik	100,84	87,77	91,73	104,51	Baik	104,51	86,62	91,99	106,20	Baik	106,20	90,51	95,82	104,98	Baik	104,98	87,48	91,56	104,66	Baik	104,66										
		Jumlah desa pangan jaman	16,00	16	100,00	Baik	100,00	16	18	112,5	Sangat Baik	112,50	16	16	100,00	Baik	100,00	16	16	100,00	Baik	100,00	101,13	Baik	16	16	100,00	Baik	100,00	660,00	660	100,00	Baik	100,00								
6	Meningkatnya efektivitas pemantauan produk dan pengujian Ohat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	Jumlah pasar aman dari bahaya	4,00	4	100,00	Baik	100,00	4	4	100,00	Baik	100,00	5	5	100,00	Baik	100,00	4	4	100,00	Baik	100,00	4	4	100,00	Baik	100,00	211,00	211	100,00	Baik	100,00										
		Persentase sampel Ohat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,00	98,58	107,15	Baik	107,15	95,00	94,70	99,68	Baik	99,68	90,00	93,30	103,67	Baik	103,67	82,00	99,39	121,21	Tidak dapat diunggulkan	120,00	83,00	99,53	119,91	Sangat Baik	119,91	82,00	93,48	114,61	Sangat Baik	114,61										
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik	111,11	95,00	99,25	104,47	Baik	104,47	90,00	96,08	106,76	Baik	106,76	75,00	89,40	119,20	Sangat Baik	119,20	119,60	Baik	83,00	100,28	120,82	Tidak dapat diunggulkan	120,00	75,00	93,39	124,52	Tidak dapat diunggulkan	120,00								
		Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Ohat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	41,00	70,13	114,96	Sangat Baik	114,96	63,00	102,88	163,31	Tidak Dapat Diunggulkan	120,00	91,00	150,71	165,62	Tidak Dapat Diunggulkan	120,00	63,00	128,57	204,08	Tidak dapat diunggulkan	120,00	120,00	76,00	114,92	151,21	Tidak dapat diunggulkan	120,00	65,00	77,52	119,26	Sangat Baik	119,26									
Learning and Growth Perspective																																										
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM yang optimal	Indeks RB Balai POM	88,00	78,30	88,98	Cukup	88,98	92,67	Baik	88,00	81,85	93,01	Baik	93,01	95,09	Baik	88,00	86,10	97,84	Baik	97,84	97,17	Baik	88,00	77,05	95,12	Baik	95,12	90,85	Baik	85,00	71,51	84,13	Cukup	84,13							
		Indeks AKIP Balai POM	81,00	78,05	96,36	Baik	96,36	80,00	77,73	97,16	Baik	97,16	81,00	78,17	96,51	Baik	96,51	81,00	77,05	95,12	Baik	95,12	90,85	Baik	81,00	77,65	95,86	Baik	95,86	81,00	76,90	94,94	Baik	94,94								
9	Terwujudnya SDM Balai yang bermutu optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM	75,00	82,28	109,70	Baik	109,70	75,00	84,65	112,87	Sangat Baik	112,87	75,00	83,60	111,47	Sangat Baik	111,47	75,00	82,50	110,00	Sangat Baik	110,00	75,00	85,08	113,43	Sangat Baik	113,43	75,00	82,08	110,51	Sangat Baik	110,51										
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Ohat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00	73,20	89,27	Cukup	89,27	72,00	71,80	99,72	Baik	99,72	80,00	77	97,13	Baik	97,13	84,00	70,8	84,29	Cukup	84,29	80,40	81,00	67,2	82,96	Cukup	82,96	76,00	69,20	91,05	Baik	91,05									

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020

NO	BASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BALAI POM DI PALLI						MANADO						MATARAN						BALAI POM DI PALANGKARAYA						BALAI POM DI JAMBI						BADAN POM										
			% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	%CAPAIAN SK	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	%CAPAIAN SK	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	%CAPAIAN SK	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	%CAPAIAN SK	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% CAPAIAN												
	dan informasi pengawetan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM yang optimal	1,51	1,83	120,86	Tidak dapat diungkapkan	120,00			1,51	1,95	129,14	Tidak dapat diungkapkan	120,00			Baik	1,51	1,82	120,53	Tidak dapat diungkapkan	120,00			Baik	1,51	1,43	94,70	Baik	94,70			1,51	1,45	96,03	Baik	96,03			1,51	1,85	122,52	Tidak dapat diungkapkan
11	Terkelolanya keuangan Balai POM secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM	93,00	89,01	95,71	Baik	95,71	104,03	Baik	93,00	93,79	100,85	Baik	100,85	103,06	Baik	93,00	93,11	100,12	Baik	100,12	104,41	Baik	93,00	91,16	98,02	Baik	98,02	101,64	Baik	93,00	88,91	95,60	Baik	95,60	103,98	Baik	93,00	87,17	93,73	Baik		
			89,00	100,00	112,36	Sangat Baik	112,36			95,00	100	105,26	Baik	105,26			Baik	92,00	100	108,70	Baik	108,70	104,41	Baik	95,00	100,00	105,26	Baik	105,26	101,64	Baik	89,00	100,00	112,36	Sangat Baik	112,36	103,98	Baik	91,41	99,24	108,57	Sangat Baik	101,15

Lampiran 2.1

RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

	Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				Capaian terhadap Target Tahunan (Kumulatif)				Capaian Penyesuaian
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
											32.91	40.93	51.85	111.47	103.36
<i>Stakeholder perspective</i>											37.59	36.82	35.79	100.0	100
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya										112.78	110.46	107.38	109.96	109.96
	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	97.59	92.11	93.54	94.36	120.78	114.0	115.77	116.79	116.79
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	78	86.79	88.71	90.32	91.86	111.27	113.73	115.80	117.77	117.77
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85	85	92.0	89.58	93.62	91.67	108.24	105.39	110.14	107.84	107.84
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	83	83	83	92.0	93.18	72.88	80.88	110.84	112.27	87.81	97.45	97.45
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya										0	0	0	94.57	94.57
	5. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	0	0	0	72	0	0	0	68.09	0	0	0	94.57	94.57
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya										0	0	0	95.48	95.48
	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	86	0	0	0	86	0	0	0	87.6	0	0	0	101.86	101.86

	Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				Capaian terhadap Target Tahunan (Kumulatif)				Capaian Penyesuaian
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
	pengawasan Obat dan Makanan														
7.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73	0	0	0	73	0	0	0	61	0	0	0	83.56	83.56
8.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	88.5	0	0	0	88.5	0	0	0	89.4	0	0	0	101.02	101.02
<i>Internal Proses Perspective</i>											44.38	58.41	90.63	141.61	112.08
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya										111.01	109.43	125.97	140.60	107.15
9.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50	50	50	50	50	95	79.5	74.62	82.66	190.0	159.0	149.24	165.32	120
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	55.08	53.12	51.35	52.24	108.63	104.77	101.27	103.04	103.04
11.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	95.15	98.38	93.23	99.77	105.72	109.31	103.59	110.86	110.86
12.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15	15	15	15	15	27.78	27.78	32.26	41.30	185.19	185.19	215.05	275.36	120
13.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	60	60	60	60	60	45.90	58.97	51.84	53.24	76.50	98.29	86.40	88.74	88.74

	Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				Capaian terhadap Target Tahunan (Kumulatif)				Capaian Penyesuaian
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
	memenuhi ketentuan														
	14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	3.51	0	0	3.51	3.51	0	0	3.52	3.52	0	0	100.28	100.28	100.28
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya										4.44	31.04	38.17	101.55	101.55
	15. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86.62	0	86.62	86.62	86.62	0	91.30	93.38	91.99	0	105.40	107.80	106.20	106.20
	16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	20%	40%	60%	16	20%	20%	30%	16	1.25	1.25	1.88	100	100
	17. Jumlah desa pangan aman	5	20%	40%	60%	5	20%	25%	40%	5	4	5	8	100	100
	18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	20%	40%	60%	2	20%	25%	70%	2	12.5	12.5	35	100	100
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya										25.03	36.73	63.15	120.2	119.60
	19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	20	40	60	82	20.11	29.61	53.36	99.39	24.52	36.11	65.07	121.20	120
	20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	20	40	60	75	19.15	28.01	45.92	89.40	25.53	37.35	61.23	119.20	119.20
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya										37.04	56.44	135.22	204.08	120
	21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63	15	30	45	63	23.33	35.56	85.19	128.57	37.04	56.44	135.22	204.08	120

	Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				Capaian terhadap Target Tahunan (Kumulatif)				Capaian Penyesuaian
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
<i>Learning and growth perspective</i>											16.76	27.55	29.12	92.79	98
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal										0	0	0	90.85	90.85
	22. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	88	0	0	0	88	0	0	0	76.19	0	0	0	86.58	86.58
	23. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	81	0	0	0	81	0	0	0	77.05	0	0	0	95.12	95.12
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal										0	0	0	110	110
9	24. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	75	0	0	0	75	0	0	0	82.5	0	0	0	110.0	110.0
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan										67.04	67.14	83.38	101.64	89.49
	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	0	0	0	84	0	0	0	70.8	0	0	0	84.29	84.29
	26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	1.51	0	1.51	1.51	1.51	0	0.65	0.5	1.43	0	43.05	33.11	94.37	94.37
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel														101.64
	27. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	93	50	65	80	93	51.27	51.45	69.11	91.16	55.13	55.33	74.13	98.02	98.02
	28. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya	95	95	95	95	95	75	75	88	100	78.95	78.95	92.63	105.26	105.26



Lampiran 2.2

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total														Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa)	RAPK 2020		
					TMK				TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji				
					Jumlah sampling	TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab)	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)						
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																						
1	Obat	Palangka Raya	53	Targeted	53	0	0	0	0	0	53	53	50	1	2	0	0	3	0	53		
		Kabupaten Kotawaringin Barat	16		17	0	0	0	2	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		Palangka Raya	216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213
		Kabupaten Kotawaringin	68		67	0	0	0	13	67	67	53	0	14	0	0	0	14	0	0	67	
		TOTAL	353		350	0	0	0	15	350	350	333	1	16	0	0	17	0	0	350	95,14	
2	Obat Tradisional/	Palangka Raya	60	Targeted	60	0	0	0	4	60	60	54	2	4	0	0	6	0	60			
		Kabupaten Kotawaringin Barat	18		18	0	0	0	4	18	18	11	0	7	0	0	7	0	18			
		Palangka Raya	140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140		
		Kabupaten Kotawaringin	45		45	0	0	0	8	45	45	33	0	11	1	0	12	0	45			
		TOTAL	263		263	0	0	0	26	263	263	222	3	37	1	0	41	0	263	84,41		
3	Suplemen Kesehatan	Palangka Raya	9	Targeted	9	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	9			
		Kabupaten Kotawaringin Barat	12		3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3				
		Palangka Raya	57		58	0	0	0	58	58	58	0	0	0	0	0	0	58				
		Kabupaten Kotawaringin	8		18	0	0	0	3	18	15	0	3	0	0	3	0	18				
		TOTAL	86		88	0	0	0	3	88	88	85	0	3	0	0	3	0	88	96,59		
4	Kosmetik	Palangka Raya	79	Targeted	79	0	0	0	1	79	79	75	3	1	0	0	4	0	79			
		Kabupaten Kotawaringin Barat	25		25	0	0	0	1	25	23	1	1	0	0	2	0	25				
		Palangka Raya	317		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Kabupaten Kotawaringin	101		317	0	0	0	3	317	310	2	5	0	0	7	0	317				
		TOTAL	522		521	0	0	0	5	521	521	506	7	8	0	0	15	0	521	97,12		
Total Obat					70	0	0	0	2	70	70	67	1	2	0	3	0	70	95,71			
Total Obat Tradisional					78	0	0	0	8	78	78	65	2	11	0	13	0	78	83,33			
Total Suplemen Kesehatan					21	0	0	0	0	12	12	12	0	0	0	0	0	12	100,00			
Total Kosmetik					104	0	0	0	2	104	104	98	4	2	0	6	0	104	94,23			
Palangka Raya					201	0	0	0	5	201	201	188	6	7	0	13	0	201	93,53			
Kabupaten Kotawaringin					71	63	0	0	7	63	63	54	1	8	0	9	0	63	85,71			
Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos					272	264	0	0	12	264	264	242	7	15	0	22	0	264	91,67			
Total Obat					284	280	0	0	13	280	280	266	0	14	0	14	0	280	95,00			
Total Obat Tradisional					185	185	0	0	18	185	185	157	1	26	1	28	0	185	84,86			
Total Suplemen Kesehatan					65	76	0	0	3	76	73	0	3	0	3	0	76	96,05				
Total Kosmetik					418	417	0	0	3	417	417	408	3	6	0	9	0	417	97,84			
Palangka Raya					730	728	0	0	13	728	728	705	3	20	0	23	0	728	96,84			
Kabupaten Kotawaringin					222	230	0	0	24	230	230	199	1	29	1	31	0	230	86,52			
Total Random Obat, OT, Sk dan Kos					952	958	0	0	37	958	958	904	4	49	1	54	0	958	94,36			
TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos					1224	1222	0	0	49	1222	1222	1146	11	64	1	76	0	1222	93,78			
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																						
1	Pangan	Palangka Raya	116	Targeted	117	0	0	0	5	117	117	91	4	0	0	22	26	0	117	77,78		
		Kabupaten Kotawaringin Barat	19		19	0	0	0	16	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	100,00		
		Palangka Raya	292		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
		Kabupaten Kotawaringin	137		139	0	0	0	9	139	139	136	1	2	0	0	3	0	139	97,84		
		Total Pangan	429		430	0	0	0	31	430	430	395	14	15	6	0	35	0	430	91,86		
TOTAL PANGAN					564	566	0	0	0	52	566	566	505	18	15	6	22	61	0	566	89,22	

Lampiran 2.3

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana	Oktober			November			Desember			Total		
				Jumlah sarana yang	M K	TM K	Jumlah sarana yang	MK	TMK	Jumlah sarana yang	MK	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TM K
1	Industri Farmasi (IF)	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Kotawaringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah,	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Kotawaringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Kotawaringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Kotawaringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional	Palangkaraya	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Kabupaten Kotawaringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Kotawaringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Kotawaringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Kotawaringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Kotawaringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Kotawaringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Pangan	Palangkaraya	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	
		Kabupaten Kotawaringin	4	0	0	0	1	0	1	0	0	4	2	2	
		TOTAL	7	0	0	0	1	0	1	0	0	7	3	4	
12	Industri Rumah Tangga	Palangkaraya	787	8	6	2	0	0	0	4	3	1	34	16	18
		Kabupaten Kotawaringin	383	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	
		TOTAL	1170	10	6	4	0	0	0	4	3	1	38	16	22
Palangkaraya		791	8	6	2	0	0	0	4	3	1	38	17	21	
Kabupaten Kotawaringin Barat		387	2	0	2	1	0	1	0	0	0	8	2	6	
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		1178	10	6	4	1	0	1	4	3	1	46	19	27	

Lampiran 2.4

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	Oktober			November			Desember			Total		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Palangkaraya	7	7	1	0	1	0	0	0	1	1	0	6	3	3
		Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0			0	0	0
		TOTAL	7	7	1	0	1	0	0	1	1	0	6	3	3	
2	Apotek	Palangkaraya	275	100	9	6	3	0	0	0	0	0	0	81	36	45
		Kabupaten	68	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	14	7
		-			0			0			0			0	0	0
		TOTAL	343	122	9	6	3	0	0	0	0	0	102	50	52	
3	Toko Obat	Palangkaraya	179	27	2	0	2	0	0	0	1	1	0	21	8	13
		Kabupaten	40	8	0	0	0	1	0	1	3	0	3	5	0	5
		-			0			0			0			0	0	0
		TOTAL	219	35	2	0	2	1	0	1	4	1	3	26	8	18
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Palangkaraya	11	11	3	3	0	0	0	0	0	0	10	6	4	
		Kabupaten	4	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2
		-			0			0			0			0	0	0
		TOTAL	15	15	4	3	1	0	0	0	0	0	13	7	6	
5	Rumah Sakit (RS)	Palangkaraya	27	18	1	0	1	0	0	0	0	0	11	5	6	
		Kabupaten	6	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3
		-			0			0			0			0	0	0
		TOTAL	33	23	2	1	1	0	0	0	0	0	15	6	9	
6	Puskemas	Palangkaraya	129	30	4	1	3	0	0	0	0	0	25	6	19	
		Kabupaten	46	11	2	1	1	0	0	0	2	1	1	9	2	7
		-			0			0			0			0	0	0
		TOTAL	175	41	6	2	4	0	0	2	1	1	34	8	26	
7	Klinik	Palangkaraya	43	7	1	0	1	0	0	0	0	0	6	2	4	
		Kabupaten	40	8	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	2	1
		-			0			0			0			0	0	0
		TOTAL	83	15	1	0	1	0	0	3	2	1	9	4	5	
8	Lain-lain (Praktek Dokter)	Palangkaraya			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kabupaten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-			0			0			0			0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional / Suplemen Kesehatan	Palangkaraya	209	13	13	11	2	0	0	0	0	0	16	14	2	
		Kabupaten	15	10	1	1	0	0	0	0	2	2	0	6	5	1
		-			0			0			0			0	0	0
		TOTAL	224	23	14	12	2	0	0	2	2	0	22	19	3	
10	Fasilitas Distribusi Suplemen	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
		-			0			0			0			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Palangkaraya	120	40	30	20	10	0	0	0	0	0	64	42	22	
		Kabupaten	30	23	2	2	0	5	4	1	2	1	1	16	12	4
		-			0			0			0			0	0	0
		TOTAL	150	63	32	22	10	5	4	1	2	1	80	54	26	
12	Fasilitas Distribusi Pangan	Palangkaraya	479	168	0	0	0	6	6	0	41	23	18	93	62	31
		Kabupaten	220	54	0	0	0	22	6	16	14	3	11	46	16	30
		-			0			0			0			0	0	0
		TOTAL	699	222	0	0	0	28	12	16	55	26	29	139	78	61
		Palangkaraya	1479	421	64	41	23	6	6	0	43	25	18	333	184	149
		Kabupaten Kotawaringin Barat	469	145	7	5	2	28	10	18	27	10	17	114	54	60
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	1948	566	71	46	25	34	16	18	70	35	35	447	238	209

Lampiran 2.5

REKAPITULASI HASIL KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DAN DISTRIBUSI

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Oktober		November		Desember		Total	
				Rekomenda si*	TL**	Rekomenda si*	TL**	Rekomenda si*	TL**	Rekomenda si*	TL**
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Palangka Raya	0	0	0	0	2	1	4	2
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	0	0	0	0	2	1	4	2
				Palangka Raya	0	0	0	0	2	1	4
		Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Total	0	0	0	0	2	1	4	2	
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Palangka Raya	0	1	0	0	1	1	2	3
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	0	1	0	0	1	1	2	3
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Palangka Raya	0	2	2	2	1	1	5	5
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	0	2	2	2	1	1	5	5
		Suplemen Kesehatan	Palangka Raya	0	0	0	0	1	1	2	1
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	0	0	0	0	1	1	2	1
		Kosmetik	Palangka Raya	0	0	0	1	1	1	13	14
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	0	0	0	1	1	1	13	14
		Pangan	Palangka Raya	0	0	1	1	1	1	3	2
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	0	0	1	1	1	1	3	2
				Palangka Raya	0	3	3	4	5	5	25
		Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0		
		-	0	0	0	0	0	0	0		
		Total	0	3	3	4	5	5	25		

3	rekomen-dasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	6	6	6	6	0
			-									0
			TOTAL	0	0	0	0	6	6	6	6	6
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	8	7	0
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-									0
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	8	7	0
		Suplemen Kesehatan	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-									0
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		Kosmetik	Palangka Raya	0	0	0	0	0	1	8	8	0
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-									0
	TOTAL	0	0	0	0	0	1	8	8	0		
Pangan	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	8	4	0		
	Kabupaten Kotawaringin Barat			0	0	0	0	0	0	0		
	-									0		
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	8	4	0		
	Palangka Raya Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	1	25	19	0		
	-	0	0	0	0	6	6	6	6	0		
	Total	0	0	0	0	6	7	31	25	0		
4	rekomen-dasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	2	2	
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-									0
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	2	2	0
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-									0
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-									0
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-									0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pangan	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
	Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-									0		
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
	Palangka Raya Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0	3	3	0		
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total	0	0	0	0	0	0	3	3	0		
TOTAL	Palangka Raya Kabupaten Kotawaringin Barat	0	3	3	4	7	7	57	49	0		
	-	0	0	0	0	6	6	6	6	0		
	Total	0	3	3	4	13	13	63	55	0		

Lampiran 2.7

REKAPITULASI HASIL PENYIDIKAN

UPT	Tahapan	s.d TW IV (Jan - Des)											
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai	Capaian perkara	% keberhasilan	
		Perkara	Perkara	Perkara s.d	Perkara								
Palangka Raya	Palangka Raya	SPDP	4	0	0	0	1.00	0.15	0.15	15.00%	100.00%	150.00%	150.00%
		Tahap I			0	0	1.00	0.00	0.4	40.00%			
		P21			0	0	1.00	0.00	0.3	30.00%			
		Tahap II			6	0	1.00	0.00	0.15	15.00%			
		Total	4	0	6	0							
	Kabupaten Kotawaringin Barat	SPDP	1	2	0	0	1.00	0.15	0.15	15.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		Tahap I			0	0	1.00	0.67	0.4	40.00%			
		P21			0	0	1.00	0.67	0.3	30.00%			
		Tahap II			1	2	1.00	0.67	0.15	15.00%			
		Total	1	2	1	2							
	-	SPDP		0			0	0.15	0.15	0.00%	0.00%	0	0.00%
		Tahap I					0	0	0.4	0%			
		P21					0	0	0.3	0%			
		Tahap II					0	0	0.15	0%			
		Total	0	0	0	0							
	TOTAL	SPDP	5	2	0	0	1.00	0.15	0.15	15.00%	100.00%	128.57%	128.57%
		Tahap I			0	0	1.00	0.22	0.4	40.00%			
		P21			0	0	1.00	0.22	0.3	30.00%			
		Tahap II			7	2	1.00	0.22	0.15	15.00%			
		Total	5	2	7	2							

Lampiran 2.8

REKAPITULASI HASIL SERTIFIKASI

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Oktober			November			Desember			Total		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi sertifikat yang diterbitkan
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Kotawaringin Barat												
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Palangka Raya	1	0	0	1	1	1	1	0	0	6	4	4
			Kabupaten Kotawaringin Barat	1	0	0	0	1	1				3	3	3
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Palangka Raya	126	110	110	112	127	127	26	68	68	664	664	664
			Kabupaten Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Total			Palangka Raya	127	110	110	113	128	128	27	68	68	670	668	668
			Kabupaten Kotawaringin Barat	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4	4	4
-				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total				128	110	110	113	129	129	27	68	68	674	672	672

Lampiran 2.9

REKAPITULASI HASIL DESA

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian DJA)			Total	Jumlah desa pangan aman (diisi oleh UPT)				CAPAIAN RAPK						
			Oktober	November	Desember		s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV	RAPK s,d		RAPK s,d TW IV (Jan-Des)				
											Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
Palangkaraya	1 Adokasi Kelembagaan Desa	20	0			20											
	2 Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5	0			5											
	3 Pengawalan	10	10			10											
	4 Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15	0			15											
	5 Bimtek Komunitas	15	15			15											
	6 Fasilitasi Keamanan Pangan	10	0	10		10											
	7 Intensifikasi Pengawasan Keamanan	10	0	5	5	10											
	8 Monitoring dan Evaluasi (pertemuan)	10	0		10	10											
	9 Lomba Desa Pangan Aman	5	0	5		5											
Total	100	25	20	15	100					40	0			100			

Lampiran 2.9

REKAPITULASI HASIL PASAR

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian DJA)			Total	Jumlah Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (diisi oleh UPT)			
			Oktober	Novemb	Desemb		s.d TW	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV
Palangkaraya	1 Adokasi	20	0	0		20				
	2 Survey Pasar	5	0	0		5				
	3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi	15	0	0		15				
	4 Monev (Sampling dan Pengujian)	20	0	0		20				
	5 Penyuluhan	5	0	0		5				
	6 Kampanye	5	0	0		5				
	7 Monev Tahap 2 (Sampling dan	20	0	20		20				
	8 Lomba Pasar Aman	10	0	0	10	10				
	Total	100	0	20	10	100				



BADAN POM

2020 Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

BALAI BESAR POM
di Palangka Raya